



**PENGARUH LITERASI PAJAK, PEMERIKSAAN
PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK MELALUI
KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL
INTERVENING
(Studi Kasus Pada UMKM di Kota Semarang)**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Pada Universitas Negeri Semarang**

**Oleh :
Triska Rahmawati
(7101416309)**

**JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2020**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

Hari : Senin
Tanggal : 3 Agustus 2020.

Mengetahui,

Ketua Jurusan Pendidikan Akuntansi,



Ahmad Nurkhin, S.Pd., M.Si.

NIP. 198201302009121005

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Kusmuriyanto'.

Dr. Kusmuriyanto, M.Si.

NIP. 196005241984031001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : *Senin*
Tanggal : *24 Agustus 2020*

Penguji I,



Dr. Amir Mahmud, M.Si,
NIP. 1972121998021001

Penguji II,



Ratih Widhiastuti, S.Pd., M.Si.
NIP. 198601082015042001

Penguji III,



Dr. Kusmuriyanto, M.Si.
NIP. 196005241984031001

Mengetahui,


Drs. Heri Yanto, M.B.A., PhD.
NIP. 196307181987021001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Triska Rahmawati

NIM : 7101416309

Tempat Tanggal Lahir : Semarang, 18 Juni 1998

Alamat : Jl. Taman Siswa, Sekaran, Gunungpati, Semarang

menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya berseedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 26 Juli 2020



Triska Rahmawati

NIM. 7101416309

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

- ❖ “Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” (Qs. Al-Insyirah: 5-6)
- ❖ “Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar.” (Qs. Ar-Rum: 60)
- ❖ “Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya.” (Qs. Al-Baqarah: 286)

Persembahan

- ❖ Orangtuaku, Bapak Sutrisno (Alm) dan Ibu Sukaryah
- ❖ Kedua Kakakku, Lilis Setyawati dan Budi Cahyono
- ❖ Teman seperjuangan Pendidikan Akuntansi B 2016
- ❖ PPL SMK Muhammadiyah 1, dan KKN Kebasen
- ❖ Keluarga, kerabat dan teman-teman semua
- ❖ Guru dan dosen
- ❖ Almamater Universitas Negeri Semarang

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Literasi Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel *Intervening* (Studi Kasus pada UMKM di Kota Semarang)”, dalam rangka menyelesaikan studi strata 1 untuk mencapai gelar sarjana pendidikan di Universitas Negeri Semarang.

Penyusunan skripsi ini telah mendapatkan banyak bantuan, dukungan dan bimbingan dari beberapa pihak, maka dengan rasa hormat penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rohman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Heri Yanto, MBA., Ph.D., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah mengesahkan skripsi ini.
3. Ahmad Nurkhin, S.Pd., M.Si., Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi Program Strata 1 (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
4. Dr. Kusmuriyanto, M.Si., Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama perkuliahan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini hingga akhir.
5. Dr. Amir Mahmud, M.Si., selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan masukan dan pengarahan agar skripsi menjadi lebih baik.

6. Ratih Widhiastuti, S.Pd., M.Si., selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan masukan dan pengarahannya agar skripsi menjadi lebih baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama perkuliahan.
8. Wajib Pajak UMKM Kota Semarang yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya atas kebaikan yang telah diberikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca.

Semarang, 26 Juli 2020



Penulis

SARI

Rahmawati, Triska. 2020. *Pengaruh Literasi Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada UMKM di Kota Semarang)*. Skripsi. Jurusan Pendidikan Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Dr. Kusmuriyanto, M.Si.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Literasi Pajak, Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak

Kota Semarang memiliki wajib pajak terdaftar yang meningkat setiap tahunnya. Meskipun demikian, wajib pajak terdaftar wajib SPT cenderung mempunyai pertumbuhan yang fluktuatif dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Sehingga jumlah wajib pajak terdaftar wajib SPT belum sesuai dengan jumlah UMKM yang ada pada Kota Semarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh literasi pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak.

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling insidental dengan sampel sebanyak 60 responden dari UMKM di Kota Semarang. Data yang digunakan adalah data primer melalui kuesioner yang berisi jawaban-jawaban responden. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif, analisis jalur dan uji sobel.

Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak, literasi pajak, pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak berada dalam kategori tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi pajak dan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Terdapat pengaruh positif signifikan sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Literasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Pemeriksaan pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Hasil pengaruh mediasi menunjukkan literasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak, namun pemeriksaan pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak.

Kesimpulan penelitian ini bahwa kesadaran wajib pajak berhasil memediasi penuh pemeriksaan pajak, memediasi parsial pada sanksi pajak dan tidak memediasi pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Saran dari penelitian ini adalah pelaksanaan pemeriksaan pajak disesuaikan dengan situasi dan kondisi wajib pajak, penegasan dalam pemberian sanksi tanpa toleransi bagi para pelanggar pajak dan wajib pajak diharapkan jujur dalam melakukan pelaporan jumlah pendapatan, peningkatan kesadaran pajak masih sangat diperlukan karena anggapan masyarakat masih ada dana lain untuk pembangunan. Pemerintah diharapkan dapat mengedukasi pentingnya membayar pajak khususnya pajak UMKM bagi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan daerah.

ABSTRACT

Rahmawati, Triska. 2020. Effect of Tax Literacy, Tax Examination and Tax Sanctions on Tax Compliance through Tax Awareness as Intervening Variables (Case Study at UMKM in Semarang City). Final Project. Department of Economic Education. Faculty of Economics. Universitas Negeri Semarang. Supervisor Dr. Kusmuriyanto, M.Si.

Keywords: Tax Compliance, Tax Literacy, Tax Examination, Tax Sanctions, Tax Awareness

Semarang City has registered taxpayers who increase every year. But, growth of registered taxpayers who have reported SPT is fluctuate from 2014 to 2018. So the number of registered taxpayers who have reported SPT has not matched the number of UMKM in Semarang City. The purpose of this study is to determine the effect of tax literacy, tax audits and tax penalties on taxpayer compliance through taxpayer awareness.

The population in this study is the UMKM taxpayer in the city of Semarang. The sampling technique in this study used incidental sampling with a sample of 60 respondents from UMKM in Semarang City. The data used are primary data through questionnaires containing respondents' answers. Data analysis in this study used descriptive statistical analysis, path analysis and sobel tests.

Descriptive analysis show that taxpayer compliance, tax literacy, tax audit, tax sanctions and taxpayer awareness are in the high category. The results showed that tax literacy and tax audit had no significant effect on taxpayer compliance. There is a significant positive effect of tax sanctions and taxpayer awareness on taxpayer compliance. Tax literacy has no significant effect on taxpayer awareness. Tax audits and tax sanctions affect taxpayer awareness. The results of the effect of mediation show that tax literacy has no effect on taxpayer compliance through taxpayer awareness, but tax audits and tax sanctions have an effect on taxpayer compliance through taxpayer awareness.

This study concluded that awareness of the taxpayer successfully mediate full tax audit, partially mediate the tax penalties and did not mediate the effect of tax literacy on tax compliance. Suggestions from this research are that the implementation of tax audits is adjusted to the situation and conditions of the taxpayers, the affirmation of the imposition of sanctions without tolerance for tax offenders and taxpayers is expected to be honest in reporting the amount of income, raising tax awareness is still very necessary because the public assumption there are still other funds for development. The government is expected to educate the importance of paying taxes, especially UMKM taxes for the progress of development and regional welfare.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | ii |
| PENGESAHAN KELULUSAN | iii |
| PERNYATAAN..... | iv |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | v |
| PRAKATA | vi |
| SARI | viii |
| ABSTRACT | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR TABEL..... | xiv |
| DAFTAR GAMBAR..... | xvi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2. Identifikasi Masalah..... | 14 |
| 1.3. Cakupan Masalah..... | 16 |
| 1.4. Rumusan Masalah | 16 |
| 1.5. Tujuan Penelitian | 17 |
| 1.6. Manfaat Penelitian | 18 |
| 1.7. Orisinalitas Penelitian | 19 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN..... | 21 |
| 2.1. Kajian Teori Utama..... | 21 |
| 2.1.1 Teori Atribusi (Atribution Theory)..... | 21 |
| 2.2. Kajian Variabel Penelitian | 23 |
| 2.2.1. Kepatuhan Wajib Pajak..... | 23 |
| 2.2.2. Literasi Pajak | 26 |
| 2.2.3. Pemeriksaan Pajak | 30 |
| 2.2.4. Sanksi Pajak..... | 32 |
| 2.2.5. Kesadaran Wajib Pajak | 35 |
| 2.3. Kajian Penelitian Terdahulu..... | 38 |

| | |
|--|-----------|
| 2.4. Kerangka Berpikir..... | 46 |
| 2.4.1. Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak..... | 46 |
| 2.4.2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak..... | 47 |
| 2.4.3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak..... | 48 |
| 2.4.4. Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak..... | 49 |
| 2.4.5. Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak..... | 50 |
| 2.4.6. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak..... | 50 |
| 2.4.7. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak..... | 52 |
| 2.4.8. Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel <i>Intervening</i> | 53 |
| 2.4.9. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel <i>Intervening</i> | 53 |
| 2.4.10. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel <i>Intervening</i> | 54 |
| 2.5. Hipotesis Penelitian..... | 56 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 57 |
| 3.1. Jenis dan Desain Penelitian..... | 57 |
| 3.2. Populasi dan Sampel Penelitian..... | 57 |
| 3.3. Variabel Penelitian..... | 59 |
| 3.3.1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)..... | 59 |
| 3.3.2. Literasi Pajak (X1)..... | 59 |
| 3.3.3. Pemeriksaan Pajak (X2)..... | 60 |
| 3.3.4. Sanksi Pajak (X3)..... | 61 |
| 3.3.5. Kesadaran Wajib Pajak (Z)..... | 61 |
| 3.4. Metode Pengumpulan Data..... | 62 |
| 3.5. Uji Instrumen..... | 63 |
| 3.5.1. Uji Validitas Instrumen..... | 63 |
| 3.5.2. Uji Reliabilitas Instrumen..... | 66 |
| 3.6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data..... | 67 |
| 3.6.1. Analisis Statis Deskriptif..... | 67 |
| 3.6.1.1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)..... | 68 |

| | |
|--|-----------|
| 3.6.1.2. Literasi Pajak (X1) | 68 |
| 3.6.1.3. Pemeriksaan Pajak (X2) | 69 |
| 3.6.1.4. Sanksi Pajak (X3) | 70 |
| 3.6.1.5. Kesadaran Wajib Pajak (Z) | 71 |
| 3.6.2. Uji Asumsi Klasik | 71 |
| 3.6.2.1. Uji Normalitas | 71 |
| 3.6.2.2. Uji Linearitas | 72 |
| 3.6.2.3. Uji Multikolinieritas | 72 |
| 3.6.2.4. Uji Heteroskedastisitas | 72 |
| 3.6.3. Analisis Jalur | 73 |
| 3.6.4. Uji Sobel (<i>Sobel Test</i>) | 74 |
| 3.6.5. Uji Hipotesis Penelitian | 76 |
| 3.6.5.1. Uji Parsial (Uji Statistik t) | 76 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 77 |
| 4.1. Hasil Penelitian | 77 |
| 4.1.1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif | 77 |
| 4.1.1.1. Analisis Statistik Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak | 77 |
| 4.1.1.2. Analisis Statistik Dekriptif Literasi Pajak | 79 |
| 4.1.1.3. Analisis Statistik Deskriptif Pemeriksaan Pajak | 81 |
| 4.1.1.4. Analisis Stastistik Deskriptif Sanksi Pajak | 83 |
| 4.1.1.5. Analisis Statistik Deskriptif Kesadaran Wajib Pajak | 85 |
| 4.1.2. Uji Asumsi Klasik | 87 |
| 4.1.2.1. Uji Normalitas | 87 |
| 4.1.2.2. Uji Linearitas | 89 |
| 4.1.2.3. Uji Multikolinearitas | 90 |
| 4.1.2.4. Uji Heteroskesdasitas | 92 |
| 4.1.3. Analisis Jalur | 93 |
| 4.1.3.1. Model Persamaan Regresi 1 | 94 |
| 4.1.3.2. Model Persamaan Regresi 2 | 95 |
| 4.1.4. Uji Hipotesis | 98 |
| 4.1.4.1. Uji Pengaruh Parsial (Uji t) | 98 |

| | |
|---|------------|
| 4.1.4.2. Uji Sobel (<i>Sobel Test</i>) | 100 |
| 4.2. Pembahasan | 104 |
| 4.2.1. Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak | 104 |
| 4.2.2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak | 105 |
| 4.2.3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak..... | 106 |
| 4.2.4. Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak..... | 107 |
| 4.2.5. Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak..... | 108 |
| 4.2.6. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak | 109 |
| 4.2.7. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak | 111 |
| 4.2.8. Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel <i>Intervening</i> | 112 |
| 4.2.9. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel <i>Intervening</i> | 113 |
| 4.2.10. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel <i>Intervening</i> | 114 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 116 |
| 5.1. Kesimpulan | 116 |
| 5.2. Saran | 117 |
| DAFTAR PUSTAKA | 119 |
| LAMPIRAN..... | 124 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1.1 Tabel Informasi APBN | 1 |
| Tabel 1.2 Data Perkembangan UMKM Kota Semarang Tahun 2016-2018 | 4 |
| Tabel 1.3 Realisasi Penerimaan Pajak Wajib Pajak UKM di Kota Semarang..... | 5 |
| Tabel 2.1. Tabel Kajian Penelitian Terdahulu | 38 |
| Tabel 3.1 Hasil Uji Validitas..... | 63 |
| Tabel 3.2 Hasil Uji Reliabilitas..... | 66 |
| Tabel 3.3 Kategori Variabel Kepatuhan Wajib Pajak | 68 |
| Tabel 3.4 Kategori Variabel Literasi Pajak..... | 69 |
| Tabel 3.5 Kategori Variabel Pemeriksaan Pajak..... | 70 |
| Tabel 3.6 Kategori Variabel Sanksi Pajak | 70 |
| Tabel 3.7 Kategori Variabel Kesadaran Wajib Pajak | 71 |
| Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak..... | 77 |
| Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak | 78 |
| Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Indikator Kepatuhan Wajib Pajak | 79 |
| Tabel 4.4. Hasil Uji Statistik Deskriptif Literasi Pajak..... | 79 |
| Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Variabel Literasi Pajak | 80 |
| Tabel 4.6. Distribusi Frekuensi Indikator Literasi Pajak | 81 |
| Tabel 4.7 Hasil Uji Statistik Deskriptif Pemeriksaan Pajak | 81 |
| Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Pemeriksaan Pajak..... | 82 |
| Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Indikator Pemeriksaan Pajak | 83 |
| Tabel 4.10 Statistik Deskriptif Sanksi Pajak..... | 83 |
| Tabel 4.11 Distribusi Frekuensi Sanksi Pajak..... | 84 |
| Tabel 4.12 Distribusi Frekuensi Indikator Sanksi Pajak..... | 85 |
| Tabel 4.13 Hasil Uji Statistik Deskriptif Kesadaran Wajib Pajak | 85 |
| Tabel 4.14 Distribusi Frekuensi Kesadaran Wajib Pajak..... | 86 |
| Tabel 4.15 Distribusi Frekuensi Indikator Kesadaran Wajib Pajak..... | 87 |
| Tabel 4.16 Hasil Uji Normalitas dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Dependen..... | 88 |
| Tabel 4.17 Hasil Uji Normalitas dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Dependen..... | 88 |

| | |
|---|-----|
| Tabel 4.18 Hasil Uji Linearitas Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Dependen..... | 89 |
| Tabel 4.19 Hasil Uji Linearitas Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Dependen..... | 90 |
| Tabel 4.20 Hasil Uji Multikolinieritas dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Dependen..... | 91 |
| Tabel 4.21 Hasil Uji Multikolinearitas dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Dependen..... | 91 |
| Tabel 4.22 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Dependen..... | 92 |
| Tabel 4.23 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Dependen..... | 93 |
| Tabel 4.24 Hasil Analisis Regresi dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Dependen..... | 94 |
| Tabel 4.25 Hasil Analisis Regresi dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Dependen..... | 96 |
| Tabel 4.26 Simpulan Hasil Uji Hipotesis..... | 103 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|-----|
| Gambar 1.1 Kontribusi UMKM terhadap PDB | 3 |
| Gambar 1.2 WP Terdaftar, WP Terdaftar Wajib SPT dan Realisasi SPT di Kota Semarang Tahun 2014-2018 | 6 |
| Gambar 2.1 Kerangka Berpikir | 55 |
| Gambar 4.1. Analisis Jalur | 97 |
| Gambar 4.2. Hasil Perhitungan Uji Sobel Literasi Pajak | 100 |
| Gambar 4.3. Hasil Perhitungan Uji Sobel Pemeriksaan Pajak | 101 |
| Gambar 4.4 Hasil Perhitungan Uji Sobel Sanksi Pajak | 102 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|-----|
| Lampiran 1. Surat Izin Penelitian..... | 125 |
| Lampiran 2. Kisi-Kisi Uji Coba Instrumen Penelitian..... | 126 |
| Lampiran 3. Uji Coba Instrumen Penelitian | 129 |
| Lampiran 4. Tabulasi Angket Uji Coba | 141 |
| Lampiran 5. Hasil Uji Validitas | 146 |
| Lampiran 6. Hasil Uji Reliabilitas | 160 |
| Lampiran 7. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian | 161 |
| Lampiran 8. Instrumen Penelitian | 164 |
| Lampiran 9. Identitas Responden Penelitian..... | 176 |
| Lampiran 10. Tabulasi Angket Penelitian..... | 179 |
| Lampiran 11. Hasil Analisis Statistik Deskriptif | 189 |
| Lampiran 12. Hasil Analisis Deskriptif per Indikator..... | 190 |
| Lampiran 13. Uji Asumsi Klasik | 192 |
| Lampiran 14. Uji Sobel..... | 196 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang selalu melakukan pembangunan disegala sektor. Hal ini demi terciptanya masyarakat yang sejahtera contohnya memberikan pelayanan kepada masyarakat, penegakan hukum yang adil serta memelihara kemandirian dan ketertiban negara. Biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan ini tentunya tidak sedikit. Upaya untuk memenuhi hal tersebut salah satunya dengan penerimaan negara, berfungsi untuk memenuhi kepentingan negara guna menciptakan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dan Dewan Perwakilan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di dalamnya terdapat penerimaan negara, ada tiga pokok sumber penerimaan negara, yaitu dari sektor migas, sektor pajak dan sektor bukan pajak (Lubis, 2015).

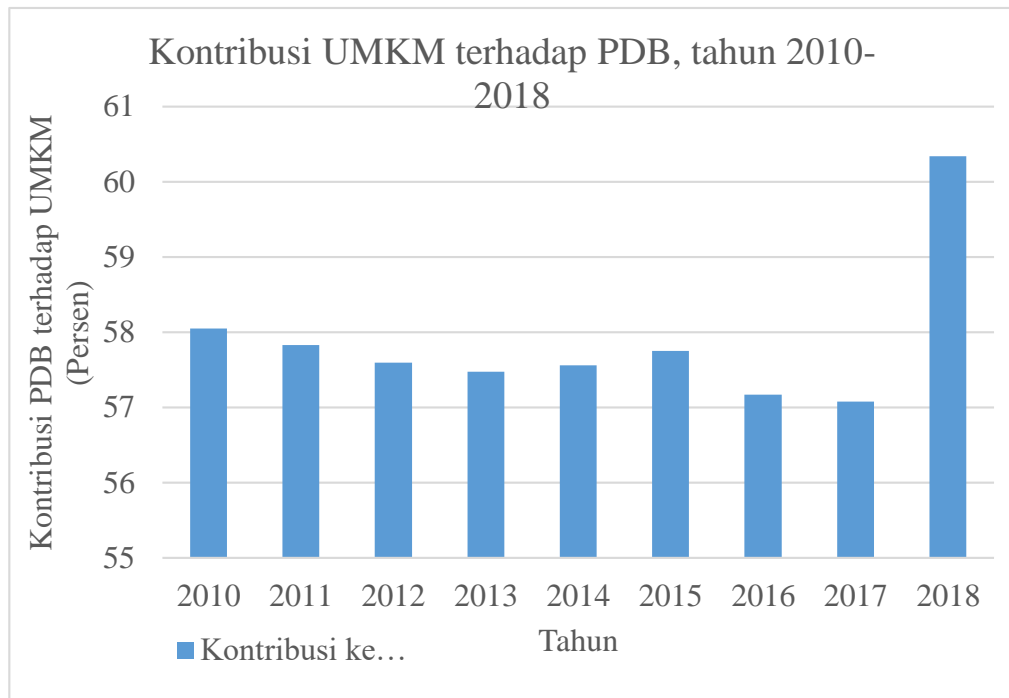
Tabel di bawah ini merupakan tabel terkait dengan sumber penerimaan negara dan dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut :

| Tahun | Sumber Penerimaan Negara | | |
|-------|--------------------------|-------|-------|
| | Perpajakan | PNBP | Hibah |
| 2013 | 74,9% | 24,6% | 0,5% |
| 2014 | 74,0% | 25,7% | 0,3% |
| 2015 | 82,3% | 17,0% | 0,8% |
| 2016 | 82,6% | 16,8% | 0,6% |
| 2017 | 84,8% | 15,0% | 0,2% |
| 2018 | 85,4% | 14,5% | 0,06% |

Sumber : Informasi APBN 2018 (www.kemenkeu.go.id)

Tabel 1.1 menggambarkan bahwa sumber penerimaan negara dengan persentase tertinggi didominasi oleh penerimaan pajak. Pada Tabel 1.1 di sisi sumber penerimaan negara kolom perpajakan menunjukkan persentase yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 penerimaan negara dari perpajakan sebesar 85,4% dan dari penerimaan bukan pajak senilai 14,5% sisanya dari hibah sejumlah 0,06%. Hal ini menggambarkan betapa besarnya sumber penerimaan negara dari perpajakan.

Penerimaan pajak dapat ditingkatkan melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak yang dapat dilakukan dengan cara mensosialisasikan penyederhanaan tarif pajak yang dilakukan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013. Selain itu, usaha memperbesar penerimaan pajak tidak dapat mengandalkan Dirjen Pajak juga petugas pajak saja, tetapi juga dibutuhkan peran aktif wajib pajak itu sendiri. Perubahan perpajakan dari Office Assesment menjadi Self Assessment, memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk mendaftar, menghitung dan membayar serta melaporkan kewajibannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) sendiri. Hal tersebut menjadikan kebenaran pembayaran wajib pajak bergantung pada kepatuhan dari wajib pajak. Kepatuhan pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, atau pun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Utami & Kardinal, 2013).

Gambar 1.1 Kontribusi UMKM terhadap PDB

Sumber : *Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah*

Kontribusi UMKM pada PDB dapat dilihat dari tabel 1.2, Ketua Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (Akumindo), realisasi kontribusi Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) tahun 2018 yakni, 60,34 persen. Kontribusi ini meningkat sebesar 3,26 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan akan diprediksi meningkat 5 persen di tahun 2019.

Pada tahun 2017, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mencatat kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 57,08 persen. Selama satu dekade, kontribusi UMKM terhadap PDB stagnan. (RA). Walaupun UMKM bukan merupakan usaha besar, namun peran dalam menggerakkan sektor perekonomian negara tidak diragukan. UMKM telah berperan besar dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM dapat meningkatkan penerimaan pajak yang dilakukan dengan cara mensosialisasikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan bagi pengusaha yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp 4,8 miliar per tahun. Peraturan pemerintah tersebut memberikan kemudahan bagi pengusaha yang memiliki omzet tertentu dalam pembayaran pajak.

Kota Semarang menjadi salah satu kota di Jawa tengah yang sebagian besar masyarakatnya berprofesi dalam usaha mikro kecil dan menengah. Setiap tahunnya tercatat jumlah UMKM di Kota Semarang terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data terbaru dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, jumlah UMKM di Kota Semarang tahun 2019 mencapai 16.210 UMKM. Sementara pertumbuhan pertahunnya disajikan di dalam Tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1.2 Data Perkembangan UMKM Kota Semarang Tahun 2016-2018

| DATA PERKEMBANGAN UMKM KOTA SEMARANG | | |
|---|---------------|---------------|
| TAHUN 2016-2018 | | |
| TAHUN | JUMLAH | OMSET |
| 2016 | 11.585 | 46,87 Miliar |
| 2017 | 11.607 | 726,00 Miliar |
| 2018 | 14.925 | 809,00 Miliar |

Sumber: Dinas Koperasi UMKM dan LPJ Walikota

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Kota Semarang setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah UMKM di Kota Semarang juga dibarengi dengan meningkatnya jumlah penyerapan tenaga kerja dan juga peningkatan omzet. Jumlah UMKM di Kota Semarang pada Tahun 2017 tercatat sebanyak 11.607 UMKM dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 126.688 orang dan omzet sebesar 726,00 Miliar. Jumlah ini terus bertambah hingga tahun 2018 yang mencapai 14.925 dengan omzet sebesar 809,00 Miliar. Sebagai salah satu kota yang memiliki jumlah pertumbuhan UMKM yang signifikan,

Pemerintah Kota Semarang bersama Dinas Koperasi dan UMKM terus berupaya untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan kualitas UMKM yang ada.

Meskipun pertumbuhan UMKM di Kota Semarang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, akan tetapi realisasi penerimaan pajak wajib pajak yang memiliki penghasilan bruto tertentu (UMKM) yang tercatat di KPP Pratama Kota Semarang tercatat mengalami penurunan pada Tahun 2018. Berikut disajikan Tabel 1.3 tentang realisasi penerimaan wajib pajak UKM di Kota Semarang.

Tabel 1.3 Realisasi Penerimaan Pajak Wajib Pajak UKM di Kota Semarang (Dalam Milyaran Rupiah)

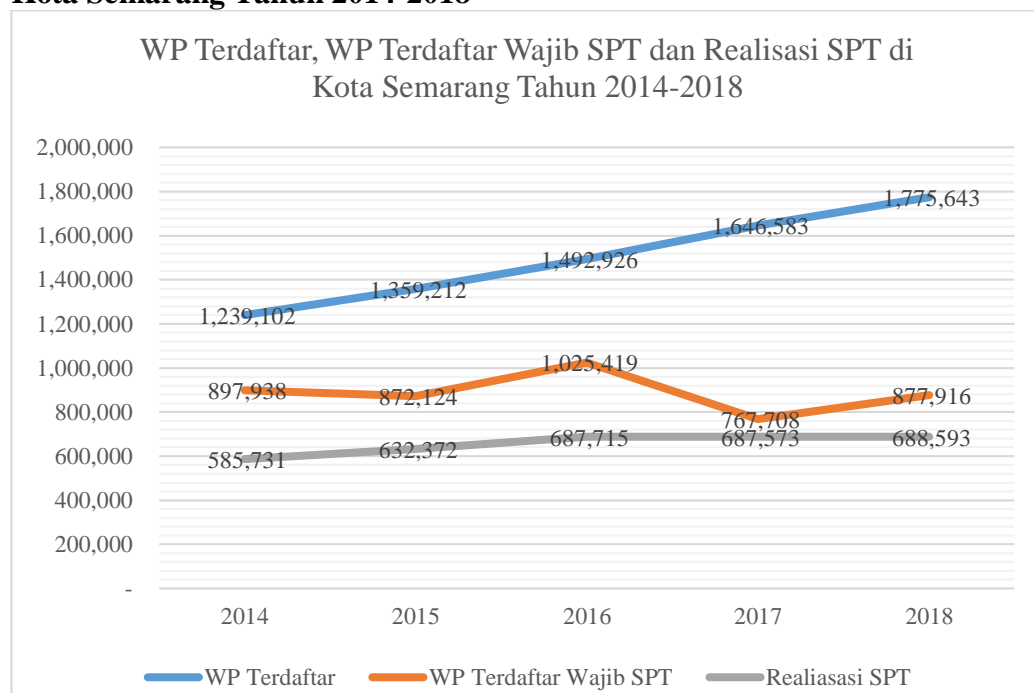
| KPP Pratama | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Semarang Barat | 17.594.312.012 | 20.876.493.184 | 26.482.356.951 | 24.878.327.940 |
| Semarang Timur | 14.475.148.640 | 17.314.849.912 | 23.050.360.208 | 22.163.193.218 |
| Semarang Selatan | 6.883.117.844 | 7.963.899.142 | 8.692.072.358 | 9.061.233.776 |
| Semarang Tengah Dua | 10.388.830.065 | 10.815.107.279 | 14.205.540.467 | 12.763.173.043 |
| Semarang Tengah Satu | 9.764.997.336 | 10.547.254.717 | 12.827.485.371 | 11.342.200.967 |
| Semarang Candisari | 14.686.559.901 | 16.538.299.845 | 21.463.788.690 | 20.031.894.354 |
| Semarang Gayamsari | 15.954.181.363 | 17.476.135.176 | 23.233.913.302 | 22.251.284.410 |
| Total | 89.747.147.161 | 101.532.039.255 | 129.955.517.347 | 122.491.307.708 |

Sumber: Kanwil DJP Jawa Tengah I

Penerimaan pajak UMKM seperti terlihat dalam tabel 1.3 pada tahun 2015 sampai tahun 2017 memang mengalami peningkatan, akan tetapi pertumbuhan penerimaan pajaknya masih mengalami fluktuasi. Pertumbuhan pajak UMKM di KPP Pratama Kota Semarang pada Tahun 2016 mencapai 11.784.892.094.00,

pertumbuhan pada Tahun 2017 naik sebesar 28.423.478.092.00, akan tetapi pada Tahun 2018 justru mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 7.464.209.639.00. Penurunan tersebut tidak sejalan dengan penurunan tarif pajak bagi UMKM dari 1% menjadi 0,5% yang diharapkan pemerintah dapat meningkatkan penerimaan pajak dari sektor tersebut. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang masih tergolong rendah.

Gambar 1.2 WP Terdaftar, WP Terdaftar Wajib SPT dan Realisasi SPT di Kota Semarang Tahun 2014-2018



Sumber: Direktorat Jenderal Pajak Kanwil I Jawa Tengah

Berdasarkan Gambar 1.2. Kota Semarang sebagai ibukota Jawa Tengah memiliki wajib pajak terdaftar yang selalu meningkat setiap tahunnya. Meskipun demikian, wajib pajak terdaftar setiap tahunnya yang cenderung meningkat tersebut, berbeda halnya dengan wajib pajak terdaftar wajib SPT yang cenderung mempunyai pertumbuhan yang fluktuatif dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Wajib

pajak terdaftar wajib SPT di Tahun 2016 menurun cukup drastis dari tahun 2015. Meskipun terjadi kenaikan yang signifikan dari Tahun 2017 ke Tahun 2017, akan tetapi jumlah tersebut masih belum sesuai dengan jumlah UMKM yang ada di Kota Semarang. Hal ini mencerminkan bahwa adanya ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak kota Semarang.

Menurut Fuadi & Yenni (2013) Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Teori atribusi relevan untuk menjelaskan kepatuhan wajib pajak karena teori ini menjelaskan bahwa perilaku patuh atau tidak patuhnya wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar wajib pajak. Kedua faktor tersebut sangat penting dalam perpajakan terutama untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Wajib pajak diharapkan mempunyai pribadi dan lingkungan yang baik karena akan berdampak pada kepatuhan dalam melakukan kewajibannya.

Perkembangan UMKM diharapkan kemandiriannya dan menjadi salah satu elemen penting yang mendukung industri-industri besar sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan. Upaya secara komprehensif sudah harus dilaksanakan agar sektor usaha kecil menengah mampu tumbuh di kancah perekonomian nasional, bahkan bersaing dalam bisnis global. Industri pemerintah yang terkait dengan sektor industri yang menjadi bidang kompetensinya semestinya menjadi motivator

penggerak usaha kecil menengah, termasuk bagaimana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) peduli terhadap pemajakan usaha kecil menengah ini. Pajak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan usaha kecil menengah secara terintegrasi. Keberpihakan dan kepedulian Direktorat Pajak terhadap usaha kecil menengah seperti pemberian insentif pajak yang sangat penting jika tidak memungkinkan *tax holiday* (Zahidah, 2010).

Menurut Devano dan Rahayu (2006) sebagian besar rakyat di seluruh negara tidak akan pernah menikmati kewajibannya membayar pajak sehingga memenuhinya tidak ada yang tanpa menggerutu, sedikit saja yang merasa benar-benar rela dan merasa ikut bertanggung jawab membiayai pemerintahan suatu negara. Tidak banyak yang merasa bangga sudah membayar pajak dan ikut berpartisipasi dalam pembiayaan negara. Membayar pajak bukanlah merupakan tindakan yang semudah dan sesederhana membayar untuk mendapatkan sesuatu bagi masyarakat, tetapi didalam pelaksanaannya penuh dengan hal yang emosional. Kondisi seperti ini yang menjadi faktor pendorong orang pribadi maupun badan usaha untuk melakukan tindakan *tax avoidance* (penghindaran pajak) yang sering kali menjurus pada praktik *tax evasion* (penggelapan pajak), yang merupakan salah satu tindakan kriminal dalam perpajakan. Pada umumnya setiap wajib pajak cenderung untuk meloloskan diri dari kewajibannya untuk menyetorkan pajak. Kecenderungan inilah yang disebut dengan ketidakpatuhan wajib pajak (Mutia, 2014).

Berdasarkan data dari penelitian terdahulu terdapat kesimpulan bahwa beberapa pemilik UMKM tersebut, ternyata banyak dari UMKM yang tidak

melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak padahal mereka telah terdaftar sebagai wajib pajak. Bahkan tidak sedikit pula yang tidak mengetahui tentang pajak UMKM ataupun tentang pentingnya membayar pajak bagi UMKM. Mereka menganggap pembayaran pajak bagi UMKM tidaklah penting dan dirasa pembayaran pajak bagi UMKM kecil seperti usahanya tidak perlu didaftarkan atau membayar pajak ke kantor pajak.

Penelitian mengenai determinan kepatuhan pajak telah banyak dilakukan sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya yang memposisikan kepatuhan pajak sebagai variabel dependen menunjukkan bahwa berbagai determinan tersebut dibagi ke dalam faktor internal dan eksternal. Hendri (2016) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan pajak dan sanksi pajak. Sedangkan faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak dalam penelitian Assa, Kalangi, & Pontoh (2018) pemeriksaan pajak dan sanksi pajak. Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan pajak menurut Saraswati (2018) adalah kesadaran pajak, sistem administrasi pajak modern dan sanksi pajak.

Penelitian ini mengkaji pengaruh literasi pajak, pemeriksaan pajak, sanksi pajak melalui kesadaran pajak karena Pemerintah telah menetapkan PP Nomor 46 Tahun 2013. Selain bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kepatuhan perpajakan, PP Nomor 46 Tahun 2013 juga dilengkapi dengan tata cara penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan atas penghasilan atas usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Hal ini memberikan kemudahan bagi

UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat dan terciptanya kesadaran membayar pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Yusro & Heny, 2014).

Faktor-faktor tersebut juga sesuai dengan teori Atribusi yang digunakan dalam penelitian ini. Teori atribusi juga relevan untuk menjelaskan kepatuhan wajib pajak karena teori ini menjelaskan bahwa perilaku patuh atau tidak patuhnya wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Untuk itulah penelitian ini lebih berfokus pada kombinasi faktor internal dan eksternal. Untuk itulah penelitian ini lebih berfokus pada kombinasi antara faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Faktor internal yang mempengaruhi kesadaran pajak dalam penelitian ini adalah literasi pajak dan kesadaran pajak. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan pajak dalam penelitian ini adalah pemeriksaan pajak dan sanksi pajak.

Salah satu faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah literasi pajak. Literasi adalah kemampuan seseorang dalam membaca informasi dan menindak lanjuti informasi suatu keputusan yang berguna dalam hidup (*kompasiana.com*). Literasi Pajak bisa diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam membaca dan memahami informasi serta menindak lanjuti informasi tersebut melalui suatu keputusan. Artinya, literasi pajak ini berhubungan dengan segala pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak dan bagaimana wajib pajak menindak lanjuti pengetahuan pajak yang dimilikinya.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari & Saryadi (2019) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2017) yang menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, hasil kedua penelitian tersebut tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan Wardani & Rumiya (2017) yang juga meneliti tentang kepatuhan pajak, pajak merupakan sektor pemasukan negara yang paling besar, maka sudah seharusnya literasi pajak yang merupakan salah satu faktor pendorong kepatuhan wajib pajak harus ditingkatkan.

Beberapa faktor seperti literasi pajak, pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan kesadaran pajak memiliki kemungkinan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai warga Negara. Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Rendahnya pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan membuat masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak serta memahami manfaat dari penerimaan pajak.

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi maupun suatu badan usaha. Berdasarkan Pasal 1 angka 25 pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dijelaskan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau

tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan prundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan Pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 tentang tata cara pemeriksaan memiliki dua tujuan yaitu pertama menguji kepatuhan wajib pajak (perorangan maupun badan) dalam rangka memberikan kepastian dan penjelasan mengenai perpajakan wajib pajak tersebut yang telah dilaporkan. Tujuan utama dari dilaksanakannya pemeriksaan pajak adalah untuk menumbuhkan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (*tax compliance*) yaitu dengan jalan menegakkan hukum (*law enforcement*) sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada KPP yang akan masuk dalam kas negara. Dengan demikian, pemeriksaan pajak merupakan pagar penjaga agar wajib pajak tetap mematuhi kewajibannya (Suhendra, 2010).

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyono, Rahmawati, Lubis, & Simanjuntak (2018) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak badan secara simultan. Hasil yang sama ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Palupi & Herianti (2017) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Namun hasil berbeda ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh De Joman, Sastri, & Datrini (2020) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, diperlukan juga adanya sanksi yang menjadi alat kontrol bagi wajib pajak. semua peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan termasuk masalah terkait sanksi pajak. Pelaksanaan sanksi pajak yang

tegas sangat diperlukan untuk mengontrol kepatuhan wajib pajak, wajib pajak cenderung akan patuh apabila wajib pajak berpikir bahwa sanksi pajak sangat merugikan. Sanksi yang dikenakan untuk setiap wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu sanksi administrasi, sanksi pidana atau keduanya (Valianta, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Cahyani & Noviani (2019) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil yang sama ditunjukkan dalam penelitian Setiawan (2017) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Sementara penelitian oleh Saraswati (2018) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri Wajib Pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Dengan kesadaran pajak yang tinggi, kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya dapat meningkat. Kepatuhan masyarakat terhadap pajak sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakatnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran pajak bagi warga negara Indonesia. Sehingga pentingnya suatu kesadaran untuk membayar pajak sangat diperlukan, mengingat tingginya kepentingan bagi Negara diwajibkan bagi Wajib Pajak untuk sadar dalam membayar pajak. Jadi, semakin tinggi suatu kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, maka rasa kesadaran akan tinggi dalam mematuhi membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Novia Tunggal & Sumaryanto (2019) dan Gusrefika (2018) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki

hubungan atau berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain yang menunjukkan adanya pengaruh positif antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu Ermawati & Afifi (2018), Shinta Dewi & Supadmi (2014), Saraswati (2018). Pengaruh positif disini artinya semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Asis (2017) menyatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Suyanto & Pratama (2018) yang menyatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil yang sama ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Ermawati & Afifi, (2018) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat menjadi motivasi untuk dilakukannya penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengaruh Literasi Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel *Intervening* (Studi Kasus Pada UMKM Kota Semarang)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang

merujuk pada penelitian sebelumnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan Pajak (Muniroh & Azizi, 2014; Mintje, 2016; Ermawati & Afifi, 2018)
2. Kualitas Pelayanan Pajak (Fuadi, Oetari & Mangoting, 2013; Purnaditya, & Rohman, 2015; Prajogo & Widuri, 2013)
3. Pemeriksaan Pajak (Tirayoh, Sabijono, & Mandagi, 2014; Dewi & Supadmi, 2014; Palupi & Herianti, 2017)
4. Sosialiasi Pajak (Setiawan, 2017; Wahyono et al., 2018; Wardani & Wati, 2018)
5. Sanksi Pajak (Imaniati & Isroah, 2016; Lestari & Pranaditya, 2018; Utami & Kardinal, 2013)
6. Tarif Pajak (Cahyani & Noviari, 2019; Cahyani & Noviari, 2019; Z.A & Mayowan, 2016)
7. Kesadaran Pajak (Saraswati, 2018; Gusrefika, 2018; Dewi & Sumaryanto 2019)
8. Religiusitas (Ermawati & Afifi, 2018; Wahyudi, 2016; Saragih, Dessy, & Hendrawan, 2020)
9. Sistem Administrasi Pajak (Tirayoh et al., 2014; Rasmini, 2017; Tirayoh et al., 2014)
10. *Tax Amnesty* (Sari & Nuswantara, 2017; Arisnawati, Khayati, & Zulfa, 2018; Nurkhin, Novanty, Muhsin, & Sumiadji, 2018)

1.3 Cakupan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka diperlukan sebuah pembatasan masalah sehingga penelitian yang dilakukan bisa lebih fokus dalam menggali masalah mengenai kepatuhan wajib pajak. selain itu cakupan masalah juga berfungsi untuk meminimalisir adanya penafsiran ganda terhadap penelitian yang dilakukan.

Penelitian ini dibatasi pada tiga faktor yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu literasi pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak. Selain itu ada kesadaran wajib pajak yang dijadikan sebagai variabel mediasi. Penelitian ini dilakukan pada UMKM di Kota Semarang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Seberapa besar Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
2. Seberapa besar Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
3. Seberapa besar Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
4. Seberapa besar Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
5. Seberapa besar Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak?
6. Seberapa besar Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak?
7. Seberapa besar Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak?
8. Seberapa besar Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel Intervening?

9. Seberapa besar Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel Intervening?
10. Seberapa besar Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel Intervening?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Literasi Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak.

8. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel Intervening.
9. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel Intervening.
10. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel Intervening.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis juga dapat menjadi referensi bagi dunia perpajakan mengenai pengaruh literasi pajak, sanksi pajak, pemeriksaan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.6.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah dalam perkembangan ilmu perpajakan dan sebagai wawasan dan pengetahuan baru ataupun tambahan ilmu pengetahuan dari minimal menjadi maksimal agar lebih paham khususnya dalam hal Literasi Pajak, Sanksi Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak.

1.6.2. Manfaat Praktis

Agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah seperti yang telah dijelaskan dalam latar belakang serta sebagai sarana berlatih dalam mengembangkan kemampuan pada bidang penelitian dan sarana evaluasi dibidang akademik untuk pengembangan dan peningkatan mutu

pendidikan. Disamping itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi yang bergerak dalam dunia perpajakan agar memperoleh pengetahuan dan masukan mengenai kepatuhan wajib pajak.

1.7 Orisinalitas

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen banyak diteliti. Hanya saja variabel independen yang digunakan berbeda-beda, Mintje (2016) melakukan penelitian dengan variabel independen sikap, kesadaran dan pengetahuan. Penelitian oleh Palupi & Herianti (2017) menggunakan variabel independen pemeriksaan pajak dan penagihan pajak. Selain itu, Cahyani & Noviani (2019) menggunakan variabel independen tarif pajak, pemahaman pajak dan sanksi pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) membahas mengenai sikap wajib pajak, pelayanan fiskus dan kesadaran wajib pajak sebagai variabel independen. Lain halnya penelitian Putri, Purbasari, Handayani, & Ulynnuha (2018) yang menggunakan kesadaran wajib pajak sebagai variabel dependen sedangkan pengetahuan wajib pajak, pemahaman system self assessment, tingkat tingkat penghasilan wajib pajak dan kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan sebagai variabel independen.

Dalam penelitian ini variabel kesadaran wajib pajak dijadikan sebagai variabel intervening yang memiliki pengaruh antara literasi pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana dalam penelitian-penelitian terdahulu variabel kesadaran wajib pajak sebagai variabel independen maupun variabel dependen. Penelitian ini mencakup lima variabel yaitu kepatuhan

wajib pajak sebagai variabel dependen, literasi pajak sebagai variabel independen, pemeriksaan pajak sebagai variabel independen, sanksi pajak sebagai variabel independen dan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening (mediasi). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, belum ada peneliti yang menggunakan kombinasi lima variabel tersebut.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1. Kajian Teori Utama (*Grand Theory*)

2.1.1. Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori atribusi dikembangkan oleh Fritz Heider (1958) mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya, teori ini berargumentasi bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (*internal forces*) yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti kemampuan atau usaha, dan kekuatan eksternal (*external forces*) yaitu faktor yang berasal dari luar, seperti kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan (Lubis, 2010).

Berdasarkan hal tersebut seseorang akan termotivasi untuk memahami lingkungannya dan sebab-sebab kejadian tertentu. Dalam riset keperilakuan, teori ini diterapkan dengan menggunakan variabel tempat pengendalian (*local of control*), variabel tersebut terdiri atas dua komponen yaitu tempat pengendalian internal (*internal locus of control*) dan tempat pengendalian eksternal (*eksternal locus of control*) (Lubis, 2010). Tempat pengendalian internal adalah perasaan yang dialami oleh seseorang bahwa dia mampu mempengaruhi kinerja serta perilakunya secara personal melalui kemampuan, keahlian, dan usahanya. Sementara, tempat pengendalian eksternal adalah perasaan yang dialami seseorang bahwa perilakunya dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar kendalinya (Lubis, 2010). Faktor-faktor yang menentukan apakah penyebab perilaku secara internal atau eksternal menurut teori atribusi dalam (Lubis, 2010) adalah:

1. Perbedaan (*distinctiveness*)

Perbedaan mengacu pada apakah seorang individu bertindak sama dalam berbagai keadaan. Apakah mahasiswa yang selalu underperforming (misalnya terlambat masuk kelas, masa bodoh dengan pertemuan tim, tidak segera menjawab e-mail) atau apakah perilaku mahasiswa dalam suatu situasi tidak seperti apa yang dia perlihatkan pada situasi lain? Jika perilaku adalah tidak biasa, pengamat mungkin menilai ini seperti disebabkan pertimbangan internal.

2. Konsensus (*concensus*)

Mempertimbangkan bagaimana perilaku seorang individu dibandingkan dengan individu lain pada situasi yang sama. Jika setiap orang yang diharapkan pada situasi yang sama menanggapi situasi tersebut dengan cara yang sama, kita dapat mengatakan perilaku tersebut menunjukkan konsensus. Namun, jika perilaku seorang individu berbeda dengan orang lain, anda dapat menyimpulkan penyebab perilaku individu adalah internal.

3. Konsistensi (*consistency*)

Akhirnya seorang pengamat melihat konsistensi pada suatu tindakan yang diulangi sepanjang waktu. Jika mahasiswa yang biasanya datang tepat waktu ini (dia tidak pernah terlambat) terlambat 10 menit, jalannya perkuliahan akan dirasakan berbeda olehnya dibandingkan ketika mahasiswa yang terlambat secara rutin (hampir setiap kelas) terlambat. Jika seorang mahasiswa selalu terlambat, maka keterlambatannya merupakan atribut internal.

Teori ini secara relevan menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang digunakan dalam model penelitian ini. Literasi pajak dan kesadaran pajak merupakan faktor internal, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak merupakan faktor eksternal. Kepatuhan wajib pajak dapat dikaitkan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi atau pemikiran seseorang untuk membuat penilaian mengenai individu lain dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal individu lain tersebut (Jatmiko, 2006).

2.2. Kajian Variabel Penelitian

2.2.1. Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.1.1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah tindakan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Nurmantu (2005:148) mendefinisikan kepatuhan pajak merupakan kondisi terpenuhinya semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakan. Wajib Pajak dikatakan patuh (*tax compliance*) apabila penghasilan yang dilaporkan sesuai dengan semestinya, Surat Pemberitahuan (SPT) dilaporkan dan besarnya pajak yang terutang dibayarkan tepat waktu (pajak, 2015).

Nurmantu (dalam Widodo, 2010:68) menjelaskan ada dua kepatuhan Wajib Pajak yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal berdasarkan ketentuan dalam undang –undang. Misalnya ketentuan tentang batas waktu pelaporan. Jadi, yang dipenuhi oleh Wajib Pajak hanyalah memenuhi

ketentuan penyampaian SPT sebelum batas waktu. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak secara formal dilihat dari aspek kesadaran Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, ketepatan waktu dalam membayar pajak, ketepatan waktu dalam menyampaikan SPT, dan pelaporan Wajib Pajak melakukan pembayaran tepat waktu. Definisi Kepatuhan Material yaitu semua ketentuan material perpajakan dapat dipenuhi secara hakekat (*substantive*), artinya berlandaskan dengan undang-undang perpajakan.

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, Wajib Pajak dimasukkan dalam kategori patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Surat Pemberitahuan (SPT) disampaikan dengan tepat waktu, yang dimana berlaku pada semua bentuk jenis pajak dengan kurun waktu 2 tahun terakhir.
2. Wajib pajak tidak pernah mendapatkan tindak pidana pajak dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.
3. Tunggakan pajak tidak pernah dimiliki oleh Wajib pajak untuk semua jenis pajak, melainkan dengan syarat mendapatkan izin penundaan atau pengangsuran pajak yang harus dibayar.
4. Laporan keuangan Wajib Pajak dalam waktu dua tahun terakhir telah diaudit oleh akuntan publik dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian atau laba rugi fiskal yang ada pada pendapatan dengan pengecualian tidak terpengaruh, dengan syarat penyajian rekonsiliasi laba rugi fiskal dan komersil harus dengan *long form report*.

5. Berdasarkan pasal 28 UU KUP Wajib pajak telah melakukan pembukuan dengan kurun waktu dua tahun terakhir pada masa pajak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/12, wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan di audit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

2.2.1.2. Indikator Kepatuhan Pajak

Febriyani dan Kusmuriyanto (2015) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kepatuhan pajak terdiri dari:

1. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara sukarela ke Kantor Pelayanan Pajak

2. Melakukan pembukuan atau pencatatan
3. Menghitung pajak terutang dengan benar dan melakukan pembayaran tepat waktu
4. Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai peraturan perundang-undangan dan melaporkan tepat waktu.

Sedangkan kepatuhan wajib pajak menurut Jatmiko (2006) dalam, pembayaran pajak memiliki indikator sebagai berikut :

1. Paham dan berusaha memahami Undang-Undang Perpajakan
2. Selalu mengisi formulir pajak dengan benar
3. Selalu menghitung pajak dengan jumlah benar
4. Selalu membayar pajak tepat pada waktunya

2.2.2. Literasi Pajak

2.2.2.1. Pengertian Literasi Pajak

Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan termasuk, tetapi tidak dibatasi pada deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip dan prosedur yang secara Probabilitas Bayesian adalah benar atau berguna (Meliono, 2007). Menurut Istanto (2011) pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan indrawi. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan indera atau akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya.

Pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan pelaporan pengisian pelaporan pajak (Supriyanti, 2009 dalam Wulandari, 2015). Berlakunya sistem pemungutan *self assesment* di Indonesia memberikan wewenang, kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban-kewajiban dan hak-hak di bidang perpajakan secara benar, lengkap dan tepat waktu (Miratussholihah, 2014 dalam Wulandari, 2015).

Sementara literasi berarti pengetahuan dan kemampuan individu dalam menulis, membaca dan mengolah informasi. Atau bisa juga diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam membaca informasi, memahami informasi dan menindak lanjuti informasi melalui suatu keputusan yang berguna dalam hidup (*kompasiana.com*). Sehingga, literasi bisa juga diartikan dengan pengetahuan atau kemampuan yang dimiliki seseorang dan bagaimana orang tersebut mengolah informasi yang dimilikinya.

Pengetahuan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya Meliono (2007) :

1. Pendidikan

Pendidikan adalah sebuah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dan juga usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, maka jelas dapat kita kerucutkan sebuah visi pendidikan yaitu mencerdaskan manusia.

2. Media

Media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Jadi, contoh dari media massa ini adalah televisi, radio, koran, dan majalah.

3. Keterpaparan Informasi

Pengertian informasi menurut Oxford English Dictionary, adalah “*that of which one is apprised or told: intelligence, news*”. Kamus lain menyatakan bahwa informasi adalah sebagai transfer pengetahuan. Selain itu istilah informasi juga memiliki arti yang lain seperti sebagaimana yang diartikan oleh Undang-Undang teknologi informasi yang mengartikan informasi sebagai suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memanipulasi, mengumumkan, menganalisa, dan menyebarkan informasi dengan tujuan tertentu. Sedangkan informasi sendiri mencakup data, teks, gambar, suara, kode, program komputer, dan data base. Adanya perbedaan definisi informasi dikarenakan pada hakekatnya informasi itu dapat diuraikan (*intangible*), sedangkan informasi itu dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, yang diperoleh dari data dan observasi terhadap dunia sekitar kita serta diteruskan melalui komunikasi.

2.2.2.2. Indikator Literasi Pajak

Indikator pengetahuan perpajakan menurut (Susmiatun, 2014) sebagai berikut:

1. Pengetahuan prosedur pendaftaran

Adalah pengetahuan seseorang mengenai mekanisme pendaftaran sebagai Wajib Pajak yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. Pengetahuan prosedur perhitungan

Adalah pengetahuan seseorang mengenai mekanisme perhitungan pajak, meliputi pengetahuan tarif pajak, dan perhitungan pajak terutang.

3. Pengetahuan prosedur pelaporan

Adalah pengetahuan seseorang mengenai cara pelaporan pajak terutang dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan.

4. Pengetahuan prosedur pembayaran

Adalah pengetahuan seseorang mengenai cara pembayaran pajak terutang yang dilakukan secara langsung dengan datang ke Tempat Pelayanan Pajak atau dengan aplikasi elektronik.

Sedangkan menurut Febriyani dan Kusmuriyanto (2015) terdapat beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu :

1. Wajib pajak mengetahui fungsi dari pajak yang dibayar.
2. Wajib pajak mengetahui bahwa membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara.
3. Wajib pajak mengetahui perubahan peraturan perpajakan yang berlaku.
4. Wajib pajak mengerti bagaimana cara menghitung pajak yang harus dibayar.
5. Wajib pajak membayar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Apabila wajib pajak tidak membayar maka akan dikenakan sanksi.

2.2.3. Pemeriksaan Pajak

2.2.3.1. Pengertian Pemeriksaan Pajak

Menurut Rahayu (2013:245) mengemukakan bahwa pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem *self assesment* yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada Undang-Undang perpajakan.

Pengertian pemeriksaan pajak menurut Soemarso (2007:60) pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak terhadap wajib pajak untuk mencari dan mengumpulkan data atau keterangan lainnya guna penetapan besarnya pajak yang terutang dan/atau tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kedua pengertian diatas dapat dikatakan bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan dalam hal pengawasan wajib pajak atas sistem *self assesment* yang dilakukan oleh kantor pajak untuk menentukan besarnya paja terutang atau tujuan lain dalam rangka pelaksanaan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menurut John Hutagaol yang dikutip Rahayu (2010:260), Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan pemeriksian pajak, antara lain adalah :

1. Teknologi Informasi (*Information technology*)

Kemajuan teknologi informasi telah lua dimanfaatkan oleh Wajib Pajak. Seiring dengan perkembangan tersebut maka pemeriksa harus juga memanfaatkan perangkat teknologi informasi denggan sebutan *Computer Assisted Audit Technique (CAAT)*.

2. Jumlah sumber daya manusia (*the number of human resources*)

Jumlah sumber daya manusia harus sebanding dengan beban kerja pemeriksaan. Jika jumlah tidak dapat memadai karena pengadaan sumberdaya manusia melalui kualifikasi dan prosedur recruitment terbatas, maka untuk mengatasi jumlah pemeriksa yang terbatas adalah dengan meningkatkan kualitas pemeriksa dan melengkapinya dengan teknologi informasi di dalam pelaksanaan pemeriksaan.

3. Kualitas sumber daya (*the quality of human resources*)

Kualitas sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang, dan pendidikan. Dan kualitas pemeriksa akan mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan. Solusi agar kesenjangan kualitas pemeriksa teratasi adalah dengan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan dan sistem mutasi yang terencana serta penerapan reward and punishment.

4. Sarana dan prasarana pemeriksaan (*audit facilities*)

Sarana prasarana pemeriksaan seperti computer Sangat diperlukan. Audit Command Language (ACL), contohnya Sangat membantu pemeriksa didalam mengolah data untuk tujuan analisa dan penghitungan pajak.

2.2.3.2. Indikator Pemeriksaan Pajak

Menurut Rahayu (2010:286) indikator dari pemeriksaan pajak adalah:

1. Kualitas Sumber Daya (Pemeriksa)
2. Integritas Pemeriksa
3. Rasio Pemeriksa dan Wajib Pajak

4. Teknologi Informasi
5. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen
6. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga
7. Memberitahukan hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak
8. Melakukan sidang penutup (*Closing Conference*)

2.2.4. Sanksi Pajak

2.2.4.1. Pengertian Sanksi Pajak

Teori yang mendukung pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah teori atribusi. Sanksi pajak merupakan faktor eksternal dari individu. Sanksi pajak ditetapkan bertujuan untuk memotivasi wajib pajak dalam mematuhi peraturan pajak yang ditetapkan. Wajib pajak bertindak patuh apabila mereka memiliki persepsi bahwa akan dikenai sanksi yang berat jika melakukan pelanggaran. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Imaniati & Isroah (2016) bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hasil itu didukung adanya penelitian sebelumnya oleh Mangoting (2013) dan Prawagis (2016) bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan positif pada kepatuhan pajak.

Jenis-jenis sanksi Perpajakan menurut Mardiasmo ada dua macam sanksi perpajakan, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Berikut merupakan penjelasan tentang kedua sanksi tersebut :

1. Sanksi Administrasi

Sanksi Administarasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya bunga dan kenaikan.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alatterakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus. Terdapat 3 macam sanksi pidana, yaitu denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara.

a. Denda Pidana

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam atau dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada pihak tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

b. Pidana kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian.

c. Pidana penjara

Seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman

pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak.

2.2.4.2. Indikator Sanksi Pajak

Adanya sanksi pajak bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya. Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel sanksi perpajakan diadopsi dari Suandy (2011:95) antara lain:

1. **Kedisiplinan Wajib Pajak (*Tax Discipline*)**

Kedisiplinan Wajib Pajak artinya wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dilakukan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2. **Kemauan Membayar Pajak Dari Wajib Pajak (*Tax Mindedness*)**

Tax Mindedness artinya Wajib Pajak dalam dirinya memiliki hasrat dan keinginan yang tinggi dalam membayar pajak terutangnya.

Berdasarkan uraian di atas, indikator yang dapat digunakan untuk variabel sanksi perpajakan adalah:

1. **Pengetahuan Wajib Pajak tentang adanya Sanksi Perpajakan**

Pengetahuan Wajib Pajak tentang Sanksi Pajak diperlukan, karena dengan mengetahui Sanksi Pajak, Wajib Pajak akan berusaha untuk menghindari sanksi tersebut, sehingga tidak melakukan kesalahan. Wajib Pajak kewajiban perpajakan.

2. **Sikap Wajib Pajak terhadap Sanksi Perpajakan**

Sikap disini menunjukkan apakah wajib pajak akan patuh atau tidak untuk memenuhi sanksi pajak jika melakukan kesalahan.

Penelitian yang dilakukan oleh Mutia (2014) sebagaimana diadopsi dalam penelitian Fauziah dan Kusmuriyanto (2016) menyebutkan bahwa indikator dalam variabel sanksi pajak adalah sebagai berikut:

1. Sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada wajib pajak yang melanggar.
3. Sanksi diberikan sesuai pelanggaran yang dilakukan, dan
4. Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2.2.5. Kesadaran Wajib Pajak

2.2.5.1. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Menurut Rahman (2010:49) “Kesadaran Wajib Pajak adalah keadaan ketika wajib pajak yang tanpa paksaan dari pihak manapun untuk membayar pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku”. Penelitian Manik Asri dan Wuri (2009) menyebutkan bahwa Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila:

1. Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.

5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Dari beberapa pengetahuan diatas penulis dapat menyimpulkan, Kesadaran Wajib Pajak adalah pemahaman yang mendalam pada seseorang atau badan yang terwujud dalam pemikiran, sikap, dan tingkah laku untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena memahami bahwa pajak sangat penting untuk pembiayaan nasional.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak antara lain adalah dari hasil penelitian Jatmiko (2006) didapatkan beberapa faktor internal yang dominan membentuk perilaku kesadaran Wajib Pajak untuk patuh yaitu:

1. Persepsi Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya akan semakin meningkat jika dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Torgler (2008) menyatakan bahwa kesadaran pembayaran pajak untuk patuh membayar pajak terkait dengan persepsi yang meliputi paradigma akan fungsi pajak dalam penyediaan barang publik, juga keadilan (*fairness*) dan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

2. Tingkat Pengetahuan Dalam Kesadaran Membayar Pajak

Tingkat pengetahuan dan pemahaman pembayar pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku berpengaruh pada perilaku kesadaran pembayar pajak. Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakannya.

3. Kondisi Keuangan Wajib Pajak

Kondisi keuangan merupakan faktor ekonomi yang berpengaruh pada kepatuhan pajak. Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas (*profitability*) dan arus (*cash flow*). Profitabilitas perusahaan (*firm profitability*) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran untuk mematuhi peraturan perpajakan. Perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang tinggi cenderung melaporkan pajaknya dengan jujur dari pada perusahaan yang mempunyai profitabilitas rendah. Perusahaan dengan profitabilitas rendah pada umumnya mengalami kesulitan keuangan (*financial difficulty*) dan cenderung melakukan ketidakpatuhan pajak.

2.2.5.2. Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Indikator Kesadaran Wajib Pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah prasyarat yang harus dipenuhi dalam *self assessment system* Suandy (2011:95) antara lain:

1. Kedisiplinan Wajib Pajak (*Tax Dicipline*)

Kedisiplinan Wajib Pajak artinya wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dilakukan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2. Kemauan Membayar Pajak Dari Wajib Pajak (*Tax Mindedness*)

Tax Mindedness artinya Wajib Pajak dalam dirinya memiliki hasrat dan keinginan yang tinggi dalam membayar pajak terutang.

Selain itu, Indikator kesadaran pajak yang digunakan dalam penelitian ini yang disampaikan Gusrefika (2018) yakni :

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.
2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.
3. Kesadaran bahwa wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan dengan sukarela dan benar.

2.3. Kajian Penelitian Terdahulu

Penulis merujuk pada beberapa penelitian terdahulu dalam melakukan penelitian, yaitu :

Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu

| No. | Peneliti (Tahun) | Judul | Hasil Penelitian |
|-----|---|---|--|
| 1. | Pasca Rizki Dwi Ananda, Srikandi Kumadji, Achmad Husaini (2015) | Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu) | Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dan pemahaman berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. |
| 2. | Arabella Oentari Fuadi dan Yenni Mangoting (2013) | Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM | Kualitas pelayanan petugas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM dan biaya kepatuhan pajak berpengaruh signifikan |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | | | kepatuhan Wajib Pajak UMKM. |
| 3. | Septian Fahmi Fahluzy dan Linda Agustina (2014) | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak UMKM di Kabupaten Kendal. | Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM di Kabupaten Kendal, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM di Kabupaten Kendal dan tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM di Kabupaten Kendal. |
| 4. | Zulaicha Efrita Sarasawati, Endang Masitoh, Riana Rachmawati Dewi (2018) | Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM di Surakarta | Kesadaran pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sistem administrasi pajak modern tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. |
| 5. | Dewi Kusuma Wardani dan Moh, Rifqi Asis (2017) | Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. | a. Pengetahuan Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. b. Kesadaran Wajib Pajak dan Program |

| | | | |
|----|---|--|---|
| | | | SAMSAT Corner berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. c. Pengetahuan Wajib Pajak, kesadaran Wajib Pajak, dan program SAMSAT Corner berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. |
| 6. | Luh Putu Gita Cahyani dan Naniek Noviari (2019) | Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM | Tarif pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM. |
| 7. | Suryanto dan Yhoga Heru Pratama (2018) | Kepatuhan wajib pajak orang pribadi: Studi aspek pengetahuan, kesadaran, kualitas layanan dan kebijakan <i>sunset policy</i> . | a. Kesadaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan b. Pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus dan kebijakan <i>sunset policy</i> tidak berpengaruh terhadap kepatuhan. |
| 8. | Intan Karunia Sari dan Saryadi (2018) | Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening (Studi pada Pelaku UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur) | a. Sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak, b. Sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| | | | <p>c. Kesadaran wajib pajak tidak signifikan dalam memediasi antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>d. Kesadaran wajib pajak tidak signifikan dalam memediasi antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> |
| 9. | Kadek Juniati Putri dan Putu Ery Setiawan (2017) | Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. | Kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. |
| 10. | Nanik Ermawati dan Zaenal Afifi (2018) | Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus) | <p>a. Religiusitas dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>b. Religiusitas berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak.</p> <p>c. Kesadaran wajib pajak mampu memediasi sebagian pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> |
| 11. | Hetty Muniroh dan M. Zakky Wahyuddin Azizi (2014) | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Final PP Nomor 46 Tahun 2013 pada UMKM di Kabupaten Rembang | Berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan variabel pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak final PP Nomor 46 Tahun 2013. |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| | | | Sedangkan variabel persepsi keadilan pajak dan kebutuhan permodalan dan kredit tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak. |
| 12. | Dewi Kusuma Wardani dan Rumiyaun (2017) | Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 2. Kesadaran wajib pajak dan sistem samsat drive thru berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 3. Pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem samsat drive thru berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor |
| 13. | Fransiskus Eddy Wahyono, Sari Rahmawati, Firmansyah Lubis, dan Timbul Hamonangan (2018) | Pengaruh pemeriksaan pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan | Berdasarkan hasil pengolahan data, terdapat pengaruh antara pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan secara simultan, dimana pengaruh simultan pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan |

| | | | |
|-----|---|---|---|
| | | | sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan adalah sebesar 75.4%. |
| 14. | Putu Nadiani Putri Utama dan Putu Ery Setiawan (2019) | Pengaruh Dimensi Keadilan , Sosialisasi Pajak , Sanksi Pajak , Penghasilan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP UMKM | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi keadilan, sosialisasi pajak, sanksi pajak, penghasilan wajib pajak, dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM |
| 15. | Novia Tunggal Dewi dan Sumaryanto (2019) | Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak | Kesadaran wajib pajak dan pemahaman wajib pajak, pelayanan fiskus, tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. |
| 16. | Yani Febriyani dan Kusmuriyanto (2015) | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap Wajib Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan tentang perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel-variabel lain selain variabel sikap wajib pajak, pengetahuan tentang perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus. |
| 17. | Raihana Mohdali & Jeff Pope (2014) | The influence of religiosity on taxpayers' compliance attitudes Empirical evidence from a mixed-methods study in Malaysia | 1. Dampak religiusitas pada kepatuhan pajak sukarela dalam survei |

| | | | |
|-----|---|--|---|
| | | | <p>dari penelitian ini tampaknya minimal meskipun signifikan.</p> <p>2. Kewarganegaraan Wajib Pajak yang kuat dan tinggi tanggung jawab untuk berkontribusi kepada orang lain ditekankan sebagai alasan utama untuk orang yang membayar pajak.</p> |
| 18. | Fani Nur Arisnawati, Sri Khayati, & Novia Zulfa, (2018) | <p>Influence Tax Amnesty Payment of Tax Compliance SMEs Batik Moslem In District Pekalongan (A case study of SMEs Batik Moslem in district Pekalongan 2016-2017)</p> | <p>1) Pengampunan pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak.</p> <p>2) Pengampunan pajak berpengaruh positif terhadap pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang perpajakan.</p> <p>3) Pengampunan pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi tentang efektivitas sitem perpajakan.</p> |
| 19. | Ahmad Nurkhin, Ine Novanty, Muhsin, & Sumiadji (2018) | <p>The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance</p> | <p>1. Pemahaman perpajakan terbukti berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>2. Kesadaran wajib pajak terbukti berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> |

| | | | |
|-----|---|---|--|
| | | | 3. Persepsi amnesti pajak terbukti berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. |
| 20. | Ietje Nazaruddin, (2019) | The Role of Religiosity and Patriotism in Improving Taxpayer Compliance | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat religiusitas berpengaruh positif terhadap patriotisme dan kepatuhan wajib pajak. 2. Patriotisme yang tinggi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 3. Hasilnya juga memberikan bukti empiris bahwa ada pengaruh tidak langsung religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak melalui mediasi patriotisme. |
| 21. | Ramadhani Indah Sari & Dian Anita Nuswantara (2017) | The Influence of Tax Amnesty Benefit Perception to Taxpayer Compliance | <ol style="list-style-type: none"> 1. Persepsi Manfaat Pengampunan Pajak berpengaruh Terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Para wajib pajak telah diyakinkan akan ada penghapusan pajak yang harus dibayar karena mereka merasa menjadi lebih mudah dan mendapatkan keringanan pajak untuk menjadi lebih patuh. 3. Kualitas Layanan belum mampu memoderasi hubungan antara Persepsi Manfaat Pengampunan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak. |

2.4. Kerangka Berfikir

2.4.1. Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan teori atribusi adalah penyebab perilaku seseorang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Penentuan eksternal maupun internal ditentukan oleh tiga hal berikut yaitu : kekhasan, konsensus dan konsistensi. Pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor internal penyebab seseorang bersikap patuh dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan pajak memberi pengaruh yang positif untuk kepatuhan wajib pajak. Salah satu penyebab berpengaruhnya pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah adanya sumber informasi perpajakan yang didapat oleh setiap wajib pajak, misalnya informasi diperoleh dari petugas pajak, atau majalah pajak (Gardina dan Haryanto, 2006 dalam Permatasari, 2015). Ketika wajib pajak mempunyai pengetahuan perpajakan maka dapat diartikan bahwa wajib pajak memiliki informasi-informasi yang berkaitan dengan perpajakan. Informasi tersebut dapat digunakan wajib pajak dalam proses pembayaran pajak dan berbagai macam masalah perpajakan.

Hasil penelitian terdahulu oleh Muniroh & Azizi (2014) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian oleh Mintje (2016) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara penelitian oleh Wardani & Rumiya (2017) yang juga meneliti mengenai kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa pengetahuan pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Literasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.4.2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan teori atribusi adalah penyebab perilaku seseorang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Penentuan eksternal maupun internal ditentukan oleh tiga hal berikut: kekhasan, konsesnsus dan konsistensi. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu faktor eksternal penyebab seseorang bersikap patuh. Menurut Pardiati (2008:11) pengertian pemeriksaan pajak adalah menekankan pada pemeriksaan bukti yang berupa buku-buku, dokumen dan catatan yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan pajaknya apabila adanya pemeriksaan pajak.

Hal ini sejalan dengan penelitian Wahyono et al. (2018) oleh menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian oleh Assa et al. (2018) juga menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil berbeda ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh De Joman et al. (2020) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.4.3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan teori atribusi, sanksi pajak termasuk dalam penyebab eksternal karena adanya pengaruh persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi dianggap perlu agar peraturan dan perundang-undangan tidak dilanggar (Arum, 2012). Jika kewajiban pajak tidak mematuhi maupun menaati, maka akan ada konsekuensi hukum yang terjadi kepada wajib pajak. Konsekuensi hukum adalah penerapan sanksi perpajakan. Penerapan tersebut berguna untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan patuh membayar bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Oleh karena itu sanksi pajak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian terdahulu oleh Utama & Setiawan (2019) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Z.A & Mayowan (2016) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin tinggi sanksi perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak akan tercapai. Sementara penelitian oleh Ermawati & Afifi (2018) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.4.4. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Konsep didalam teori atribusi adalah penyebab perilaku seseorang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Penentuan eksternal maupun internal ditentukan oleh tiga hal berikut yaitu: kekhasan, konsensus dan konsistensi. Kesadaran pajak merupakan salah satu faktor internal penyebab seseorang bersikap patuh. Kesadaran pajak adalah perilaku yang melekat pada diri wajib pajak, membutuhkan waktu yang lama dalam proses pembentukan kesadaran pajak. Menurut Mutia (2014) kesadaran Pajak akan perpajakan adalah dimana rasa yang timbul dalam diri Wajib Pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Kesadaran Wajib Pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas (Susilawati dan Budiarti, 2013). Wajib pajak yang memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban membayar pajak maka akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Wardani dan Rumiyatun, 2017).

Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Saraswati (2018) menyatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian oleh Dewi (2019) juga menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.4.5. Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Konsep di dalam teori atribusi adalah penyebab perilaku seseorang disebabkan faktor internal maupun eksternal. Penentuan penyebab kesadaran perpajakan dapat berupa faktor internal maupun eksternal yang ditentukan oleh tiga hal berikut yaitu: kekhasan, konsesnsus dan konsistens. Pengetahuan perpajakan merupakan salah satu fator internal penyebab seseorang bersikap sadar pajak. Pengetahuan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan. Sebagian wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, media cetak maupun media elektronik, seminar dan pelatihan pajak. Pengetahuan perpajakan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sehingga diharapkan wajib pajak dengan penuh kesadaran membayarkan pajaknya.

Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Sari & Saryadi (2019) menyatakan bahwa pengetahuan pajak dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak. Selain itu, penelitian oleh Kurniati, Djudi, & Saifi (2016) juga menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas maka diduga pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak.

H5 : Pengetahuan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak

2.4.6. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Konsep di dalam teori atribusi adalah penyebab perilaku seseorang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Penentuan penyebab kepatuhan wajib pajak dapat berupa faktor internal maupun eksternal ditentukan oleh tiga hal

berikut yaitu : kekhasan, konsensus, konsistensi. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu faktor eksternal penyebab kesadaran pajak. Definisi pemeriksaan pajak menurut Pasal 1 angka (25) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah sebagai berikut: “Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Mardiasmo (2016:56) menyatakan, “pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Dimana apabila wajib pajak sebelumnya tidak memiliki niat untuk membayar pajak, maka akan berniat untuk membayar pajak apabila terdapat pemeriksaan pajak. Sehingga, kesadaran wajib pajak akan meningkat. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Arsyad (2013) menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif pemeriksaan pajak terhadap kesadaran wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H6 : Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak

2.4.7. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Konsep di dalam teori atribusi adalah penyebab perilaku seseorang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Penentuan penyebab kepatuhan wajib pajak dapat berupa faktor eksternal maupun internal ditentukan oleh tiga hal berikut yaitu: kekhasan, konsensus, konsistensi. Sanksi pajak merupakan salah satu faktor eksternal penyebab seseorang kesadaran pajak. Sanksi pajak merupakan konsekuensi yang harus diterima wajib pajak ketika melanggar peraturan perpajakan atau tidak menjalankan kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan adalah segala hukuman yang diterima oleh wajib pajak jika wajib pajak melanggar peraturan perpajakan (Jayate, 2017). Sedangkan menurut Basri, dkk (2014) sanksi perpajakan adalah sanksi yang diberikan oleh pemerintah bagi wajib pajak yang tidak patuh terhadap peraturan perpajakan. Pajak yang sifatnya memaksa menerapkan adanya sanksi agar tidak ada yang melanggar. Dimana seseorang yang sebelumnya tidak berniat membayar pajak, maka akan membayarkan pajaknya karena adanya sanksi yang berat. Kemudian sadar bahwa membayar pajak tepat waktu lebih baik agar tidak mendapat sanksi dan tidak kesusahan dikemudian hari. Jadi, semakin takut seseorang akan sanksi pajak, maka kesadaran pajak orang tersebut akan meningkat.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Lestari et al. (2018) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas maka diduga sanksi pajak berpengaruh terhadap kesadaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H7 : Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak

2.4.8. Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening

Konsep didalam teori atribusi adalah penyebab perilaku seseorang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Penentuan penyebab kepatuhan wajib pajak dapat berupa faktor internal maupun eksternal ditentukan oleh tiga hal berikut yaitu : kekhasan, konsesnsus dan konsistensi. Pengetahuan perpajakan maupun kesadaran perpajakan merupakan penyebab internal kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang telah memiliki kesadaran pajak maka akan meningkatkan rasa patuhnya untuk membayar pajak. Wajib pajak pasti sudah memiliki informasi terkait tentang pentingnya membayar pajak. Dengan adanya kesadaran pajak pada wajib pajak maka akan meningkatkan pengetahuan pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Sari & Saryadi (2019) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak signifikan dalam memediasi antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H8 : Pengetahuan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak.

2.4.9. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening

Konsep didalam teori atribusi adalah penyebab perilaku seseorang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Penentuan penyebab kepatuhan wajib pajak dapat berupa faktor internal maupun eksternal ditentukan oleh tiga hal

berikut yaitu : kekhasan, konsesnsus dan konsistensi. Pemeriksaan pajak merupakan penyebab eksternal kepatuhan wajib pajak dan kesadaran pajak merupakan penyebab internal kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang sudah sadar pasti akan patuh membayar pajak. Wajib pajak yang sudah mengerti akan adanya pemeriksaan pajak pasti akan lebih sadar untuk membayar pajak agar tidak mendapatkan dampak yang lebih besar karena tidak membayar pajak. Pemeriksaan pajak akan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Sehingga, kepatuhan pajak juga akan meningkat.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Anita Majid (2015) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran pajak sebagai variabel intervening menunjukkan hasil yang signifikan positif. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H9 : Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel Intervening

2.4.10. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening.

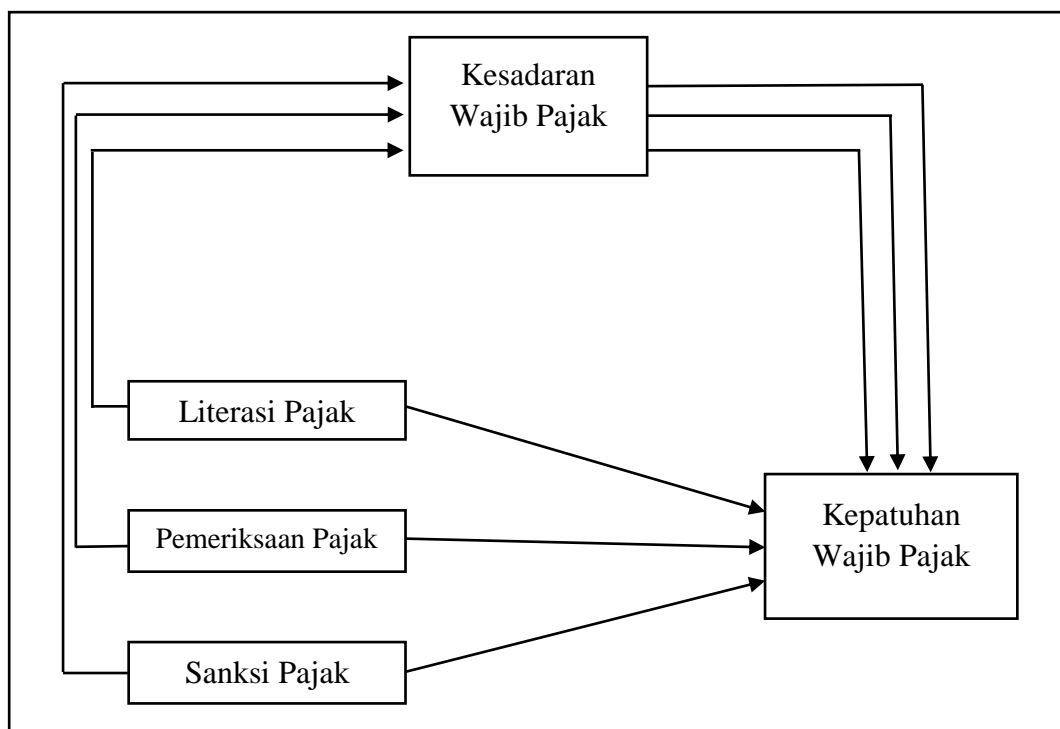
Konsep teori atribusi adalah penyebab perilaku seseorang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Penentuan penyebab kepatuhan wajib pajak dapat berupa faktor internal maupun eksternal ditentukan oleh tiga hal berikut : kekhasan, konsensus dan konsistensi. Sanksi pajak merupakan penyebab eksternal dan kesadaran pajak merupakan penyebab internal kepatuhan pajak. Wajib pajak yang sudah mengerti akan adanya sanksi pajak maka tingkat kesadarannya lebih

meningkat. Wajib pajak akan sadar apabila wajib pajak tidak membayar pajak maupun terlambat melakukan pembayaran pajak, maka sanksi yang akan didapat juga semakin tinggi dan menyebabkan kesulitan dikemudian hari. Sehingga tingkat kepatuhan pajak juga semakin meningkat.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Lestari et al. (2018) menyatakan bahwa pengaruh mediasi kesadaran membayar pajak antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memberikan pengaruh secara tidak langsung. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H10 : Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel Intervening

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



2.5. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pada kajian, penelitian sebelumnya dan penjelasan di atas, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Literasi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
2. Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
3. Sanksi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
4. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
5. Literasi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak
6. Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak
7. Sanksi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak
8. Literasi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel Intervening.
9. Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel Intervening
10. Sanksi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel Intervening

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian studi deskriptif, untuk mendeskripsikan pengaruh variabel pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak dan kesadaran pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak secara lebih mendalam yang dihubungkan dengan teori atribusi. Berdasarkan aspek output, penelitian ini tergolong penelitian dasar, yakni penelitian yang diorientasikan untuk menghasilkan atau mengembangkan pengetahuan ilmiah atau ilmu (*sains*), baik dalam skala teori maupun dalam skala dalil atau hukum-hukum ilmiah (*law of scientific*) (Wahyudin,2015:10)

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penyebaran angket penelitian kepada para responden yang terdiri dari pelaku UMKM di Kota Semarang dan dokumen-dokumen yang digunakan sebagai pelengkap data primer. Sementara itu, beberapa artikel ilmiah dan buku menjadi rujukan bagi peneliti untuk memperkaya pemahaman dan penyusunan kerangka penelitian. Desain penelitian menggunakan penelitian *ex post facto* yang merupakan penelitian yang mengambil data atau mengali data dari peristiwa yang sudah terjadi (Wahyudin,2015:19).

3.2. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM) yang ada di kota Semarang. Sampel dari penelitian ini adalah para pemilik atau manajer UMKM di Kota Semarang. Pemilihan sampel pemilik

atau manajer UMKM ini dikarenakan jabatan tersebut yang memiliki kekuasaan dalam mengelola keuangan perusahaan dan bertanggung jawab secara langsung dalam hal penyusunan laporan keuangan serta pembayaran pajak usahanya.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling insidental, yaitu teknik pengambilan sampel dimana penyebaran kuesioner dalam hal ini dilakukan pada responden yang mau atau bersedia untuk dimintai data oleh peneliti. Elemen populasi yang dipilih berdasarkan UMKM yang usahanya telah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) atau telah terdaftar di Kantor Pajak Pratama di Kota Semarang. Penentuan ukuran sampel pada penelitian ini berpedoman Pada Roscoe (Roscoe 1982:253 dalam Sugiyono, 2016:91) yaitu apabila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate (korelasi atau regresi berganda), maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Penentuan jumlah sampel penelitian dengan menggunakan Rumus Roscoe sebagai berikut (Sugiyono, 2016):

$$n = 10 \times \text{jumlah variabel}$$

Dengan rumus tersebut dapat ditentukan jumlah sampel dalam penelitian sebagai berikut:

$$\begin{aligned} n &= 10 \times 5 \\ &= 50 \end{aligned}$$

Jadi sample minimal dalam penelitian ini adalah sebanyak 50 UMKM, sedangkan dalam penelitian ini jumlah sample yang digunakan sebanyak 60 UMKM sehingga sudah lebih dari batas minimal sampel yang dibutuhkan.

3.3. Variabel Penelitian

3.3.1. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah tindakan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. (Nurmantu, 2005:148) mendefinisikan kepatuhan pajak merupakan kondisi terpenuhinya semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakan. Wajib Pajak dikatakan patuh (tax compliance) apabila penghasilan yang laporkan sesuai dengan semestinya, Surat Pemberitahuan (SPT) dilaporkan dan besarnya pajak yang terutang dibayarkan tepat waktu (pajak, 2015).

Dalam penelitian (Febriyani dan Kusmuriyanto, 2015) menyebutkan bahwa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak terdiri dari:

1. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara sukarela ke Kantor Pelayanan Pajak
2. Melakukan pembukuan atau pencatatan
3. Menghitung pajak terutang dengan benar dan melakukan pembayaran tepat waktu
4. Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai peraturan perundang-undangan dan melaporkan tepat waktu.

3.3.2 Literasi Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah hasil proses belajar wajib pajak mengenai peraturan perundang-undangan agar mengetahui hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Indikator untuk mengukur pengetahuan perpajakan berdasarkan hasil

penelitian (Febriyani dan Kusmuriyanto, 2015) indikator pengetahuan tentang perpajakan adalah sebagai berikut :

1. Wajib pajak mengetahui fungsi dari pajak yang dibayar.
2. Wajib pajak mengetahui bahwa membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara.
3. Wajib pajak mengetahui perubahan peraturan perpajakan yang berlaku
4. Wajib pajak mengerti bagaimana cara menghitung pajak yang harus dibayar.
5. Wajib pajak membayar sesuai peraturan yang berlaku.
6. Apabila wajib pajak tidak membayar maka akan mendapat sanksi.

3.3.3 Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun serta mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif serta profesional berdasarkan standar pemeriksaan. Menurut (S. K. Rahayu, 2010:286) indikator dari pemeriksaan pajak adalah:

1. Kualitas Sumber Daya (Pemeriksa)
2. Integritas Pemeriksa
3. Rasio Pemeriksa dan Wajib Pajak
4. Teknologi Informasi
5. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen
6. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga
7. Memberitahukan hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak
8. Melakukan sidang penutup (Closing Conference)

3.3.4 Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, dengan cara membayarkan sejumlah uang. Dengan diberlakukannya sanksi pajak diharapkan wajib pajak akan lebih patuh akan ketentuan peraturan perpajakan, sehingga dapat terwujud wajib pajak yang patuh dan taat sesuai dengan peraturan perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Mutia, 2014) sebagaimana diadopsi dalam penelitian (Fauziah dan Kusmuriyanto, 2016) menyebutkan bahwa indikator dalam variabel sanksi pajak adalah sebagai berikut:

1. Sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada wajib pajak yang melanggar.
3. Sanksi diberikan sesuai pelanggaran yang dilakukan, dan
4. Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

3.3.5 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah sebuah keinginan dalam hati seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tulus dan ikhlas tanpa paksaan dari siapapun. Indikator kesadaran pajak yang digunakan dalam penelitian ini yang disampaikan (Gusrefika, 2018) yakni :

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.

2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.
3. Kesadaran bahwa wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan dengan sukarela dan benar

3.4. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan untuk kepentingan penelitian ini yaitu Sumber Data Primer. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2009:103). Metode data primer yang digunakan yaitu metode survey dengan teknik kuesioner (questionnaires) dan wawancara (interview). Kuesioner didistribusikan secara personal, sehingga peneliti dapat berhubungan langsung dengan responden dan memberikan penjelasan seperlunya dan kuesioner dapat langsung dikumpulkan setelah selesai dijawab oleh responden.

Skala yang digunakan dalam tingkat pengukuran adalah skala interval atau sering disebut skala LIKERT yaitu skala yang berisi 5 tingkat prefensi jawaban. Skala likert dikatakan interval karena pernyataan sangat setuju mempunyai tingkat atau prefensi yang “lebih tinggi” dari setuju dan setuju “lebih tinggi” dari ragu-ragu (Ghozali, 2011:47). Dalam penelitian ini, menggunakan SPSS 19.00 untuk memperoleh hasil perhitungan dari berbagai metode yang digunakan dan dapat menganalisis perumusan masalah penelitian. Masing-masing jawaban dari 5 alternatif jawaban yang telah tersedia diberi bobot nilai (skor) sebagai berikut :

1. Skor 5 jika jawaban responden Sangat Setuju (SS)
2. Skor 4 jika jawaban responden Setuju (S)

3. Skor 3 jika jawaban responden Kurang Setuju (KS)
4. Skor 2 jika jawaban responden Tidak Setuju (TS)
5. Skor 1 jika jawaban responden Sangat Tidak Setuju (STS)

Sumber: Ghozali, 2010:47

3.5. Uji Instrumen

3.5.1. Uji Validitas Instrumen

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Satu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011:52). Pengujian validitas ini menggunakan pendekatan *Pearson Correlation*. Jika korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor mempunyai tingkat signifikansi di bawah 0,05 maka butir pertanyaan tersebut dikatakan valid, dan sebaliknya (Ghozali, 2011:55).

Tabel 3.1
Hasil Uji Validitas

| Variabel | Indikator | No. Item | Sig (1-tailed) | Keterangan |
|---------------------|---|----------|----------------|------------|
| Literasi Pajak (X1) | Wajib pajak mengetahui fungsi dari pajak yang dibayar | 1 | 0,000 | VALID |
| | | 2 | 0,005 | VALID |
| | | 3 | 0,000 | VALID |
| | Wajib pajak mengetahui bahwa membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara | 4 | 0,000 | VALID |
| | | 5 | 0,000 | VALID |
| | | 6 | 0,000 | VALID |
| | | 7 | 0,000 | VALID |

| | | | | | |
|---|---|--|-------|-------|-------|
| | Wajib pajak mengetahui perubahan peraturan perpajakan yang berlaku | 8 | 0,000 | VALID | |
| | | 9 | 0,000 | VALID | |
| | Wajib pajak mengerti bagaimana cara menghitung pajak yang harus dibayar | 10 | 0,000 | VALID | |
| | | 11 | 0,000 | VALID | |
| | | 12 | 0,000 | VALID | |
| | Wajib Pajak membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku | 13 | 0,000 | VALID | |
| | | 14 | 0,000 | VALID | |
| | | 15 | 0,000 | VALID | |
| | Apabila wajib pajak tidak membayar maka akan mendapat sanksi | 16 | 0,000 | VALID | |
| | | 17 | 0,000 | VALID | |
| | | 18 | 0,000 | VALID | |
| | Pemeriksaan Pajak (X2) | Kualitas sumber daya (Pemeriksa) | 19 | 0,000 | VALID |
| | | | 20 | 0,000 | VALID |
| | | Integritas pemeriksa | 21 | 0,000 | VALID |
| | | | 22 | 0,000 | VALID |
| Rasio pemeriksa dan wajib pajak | | 23 | 0,000 | VALID | |
| | | 24 | 0,000 | VALID | |
| Tekhnologi informasi | | 25 | 0,000 | VALID | |
| Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen | | 26 | 0,000 | VALID | |
| | | 27 | 0,000 | VALID | |
| | | 28 | 0,000 | VALID | |
| Melakukan informasi kepada pihak ketiga | | 29 | 0,000 | VALID | |
| | | 30 | 0,000 | VALID | |
| Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak | | 31 | 0,000 | VALID | |
| Melakukan sidang penutup (Closing Conference) | | 32 | 0,000 | VALID | |
| Sanksi Pajak (X3) | | Sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan wajib | 33 | 0,000 | VALID |
| | 34 | | 0,000 | VALID | |

| | | | | |
|---------------------------|---|-------|-------|-------|
| | pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya | 35 | 0,000 | VALID |
| | Sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada wajib pajak yang melanggar | 36 | 0,000 | VALID |
| | | 37 | 0,000 | VALID |
| | | 38 | 0,000 | VALID |
| | Sanksi diberikan sesuai pelanggaran yang dilakukan | 39 | 0,000 | VALID |
| | | 40 | 0,000 | VALID |
| | | 41 | 0,000 | VALID |
| | Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku | 42 | 0,000 | VALID |
| | | 43 | 0,000 | VALID |
| | | 44 | 0,000 | VALID |
| | | 45 | 0,000 | VALID |
| Kesadaran Wajib Pajak (Z) | Kesadaran adanya hak dan kewajiban memenuhi kewajiban pajak | 46 | 0,003 | VALID |
| | Kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara dan daerah | 47 | 0,000 | VALID |
| | | 48 | 0,000 | VALID |
| | | 49 | 0,000 | VALID |
| | | 50 | 0,000 | VALID |
| | Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak sukarela | 51 | 0,000 | VALID |
| | | 52 | 0,001 | VALID |
| 53 | | 0,000 | VALID | |
| Kepatuhan Wajib Pajak (Y) | Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara sukarela ke Kantor Pelayanan Pajak | 54 | 0,006 | VALID |
| | | 55 | 0,000 | VALID |
| | Melakukan pembukuan atau pencatatan | 56 | 0,000 | VALID |
| | | 57 | 0,000 | VALID |
| | Menghitung pajak terutang dengan benar dan melakukan pembayaran tepat waktu | 58 | 0,000 | VALID |
| | | 59 | 0,000 | VALID |
| 60 | | 0,000 | VALID | |

| | | | | |
|--|---|----|-------|-------|
| | | 61 | 0,000 | VALID |
| | Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai peraturan perundang-undangan dan melaporkan tepat waktu. | 62 | 0,000 | VALID |
| | | 63 | 0,000 | VALID |
| | | 64 | 0,003 | VALID |
| | | 65 | 0,000 | VALID |

Sumber: Data primer diolah, 2020

3.5.1. Uji Reliabilitas Instrumen

Menurut (Ghozali, 2011:47), uji reliabilitas adalah alat untuk suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu koesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas ini menghasilkan nilai Cronbach Alpha. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,70. apabila Cornbach Alpha dari suatu variabel lebih besar 0,70 maka butir pertanyaan dalam instrumen penelitian tersebut adalah reliabel/dapat diandalkan. Sebaliknya, jikan nilai Cornbach Alpha kurang dari 0,70 maka butir pertanyaan tidak reliabel.

Tabel 3.2
Hasil Uji Reliabilitas

| No | Variabel | Nilai Cronbach's Alpha Hitung | Nilai Cronbach's Alpha Diisyaratkan | Keterangan |
|----|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 1. | Kepatuhan Wajib Pajak | 0,913 | >0,70 | Reliabel |
| 2. | Literasi Pajak | 0,951 | >0,70 | Reliabel |
| 3. | Pemeriksaan Pajak | 0,963 | >0,70 | Reliabel |
| 4. | Sanksi Pajak | 0,954 | >0,70 | Reliabel |
| 5. | Kesadaran Wajib Pajak | 0,945 | >0,70 | Reliabel |

Sumber: Data primer diolah, 2020

3.6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

3.6.1. Analisis Statis Deskriptif

Analisis Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2013:207). Sedangkan menurut (Ghozali, 2016) yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi).

Analisis dilakukan dengan memberikan skor pada jawaban angket yang telah diisi oleh responden. Sebelum dianalisis, terlebih dahulu dibuat tabel distribusi frekuensi untuk membuat klasifikasi kriteria data secara umum atau rata-rata. Untuk membuat daftar distribusi frekuensi dapat dilakukan dengan cara berikut (Sudjana, 2005:47) :

1. Menentukan rentang yaitu skor data terbesar dikurangi skor data terkecil.
2. Menentukan banyak kelas interval yang diperlukan.
3. Menentukan panjang kelas interval.
4. Pilih ujung bawah kelas interval pertama. Untuk ini bisa diambil sama dengan data terkecil atau nilai data yang lebih kecil dari data terkecil tetapi selisihnya harus kurang dari panjang kelas yang telah ditentukan.

Berikut ini adalah deskripsi dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian:

3.6.1.1. Kepatuhan Wajib Pajak

Menentukan kategori distribusi jawaban responden untuk variabel kepatuhan pajak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Menentukan rentang, yaitu skor data terbesar dikurangi skor data terkecil.

$$\text{Skor terbesar} : 12 \times 5 = 60$$

$$\text{Skor terkecil} : 12 \times 1 = 12$$

$$\text{Rentang} : 60 - 12 = 48$$

2. Menentukan banyak kelas interval yang diperlukan yaitu 5.
3. Menentukan panjang kelas interval.

$$P = \frac{\text{rentang}}{\text{banyak kelas}}$$

$$P = \frac{48}{5}$$

$$P = 9,6 \text{ (Pembulatan menjadi 10)}$$

Tabel 3.3

Kategori Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

| No | Interval Skor | Kategori |
|----|---------------|---------------|
| 1. | 12 – 21 | Sangat Rendah |
| 2. | 22 – 31 | Rendah |
| 3. | 32 – 41 | Sedang |
| 4. | 42 – 51 | Tinggi |
| 5. | 52 – 61 | Sangat Tinggi |

Sumber: Data Primer diolah, 2020

3.6.1.2. Literasi Pajak

Menentukan kategori distribusi jawaban responden untuk variabel literasi pajak dengan cara sebagai berikut:

1. Menentukan rentang, yaitu skor data terbesar dikurangi skor data terkecil.

$$\text{Skor terbesar} : 18 \times 5 = 90$$

$$\text{Skor terkecil} : 18 \times 1 = 18$$

$$\text{Rentang} \quad : 90 - 18 = 72$$

2. Menentukan banyak kelas interval yang diperlukan yaitu 5.
3. Menentukan panjang kelas interval.

$$P = \frac{\text{rentang}}{\text{banyak kelas}}$$

$$P = \frac{72}{5}$$

$$P = 14,4 \text{ (dibulatkan menjadi 15)}$$

Tabel 3.4
Kategori Variabel Literasi Pajak

| No | Interval Skor | Kategori |
|----|---------------|---------------|
| 1. | 18 – 32 | Sangat Rendah |
| 2. | 33 – 47 | Rendah |
| 3. | 48 – 62 | Sedang |
| 4. | 63 – 77 | Tinggi |
| 5. | 78 – 92 | Sangat Tinggi |

Sumber: Data Primer diolah, 2020

3.6.1.3. Pemeriksaan Pajak

Menentukan kategori distribusi jawaban responden untuk variabel pemeriksaan pajak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Menentukan rentang, yaitu skor data terbesar dikurangi skor data terkecil.

$$\text{Skor terbesar} \quad : 14 \times 5 = 70$$

$$\text{Skor terkecil} \quad : 14 \times 1 = 14$$

$$\text{Rentang} \quad : 70 - 14 = 56$$

2. Menentukan banyak kelas interval yang diperlukan yaitu 5
3. Menentukan panjang kelas interval

$$P = \frac{\text{rentang}}{\text{banyak kelas}}$$

$$P = \frac{56}{5}$$

$$P = 11,2 \text{ (dibulatkan menjadi 12)}$$

Tabel 3.5
Kategori Variabel Pemeriksaan Pajak

| No | Interval Skor | Kategori |
|----|---------------|---------------|
| 1. | 14 – 25 | Sangat Rendah |
| 2. | 26 – 37 | Rendah |
| 3. | 38 – 49 | Sedang |
| 4. | 50 – 61 | Tinggi |
| 5. | 62 – 73 | Sangat Tinggi |

Sumber: Data Primer diolah, 2020

3.6.1.4. Sanksi Pajak

Menentukan kategori distribusi jawaban responden untuk variabel sanksi pajak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Menentukan rentang, yaitu skor data terbesar dikurangi data terkecil.

$$\text{Skor terbesar} : 13 \times 5 = 65$$

$$\text{Skor terkecil} : 13 \times 1 = 13$$

$$\text{Rentang} : 65 - 13 = 52$$

2. Menentukan banyak kelas interval yang diperlukan yaitu 5.
3. Menentukan panjang kelas interval.

$$P = \frac{\text{rentang}}{\text{banyak kelas}}$$

$$P = \frac{52}{5}$$

$$P = 10,4 \text{ (dibulatkan menjadi 11)}$$

Tabel 3.6
Kategori Variabel Sanksi Pajak

| No | Interval Skor | Kategori |
|----|---------------|---------------|
| 1 | 13 – 23 | Sangat Rendah |
| 2 | 24 – 34 | Rendah |
| 3 | 35 – 45 | Sedang |
| 4 | 46 – 56 | Tinggi |
| 5 | 57 – 67 | Sangat Tinggi |

Sumber: Data Primer diolah, 2020

3.6.1.5. Kesadaran Wajib Pajak

Menentukan kategori distribusi jawaban responden untuk variabel sanksi pajak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Menentukan rentang, yaitu skor data terbesar dikurangi skor data terkecil.

$$\text{Skor terbesar} : 8 \times 5 = 40$$

$$\text{Skor terkecil} : 8 \times 1 = 8$$

$$\text{Rentang} : 40 - 8 = 32$$

2. Menentukan banyak kelas interval yang diperlukan yaitu 5.
3. Menentukan panjang kelas interval.

$$P = \frac{\text{rentang}}{\text{banyak kelas}}$$

$$P = \frac{32}{5}$$

$$P = 6,4 \text{ (dibulatkan menjadi 7)}$$

Tabel 3.7

Kategori Variabel Kesadaran Wajib Pajak

| No | Interval Skor | Kategori |
|----|---------------|---------------|
| 1 | 8 – 14 | Sangat Rendah |
| 2 | 15 – 21 | Rendah |
| 3 | 22 – 28 | Sedang |
| 4 | 29 – 35 | Tinggi |
| 5 | 36 – 42 | Sangat Tinggi |

Sumber: Data Primer diolah, 2020

3.6.2. Uji Asumsi Klasik

3.6.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2016:154).

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan Kolmogorov-Smirnov (K-S)

dengan bantuan program SPSS. Pengambilan keputusan didasarkan pada probabilitas yakni jika probabilitas $> 0,05$, maka data penelitian tersebut berdistribusi normal.

3.6.2.2. Uji Linearitas

Uji linearitas digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak. Dengan uji linearitas akan diperoleh informasi apakah model empiris sebaiknya linier, kuadrat, atau kubik (Ghozali, 2016:159). Dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin Watson (D-W) untuk melihat ada tidaknya autokorelasi dalam suatu model regresi.

3.6.2.3. Uji Multikolinieritas

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang digunakan ditemukan adanya korelasi/hubungan antar variabel bebas (Independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebasnya (Ghozali, 2013:103). Multikolinieritas dapat di deteksi dengan memeriksa nilai tolerance dan nilai variance inflation factor (VIF) pada tiap variabel independen menjadi variabel variabel dependen dan di regresi dengan variabel independen lainnya. Apabila nilai tolerance $< 0,10$ (10%) dan nilai VIF > 10 , maka terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2013:106).

3.6.2.4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari unit residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika terjadi perbedaan, maka kondisi inilah yang disebut heteroskedastisitas. Sebaliknya jika tidak terjadi perbedaan atau sama, maka disebut

homoskedastisitas. Model regresi yang baik yaitu model homoskedastisitas atau tidak heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini ditentukan dengan menggunakan Uji Park. Uji ini dilakukan dengan meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Tidak dikatakan heteroskedastisitas apabila probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%.

3.6.3. Analisis Jalur

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji pengaruh analisis jalur (*Path Analysis*). Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel (model casual) yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori (Ghozali, 2006:201). Analisis regresi digunakan untuk mengukur kekuatan pengaruh antara dua variabel atau lebih, dan juga digunakan untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Karena dalam penelitian ini terdapat lebih dari satu variabel independen dan menggunakan variabel intervening maka, penelitian ini menggunakan analisis regresi dua model yang digunakan untuk analisis jalur (*Path Analysis*) yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel intervening. Model regresi (persamaan struktural) yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{KSP} = a + b_1LP + b_2PP + b_3SP + e_1 \quad (1)$$

$$Y_{KP} = a + b_1LP + b_2PP + b_3SP + b_4KSP + e_2 \quad (2)$$

Keterangan:

| | |
|-----------------|---------------------|
| KP | : Kepatuhan Pajak |
| LP | : Literasi Pajak |
| PP | : Pemeriksaan Pajak |
| SP | : Sanksi Pajak |
| A | : Konstanta |
| b_1, b_2, b_3 | : Koefisien regresi |
| e | : Standar eror |

3.6.4. Uji Sobel (Sobel Test)

Pengujian hipotesis mediasi dapat dilakukan dengan uji sobel (*sobel test*) yaitu prosedur yang dikembangkan oleh Sobel (1982) (Ghozali, 2013). Uji sobel dilakukan dengan cara menguji kekuatan pengaruh tidak langsung variabel independen (X) kepada variabel dependen (Y) melalui variabel mediasi (M). Pengaruh tidak langsung X ke Y melalui M dihitung dengan cara mengalikan jalur $X \rightarrow M$ (a) dengan jalur $M \rightarrow Y$ (b) atau ab. Jadi koefisien $ab = (c - c')$. Dimana c adalah pengaruh X terhadap Y tanpa mengontrol M, sedangkan c' adalah koefisien pengaruh X terhadap Y setelah mengontrol M. Standar eror koefisien a dan b ditulis dengan S_a dan S_b , besarnya standar eror tidak langsung (*indirect effect*). S_{ab} dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$S_{ab} = \sqrt{b^2 S_a^2 + a^2 S_b^2 + S_a^2 S_b^2}$$

Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung, maka kita perlu menghitung nilai t dari koefisien ab dengan rumus sebagai berikut: $t = \frac{ab}{S_{ab}}$.

Keterangan:

a = koefisien variabel independen (tanpa variabel *intervening*)

b = koefisien variabel independen (dengan variabel *intervening*)

Sa = Standar error variabel independen (tanpa variabel *intervening*)

Sb = Standar error variabel independen (dengan variabel *intervening*)

Nilai t hitung dibandingkan dengan nilai t tabel, apabila nilai t hitung > t tabel maka terjadi pengaruh mediasi (Ghozali, 2013). Terdapat dua jenis mediasi yaitu mediasi penuh (*full mediation*) dan mediasi sebagian (*partial mediation*). Full mediation menunjukkan bahwa variabel independen sepenuhnya dimediasi oleh mediator karena tidak ada lagi pengaruh langsung dari variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan, *partial mediation* menunjukkan bahwa disamping memiliki pengaruh tidak langsung melalui mediator, variabel independen juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Uji sobel digunakan untuk menguji:

1. H8 : Terdapat pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak.
2. H9 : Terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak.
3. H10 : Terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak.

3.6.5. Uji Hipotesis Penelitian

3.6.5.1. Uji Parsial (Uji Statistik t)

Pada dasarnya uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variabel terikat (Ghozali, 2016:97). Dasar pengambilan keputusan dalam uji statistik t adalah dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi, sebagai berikut:

1. Apabila probabilitas signifikansi $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
2. Apabila probabilitas signifikansi $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Analisis Deskriptif bertujuan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan yang tercermin pada nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*) dan standart deviasi dari masing-masing variabel kepatuhan pajak sebagai variabel dependen. Literasi pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak sebagai variabel independen, serta kesadaran pajak sebagai variabel intervening yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada responden. Deskripsi variabel penelitian bertujuan mempermudah dalam memahami pengukuran indikator dalam setiap variabel yang diungkapkan dalam penelitian. Berikut disajikan deskripsi dari masing-masing variabel penelitian.

4.1.1.1. Analisis Statistik Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel kepatuhan pajak diukur dengan 4 indikator yang dijabarkan menjadi 12 pertanyaan. Hasil perhitungan analisis statistik deskriptif untuk variabel kepatuhan pajak dapat dilihat pada tabel 4.1. sebagai berikut:

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

| Descriptive Statistics | | | | | |
|------------------------|----|---------|---------|-------|----------------|
| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
| Total | 60 | 28 | 60 | 49,15 | 6,446 |
| Valid N (listwise) | 60 | | | | |

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa jumlah responden sebanyak 60 wajib pajak, nilai terendah sebesar 28 dan nilai tertinggi

sebesar 60. *Mean* atau rata-rata diperoleh nilai sebesar 49,15. Sedangkan standar deviasi 6,446 menunjukkan sebaran datanya baik karena nilainya jauh dari nilai rata-rata sebagai representasi dari keseluruhan data. Berdasarkan kategori deskriptif, nilai rata-rata yang diperoleh menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak kota Semarang tergolong dalam kategori tinggi. Kriteria ini didasarkan pada analisis statistik deskriptif yang ditunjukkan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

| Skor Interval | Kriteria | Frekuensi | Presentase |
|----------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 12 – 21 | Sangat Rendah | 0 | 0% |
| 22 – 31 | Rendah | 1 | 1,7% |
| 32 – 41 | Sedang | 3 | 5% |
| 42 – 51 | Tinggi | 37 | 61,7% |
| 52 – 61 | Sangat Tinggi | 19 | 31,7% |
| TOTAL | | 60 | 100% |

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukkan distribusi frekuensi kepatuhan wajib pajak terkonsentrasi pada interval 42 sampai dengan 51 yaitu sebanyak 61,7% dari total unit analisis yang artinya rata-rata kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak Kota Semarang berada pada kategori tinggi. 31,7% memiliki kepatuhan wajib pajak dalam kategori sangat tinggi. 5% memiliki kepatuhan wajib pajak dalam kategori sedang dan 1,7% memiliki kepatuhan wajib pajak dalam kategori rendah. Hal tersebut mendukung hasil pengolahan data pada tabel sebelumnya yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak Kota Semarang termasuk dalam kategori tinggi.

Variabel kepatuhan pajak diukur dengan 4 indikator. Indikator tersebut adalah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara sukarela ke Kantor Pelayanan Pajak, melakukan pembukuan atau pencatatan, menghitung pajak terutang dengan

benar dan melakukan pembayaran tepat waktu, mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai peraturan perundang-undangan dan melaporkan tepat waktu. Berikut ini analisis statistik deskriptif lebih rinci tentang kepatuhan pajak ditinjau dari setiap indikator pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Distribusi Frekuensi Indikator Kepatuhan Pajak

| No | Indikator | Mean | Kategori |
|----|--|-------|---------------|
| 1 | Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara sukarela ke Kantor Pelayanan Pajak | 8,42 | Sangat Tinggi |
| 2 | Melakukan pembukuan atau pencatatan, | 8,42 | Sangat Tinggi |
| 3 | Menghitung pajak terutang dengan benar dan melakukan pembayaran tepat waktu | 16,32 | Tinggi |
| 4 | Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai peraturan perundang-undangan dan melaporkan tepat waktu | 16 | Tinggi |

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

4.1.1.2. Analisis Statistik Deskriptif Literasi Pajak

Variabel literasi pajak diukur dengan 6 indikator yang dijabarkan menjadi 18 pertanyaan. Hasil perhitungan analisis statistik deskriptif untuk variabel literasi pajak dapat dilihat pada Tabel 4.4. sebagai berikut:

Tabel 4.4. Statistik Deskriptif Literasi Pajak

| Descriptive Statistics | | | | | |
|------------------------|----|---------|---------|-------|----------------|
| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
| Total | 60 | 29 | 90 | 70,15 | 11,050 |
| Valid N (listwise) | 60 | | | | |

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel 4.4. menunjukkan bahwa jumlah responden sebanyak 60 wajib pajak, nilai terendah sebesar 29 dan nilai tertinggi sebesar 90. *Mean* atau rata-rata diperoleh sebesar 70,15. Sedangkan standar deviasi

sebesar 11,050 menunjukkan sebaran datanya baik karena nilainya jauh dari nilai rata-rata yang artinya nilai rata-rata dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data. Berdasarkan kategori pada analisis statistik deskriptif nilai rata-rata yang diperoleh menunjukkan bahwa literasi pajak wajib pajak Kota Semarang berada pada kategori tinggi.

Tabel 4.5. Distribusi Frekuensi Variabel Literasi Pajak

| Skor Interval | Kriteria | Frekuensi | Presentase |
|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 18 – 32 | Sangat Rendah | 1 | 1,7% |
| 33 – 47 | Rendah | 1 | 1,7% |
| 48 – 62 | Sedang | 9 | 15% |
| 63 – 77 | Tinggi | 37 | 61,7% |
| 78 – 92 | Sangat Tinggi | 12 | 20% |
| TOTAL | | 60 | 100% |

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.5 menunjukkan distribusi frekuensi literasi pajak terkonsentrasi pada interval 63 sampai dengan 77 yaitu sebanyak 61,7% dari total unit analisis yang memiliki tingkat literasi pajak tinggi, 20% memiliki tingkat literasi pajak sangat tinggi, 15% memiliki tingkat literasi pajak sedang, 1,7% memiliki tingkat literasi pajak rendah dan 1,7% memiliki tingkat literasi pajak sangat rendah. Hal ini mendukung hasil pengolahan data pada sebelumnya yang menunjukkan bahwa literasi pajak wajib pajak Kota Semarang tergolong tinggi.

Variabel pajak diukur dengan menggunakan 6 indikator. Indikator tersebut adalah wajib pajak mengetahui fungsi dari pajak yang dibayar, wajib pajak mengetahui bahwa membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara, wajib pajak mengetahui perubahan peraturan yang berlaku, wajib pajak mengerti bagaimana cara menghitung pajak yang harus dibayar, wajib pajak membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku, dan apabila wajib pajak tidak membayar maka akan

mendapat sanksi. Berikut ini analisis statistik deskriptif lebih rinci tentang kepatuhan pajak ditinjau dari setiap indikator pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6. Distribusi Frekuensi Indikator Literasi Pajak

| No | Indikator | Mean | Kategori |
|----|---|-------|----------|
| 1 | Wajib pajak mengetahui fungsi dari pajak yang dibayar | 12,18 | Tinggi |
| 2 | Wajib pajak mengetahui bahwa membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara | 12,02 | Tinggi |
| 3 | Wajib pajak mengetahui perubahan peraturan yang berlaku | 11,2 | Sedang |
| 4 | Wajib pajak mengerti bagaimana cara menghitung pajak yang harus dibayar | 11,43 | Sedang |
| 5 | Wajib pajak membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku | 11,32 | Sedang |
| 6 | Apabila wajib pajak tidak membayar maka akan mendapat sanksi | 12 | Tinggi |

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

4.1.1.3. Analisis Statistik Deskriptif Pemeriksaan Pajak

Variabel pemeriksaan pajak diukur dengan 8 indikator yang dijabarkan menjadi 14 pertanyaan. Hasil perhitungan analisis statistik deskriptif untuk variabel pemeriksaan pajak dapat dilihat pada tabel 4.7. sebagai berikut:

Tabel 4.7. Statistik Deskriptif Variabel Pemeriksaan Pajak

| Descriptive Statistics | | | | | |
|------------------------|----|---------|---------|-------|----------------|
| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
| Total | 60 | 42 | 70 | 57,50 | 7,799 |
| Valid N (listwise) | 60 | | | | |

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel 4.7. menunjukkan bahwa jumlah responden sebanyak 60 wajib pajak, nilai terendah sebesar 42 dan nilai tertinggi

sebesar 70. *Mean* atau rata-rata diperoleh sebesar 57,50. Sedangkan standar deviasi sebesar 7,799. Rata-rata ini menunjukkan bahwa sebagian besar pemeriksaan pajak berada pada rentangan nilai tersebut. Standar deviasi hasil pengolahan tersebut menunjukkan angka sebesar 7,799 menunjukkan bahwa sebaran datanya baik karena jauh dari nilai rata-rata artinya nilai rata-rata dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak Kota Semarang tergolong dalam kategori tinggi.

Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Variabel Pemeriksaan Pajak

| Skor Interval | Kriteria | Frekuensi | Presentase |
|----------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 14 – 25 | Sangat Rendah | 0 | 0% |
| 26 – 37 | Rendah | 0 | 0% |
| 38 – 49 | Sedang | 10 | 16,7% |
| 50 – 61 | Tinggi | 33 | 55% |
| 62 – 73 | Sangat Tinggi | 17 | 28,3% |
| TOTAL | | 60 | 100% |

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.8. menunjukkan distribusi frekuensi pemeriksaan pajak terkonsentrasi pada interval 50 sampai dengan 61 yaitu sebanyak 55% dari total unit analisis memiliki tingkat pemeriksaan pajak tinggi, 28,3% memiliki tingkat pemeriksaan pajak sangat tinggi dan 16,7% memiliki tingkat pemeriksaan pajak sedang. Hal ini mendukung hasil pengolahan data pada Tabel 4.7 yang menunjukkan bahwa wajib pajak Kota Semarang memiliki tingkat pemeriksaan pajak tinggi.

Variabel pemeriksaan pajak diukur dengan menggunakan 8 indikator. Indikator tersebut adalah kualitas sumber daya (pemeriksa), integritas pemeriksa, rasio pemeriksa dan wajib pajak, teknologi informasi, melakukan pemeriksaan atas buku, catatan dan dokumen, melakukan informasi kepada pihak ketiga,

memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak dan melakukan sidang penutup. Berikut ini analisis statistik deskriptif lebih rinci tentang kepatuhan pajak ditinjau dari setiap indikator pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9. Distribusi Frekuensi Indikator Pemeriksaan Pajak

| No | Indikator | Mean | Kategori |
|----|---|-------|---------------|
| 1 | Kualitas sumber daya (Pemeriksa) | 8,08 | Sangat Tinggi |
| 2 | Integritas pemeriksa | 8,2 | Sangat Tinggi |
| 3 | Rasio pemeriksa dan wajib Pajak | 8,23 | Sangat Tinggi |
| 4 | Tekhnologi informasi | 4,15 | Tinggi |
| 5 | Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatancatatan dan dokumendokumen | 8,13 | Sangat Tinggi |
| 6 | Melakukan informasi kepada pihak ketiga | 12,43 | Tinggi |
| 7 | Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak | 4,13 | Tinggi |
| 8 | Melakukan sidang Penutup | 4,13 | Tinggi |

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

4.1.1.4. Analisis Statistik Deskriptif Sanksi Pajak

Variabel sanksi pajak diukur dengan 4 indikator yang dijabarkan menjadi 13 pertanyaan. Hasil perhitungan analisis statistik deskriptif untuk variabel sanksi pajak dapat dilihat pada tabel 4.10. sebagai berikut:

Tabel 4.10 Statistik Deskriptif Sanksi Pajak

| Descriptive Statistics | | | | | |
|------------------------|----|---------|---------|-------|----------------|
| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
| Total | 60 | 30 | 65 | 53,12 | 7,812 |
| Valid N (listwise) | 60 | | | | |

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan uji statistik pada tabel 4.10. menunjukkan bahwa jumlah responden sebanyak 60 wajib pajak, nilai terendah sebesar 30 dan nilai tertinggi 65.

Mean atau rata-rata diperoleh sebesar 53,12. Rata-rata ini menunjukkan bahwa sebagian besar sanksi pajak berada pada rentang nilai tersebut. Standar deviasi dari hasil pengolahan tersebut menunjukkan angka sebesar 7,812 menunjukkan bahwa sebaran datanya baik karena jauh dari nilai rata-rata yang artinya nilai rata-rata dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak Kota Semarang tergolong dalam kategori tinggi.

Tabel 4.11. Distribusi Frekuensi Variabel Sanksi Pajak

| Skor Interval | Kriteria | Frekuensi | Presentase |
|----------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 13 – 23 | Sangat Rendah | 0 | 0% |
| 24 – 34 | Rendah | 1 | 1,7% |
| 35 – 45 | Sedang | 9 | 15% |
| 46 – 56 | Tinggi | 29 | 48,3% |
| 57 – 67 | Sangat Tinggi | 21 | 35% |
| TOTAL | | 60 | 100% |

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.11. menunjukkan distribusi frekuensi sanksi pajak terkonsentrasi pada interval 46 sampai dengan 56 yaitu sebanyak 48,3% dari total unit analisis menunjukkan bahwa tingkat sanksi pajak tinggi, 35% memiliki tingkat sanksi pajak sangat tinggi, 15% memiliki tingkat sanksi pajak sedang dan 1,7% memiliki tingkat sanksi pajak rendah. Hal ini mendukung hasil pengolahan data pada Tabel 4.10 yang menunjukkan bahwa sanksi pajak pada Kota Semarang tergolong pada kategori tinggi.

Variabel sanksi pajak diukur dengan menggunakan 4 indikator. Indikator tersebut adalah sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada wajib pajak yang melanggar, sanksi diberikan sesuai pelanggaran yang dilakukan dan penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Berikut ini analisis statistik deskriptif lebih rinci tentang kepatuhan pajak ditinjau dari setiap indikator pada Tabel 4.12.

Tabel 4.12. Distribusi Frekuensi Indikator Sanksi Pajak

| No | Indikator | Mean | Kategori |
|----|---|-------|----------|
| 1 | Sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya | 12,53 | Tinggi |
| 2 | Sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada wajib pajak yang melanggar | 12,48 | Tinggi |
| 3 | Sanksi diberikan sesuai pelanggaran yang dilakukan | 11,96 | Sedang |
| 4 | Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku | 16,13 | Tinggi |

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

4.1.1.5. Analisis Statistik Deskriptif Kesadaran Wajib Pajak

Variabel kesadaran wajib pajak diukur dengan 3 indikator yang dijabarkan menjadi 8 pertanyaan. Hasil perhitungan analisis statistik deskriptif untuk variabel kesadaran pajak dapat dilihat pada tabel 4.13. sebagai berikut:

Tabel 4.13. Statistik Deskriptif Variabel Kesadaran Wajib Pajak

| Descriptive Statistics | | | | | |
|------------------------|----|---------|---------|-------|----------------|
| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
| Total | 60 | 24 | 40 | 34,28 | 4,377 |
| Valid N (listwise) | 60 | | | | |

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel 4.10. menunjukan bahwa jumlah responden sebanyak 60 wajib pajak, nilai terendah sebesar 24, nilai tertinggi sebesar 40. *Mean* atau rata-rata diperoleh 34,28. Rata-rata ini menunjukkan bahwa sebagian besar kesadaran wajib pajak berada pada rentangan nilai tersebut. Standar deviasi

dari hasil pengolahan tersebut menunjukkan angka sebesar 4,377 menunjukkan bahwa sebaran datanya baik karena jauh dari nilai rata-rata yang artinya nilai rata-rata dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tergolong pada kategori tinggi.

Tabel 4.14. Distribusi Frekuensi Variabel Kesadaran Pajak

| Skor Interval | Kriteria | Frekuensi | Presentase |
|----------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 8 – 14 | Sangat Rendah | 0 | 0% |
| 15 – 21 | Rendah | 0 | 0% |
| 22 – 28 | Sedang | 5 | 8,3% |
| 29 – 35 | Tinggi | 31 | 51,7% |
| 36 – 42 | Sangat Tinggi | 24 | 40% |
| TOTAL | | 60 | 100% |

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.14. menunjukkan distribusi frekuensi kesadaran wajib pajak terkonsentrasi pada tentang 29 sampai dengan 35 yaitu sebanyak 51,75% dari total unit analisis memiliki tingkat kesadaran wajib pajak yang tinggi, 40% memiliki tingkat kesadaran wajib pajak tinggi dan 8,3% memiliki tingkat kesadaran wajib pajak sedang. Hal ini mendukung hasil pengolahan data pada tabel sebelumnya yang menunjukkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak di Kota Semarang tergolong dalam kategori tinggi.

Variabel kesadaran wajib pajak diukur dengan menggunakan 3 indikator. Indikator tersebut adalah kesadaran adanya hak dan kewajiban memenuhi kewajiban pajak, kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara dan daerah dan dorongan diri sendiri untuk membayar pajak sukarela. Berikut ini analisis statistik deskriptif lebih rinci tentang kepatuhan pajak ditinjau dari setiap indikator pada Tabel 4.15.

Tabel 4.15. Distribusi Frekuensi Indikator Kesadaran Wajib Pajak

| No | Indikator | Mean | Kategori |
|----|--|-------|----------|
| 1 | Kesadaran adanya hak dan kewajiban memenuhi kewajiban pajak | 4,36 | Tinggi |
| 2 | Kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara dan daerah | 16,98 | Tinggi |
| 3 | Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak sukarela | 12,93 | Tinggi |

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

4.1.2. Uji Asumsi Klasik

4.1.2.1. Uji Normalitas

Uji ini bertujuan untuk menguji dalam model regresi, apakah variabel terikat dan variabel bebas mempunyai distribusi normal atau tidak. Untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak dilakukan Uji Normalitas dengan kriteria pengujian dalam Uji Normalitas adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka data berdistribusi normal.
2. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal.

Uji normalitas dapat dilakukan dengan analisis statistik menggunakan nilai Kolmogorov-Smirnov menggunakan aplikasi IBM SPSS v.21. Hasil normalitas dapat dilihat pada Tabel 4.16 berikut ini:

Tabel 4.16. Hasil Uji Normalitas dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Dependen

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| N | | 60 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | ,0000000 |
| | Std. Deviation | 4,25792131 |
| | Absolute | ,085 |
| Most Extreme Differences | Positive | ,085 |
| | Negative | -,077 |
| Test Statistic | | ,085 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | ,200 ^{c,d} |

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan hasil uji normalitas pada Tabel 4.16. diketahui bahwa hasil uji normalitas masing-masing variabel terhadap nilai residual untuk jumlah sebanyak 60 responden diperoleh nilai probabilitas (*Asymp.Sig.*) sebesar 0,200. Nilai signifikan tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa residual data terdistribusi normal.

Tabel 4.17. Hasil Uji Normalitas dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| N | | 60 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | ,0000000 |
| | Std. Deviation | 3,13058349 |
| | Absolute | ,070 |
| Most Extreme Differences | Positive | ,070 |
| | Negative | -,063 |
| Tes Statistic | | ,570 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | ,200 ^{c,d} |

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.
 Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan hasil uji normalitas pada Tabel 4.17. diketahui bahwa hasil uji normalitas masing-masing variabel terhadap nilai residual untuk jumlah sebanyak 60 responden diperoleh nilai probabilitas (*Asymp.Sig.*) sebesar 0,200. Nilai signifikan tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa residual data terdistribusi normal.

4.1.2.2. Uji Linearitas

Uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah spesifikasi dari model yang digunakan sudah benar atau tidak. Uji linearitas data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *IBM SPSS Statistics 21*. Hasil uji linearitas dapat dilihat pada tabel 4.18 berikut:

Tabel 4.18
Hasil Uji Linearitas dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel
Dependen

| Model Summary ^b | | | | | |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1 | ,751 ^a | ,564 | ,532 | 4,410 | 1,851 |

a. Predictors: (Constant), KSP, LP, PP, SP

b. Dependent Variable: KP

Sumber: Data primer diolah, 2020

Nilai D-W sebesar 1,851 lebih besar jika dibandingkan dengan nilai $dl = 1,4443$ dengan $n = 60$ dan $k = 4$, maka dapat disimpulkan bahwa spesifikasi model persamaan linear adalah benar atau tidak terdapat autokorelasi positif pada model linear.

Tabel 4.19
Hasil Uji Linearitas dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel
Dependen

| Model Summary^b | | | | | |
|----------------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1 | ,699 ^a | ,488 | ,461 | 3,213 | 1,872 |

a. Predictors: (Constant), SP, LP, PP

b. Dependent Variable: KSP

Sumber: Data primer diolah, 2020

Nilai D-W sebesar 1,872 lebih besar jika dibandingkan dengan nilai $dl = 1,4797$ dengan $n = 60$ dan $k = 3$, maka dapat disimpulkan bahwa spesifikasi model persamaan linear adalah benar atau tidak terdapat autokorelasi positif pada model linear.

4.1.2.3. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang digunakan terdapat korelasi antar variabel independen atau tidak. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Uji multikolinieritas dalam penelitian ini menggunakan aplikasi IMB SPSS Statistic 21 dengan menggunakan nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai *Tolerance* VIF lebih kecil 0,10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas, sebaliknya apabila nilai *Tolerance* VIF lebih besar dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas tersaji dalam Tabel 4.20 berikut:

Tabel 4.20
Hasil Uji Multikolonieritas dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel
Dependen

| Coefficients ^a | | | |
|---------------------------|-----|-------------------------|-------|
| Model | | Collinearity Statistics | |
| | | Tolerance | VIF |
| 1 | LP | ,688 | 1,453 |
| | PP | ,375 | 2,668 |
| | SP | ,361 | 2,768 |
| | KSP | ,512 | 1,955 |

a. Dependent Variable: KP

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan hasil uji multikolonieritas pada Tabel 4.20 menunjukkan nilai tolerance LP 0,688 , PP 0,375 , SP 0,361 , KSP 0,512 dan hasil perhitungan nilai VIF LP 1,453 , PP 2,668 , SP 2,768 dan KSP 1,955. Sehingga disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolonieritas antar variabel independen pada model regresi karena nilai tolerance $> 0,10$ dan VIF < 10 pada semua variabel independen penelitian.

Tabel 4.21
Hasil Uji Multikolonieritas dengan Kesadaran Pajak sebagai Variabel
Dependen

| Coefficients ^a | | | |
|---------------------------|----|-------------------------|-------|
| Model | | Collinearity Statistics | |
| | | Tolerance | VIF |
| 1 | LP | ,688 | 1,453 |
| | PP | ,417 | 2,401 |
| | SP | ,402 | 2,486 |

a. Dependent Variable: KSP

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan hasil uji multikolonieritas pada Tabel 4.21 menunjukkan nilai tolerance LP 0,688 , PP 0,417 , SP 0,402 dan hasil perhitungan nilai VIF LP 1,453 , PP 2,401 dan SP 2,486. Sehingga disimpulkan bahwa tidak terdapat

multikolonieritas antar variabel independen pada model regresi karena nilai tolerance $> 0,10$ dan VIF < 10 pada semua variabel independen penelitian.

4.1.2.4. Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik tidak terjadi heterokedastisitas. Apabila nilai signifikan antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Namun apabila nilai *output* probabilitas signifikannya kurang dari 0,05 maka terjadi heterokedastisitas. Berikut hasil uji heteroskedastisitas pada Tabel 4.22:

Tabel 4.22
Hasil Uji Heterokedastisitas dengan Kepatuhan Pajak sebagai Variabel Dependen

| Coefficients ^a | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| | B | Std. Error | Beta | | |
| (Constant) | 1,461 | 3,005 | | ,486 | ,629 |
| 1 LP | -,054 | ,037 | -,223 | -1,450 | ,153 |
| PP | ,128 | ,071 | -,375 | 1,799 | ,077 |
| SP | ,042 | ,072 | ,124 | ,585 | ,561 |
| KSP | -,117 | ,108 | -,192 | -1,076 | ,287 |

a. Dependent Variable: Abs_Res
Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas pada Tabel 4.22. menunjukkan bahwa masing-masing variabel bebas dari masalah heterokedastisitas. Hal ini dapat diketahui dengan melihat nilai signifikan dari masing-masing variabel, dimana masing-masing variabel menunjukkan nilai lebih besar dari 0,05 sehingga dapat

disimpulkan tidak terdapat masalah heterokedastisitas pada masing-masing variabel.

Tabel 4.23
Hasil Uji Heterokedastisitas dengan Kesadaran Pajak sebagai Variabel
Dependen

| Coefficients ^a | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| | B | Std. Error | Beta | | |
| (Constant) | 9,713 | 1,723 | | 5,638 | ,000 |
| 1 LP | -,039 | ,023 | -,237 | -1,692 | ,096 |
| PP | -,065 | ,042 | -,278 | -1,540 | ,129 |
| SP | -,013 | ,043 | -,056 | -,307 | ,760 |

a. Dependent Variable: Abs_Res2
Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas pada Tabel 4.22. menunjukkan bahwa masing-masing variabel bebas dari masalah heterokedastisitas. Hal ini dapat diketahui dengan melihat nilai signifikan dari masing-masing variabel, dimana masing-masing variabel menunjukkan nilai lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat masalah heterokedastisitas pada masing-masing variabel.

4.1.3. Analisis Jalur

Analisis jalur digunakan untuk menaksirkan hubungan kausalitas antar variabel yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori dengan penggunaan analisis regresi. Analisis jalur digunakan untuk mengukur ada tidaknya pengaruh mediasi dari suatu variabel yang telah ditetapkan. Terdapat dua model persamaan regresi yang digunakan. Kedua model persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut :

4.1.3.1. Model Persamaan Regresi 1

Analisis regresi untuk model pertama menggunakan kepatuhan pajak sebagai variabel dependen dan menggunakan variabel literasi pajak, pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan kesadaran pajak sebagai variabel independen. Hasil analisis regresi model pertama sebagai berikut:

Tabel 4.24
Hasil Analisis Regresi dengan Kepatuhan Pajak sebagai Variabel Dependen

| Model | | Coefficients ^a | | | | |
|-------|------------|-----------------------------|-------|---------------------------|-------|------|
| | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
| B | Std. Error | Beta | | | | |
| 1 | (Constant) | 11,200 | 5,086 | | 2,202 | ,032 |
| | LP | -,009 | ,063 | -,016 | -,151 | ,880 |
| | PP | -,049 | ,120 | -,059 | -,403 | ,688 |
| | SP | ,392 | ,122 | ,475 | 3,206 | ,002 |
| | KSP | ,600 | ,183 | ,408 | 3,273 | ,002 |

a. Dependent Variable: KP

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.24 dapat dirumuskan bentuk persamaan regresi sebagai berikut:

$$KP = (-0,016LP) + (-0,059PP) + 0,475SP + 0,408KSP + e1$$

$$e1 = \sqrt{1 - R^2} = \sqrt{1 - 0,564} = \sqrt{0,436} = 0,660$$

sehingga diperoleh persamaan regresi:

$$KP = -0,016LP - 0,059PP + 0,475SP + 0,480KSP + 0,660$$

1. Koefisien regresi literasi pajak menunjukkan nilai negatif sebesar -0,016. Hal tersebut dapat diartikan bahwa apabila terjadi kenaikan 1% yang terjadi pada literasi pajak, maka nilai kepatuhan pajak mengalami penurunan sebesar 1,6% dan faktor lain yang mempengaruhi dianggap konstan.

2. Koefisien regresi pemeriksaan pajak menunjukkan nilai negatif yakni sebesar -0,059. Hal tersebut berarti bahwa apabila terjadi kenaikan 1% pada pemeriksaan pajak, maka nilai kepatuhan pajak akan mengalami penurunan sebesar 5,9% dan faktor lain yang mempengaruhi dianggap konstan.
3. Koefisien regresi sanksi pajak menunjukkan nilai positif yakni sebesar 0,475. Hal tersebut berarti bahwa apabila terjadi kenaikan 1% pada sanksi pajak, maka nilai kepatuhan pajak akan mengalami kenaikan sebesar 47,5% dan faktor lain yang mempengaruhi dianggap konstan.
4. Koefisien regresi kesadaran pajak menunjukkan nilai positif yakni sebesar 0,408. Hal tersebut berarti bahwa apabila terjadi kenaikan 1% pada kesadaran pajak, maka nilai kepatuhan pajak akan mengalami kenaikan sebesar 40,8% dan faktor lain yang mempengaruhi dianggap konstan.
5. Residual (*error*) pada variabel literasi pajak, pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan kesadaran pajak adalah 0,660 atau 66%. Berarti bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian sebesar 66%.

4.1.3.2. Model Persamaan Regresi 2

Analisis regresi untuk model kedua menggunakan kesadaran pajak sebagai variabel dependen dan menggunakan variabel literasi pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak sebagai variabel independen. Hasil analisis regresi model kedua sebagai berikut :

Tabel 4.25
Hasil Analisis Regresi dengan Kesadaran Pajak sebagai Variabel Dependen

| | | Coefficients ^a | | | | |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | |
| Model | | B | Std. Error | Beta | t | Sig. |
| 1 | (Constant) | 11,196 | 3,391 | | 3,302 | ,002 |
| | LP | -,002 | ,046 | -,005 | -,046 | ,964 |
| | PP | ,208 | ,083 | ,370 | 2,498 | ,015 |
| | SP | ,213 | ,084 | ,380 | 2,518 | ,015 |

a. Dependent Variable: KSP

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.25 dapat dirumuskan bentuk persamaan regresi sebagai berikut:

$$KSP = (-0,005)LP + 0,370PP + 0,380SP + e_2$$

$$e_2 = \sqrt{1 - R^2} = \sqrt{1 - 0,488} = \sqrt{0,512} = 0,715$$

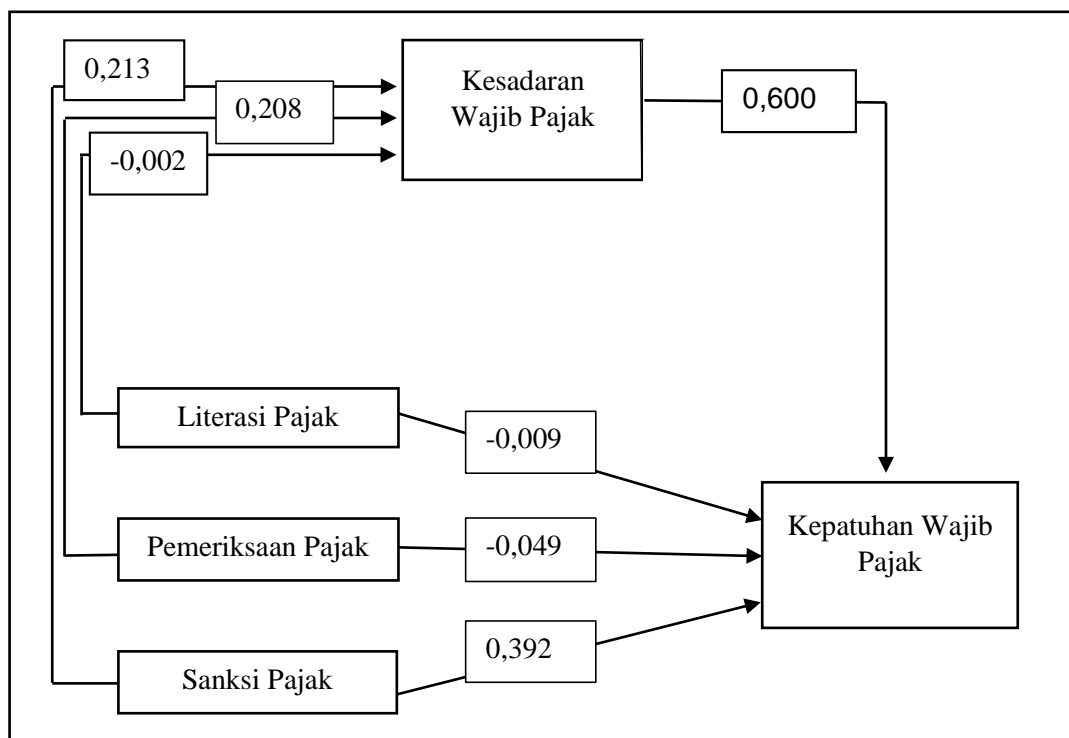
Persamaan regresi model dua diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Koefisien regresi literasi pajak menunjukkan nilai negatif yakni sebesar 0,005. Hal tersebut berarti bahwa apabila terjadi kenaikan 1% pada literasi pajak, maka nilai kesadaran pajak akan mengalami penurunan sebesar 0,5% dan faktor lain yang mempengaruhi dianggap konstan.
2. Koefisien regresi penerimaan pajak menunjukkan nilai positif yakni sebesar 0,370. Hal tersebut berarti bahwa apabila terjadi kenaikan 1% pada penerimaan pajak, maka nilai kesadaran pajak akan mengalami kenaikan sebesar 37% dan faktor lain yang mempengaruhi dianggap konstan.
3. Koefisien regresi sanksi pajak menunjukkan nilai positif yakni sebesar 0,380. Hal tersebut berarti bahwa apabila terjadi kenaikan 1% pada sanksi pajak, maka

nilai kesadaran pajak akan mengalami kenaikan sebesar 38% dan faktor lain yang mempengaruhi dianggap konstan.

4. Residual (*error*) variabel literasi pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kesadaran pajak adalah 0,715 atau 71,5%. Berarti bahwa kesadaran pajak dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini sebesar 71,5%.

Hasil dari kedua model analisis regresi diatas menghasilkan analisis jalur yang kemudian digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen dalam penelitian ini yang meliputi literasi pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak sebagai variabel intervening. Pada gambar 4.1 merupakan gambaran analisis jalur berdasarkan hasil analisis regresi model satu dan model dua.



Gambar 4.1
Analisis Jalur

4.1.4. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari uji pengaruh parsial (uji t) dan uji sobel dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%. Hasil dari pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

4.1.3.1. Uji Pengaruh Parsial (Uji t)

Uji pengaruh parsial digunakan untuk menguji bagaimana pengaruh tiap-tiap variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji-t yang telah dilakukan dengan bantuan *IBM SPSS 21* sebagai berikut:

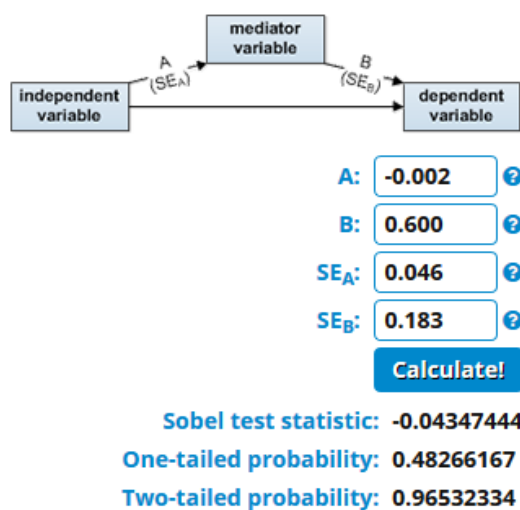
1. Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4.24 diketahui hasil koefisien beta literasi pajak sebesar -0,009 dengan nilai signifikansi 0,880. Hasil tersebut berarti bahwa literasi pajak tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 yang menyatakan literasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, **ditolak**.
2. Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4.24 diketahui koefisien beta pemeriksaan pajak sebesar -0,049 dengan nilai signifikansi sebesar 0,688. Hasil tersebut berarti bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 yang menyatakan pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, **ditolak**.
3. Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4.24 diketahui koefisien beta sanksi pajak sebesar 0,392 dengan nilai signifikan 0,002. Hasil tersebut berarti bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 yang menyatakan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, **diterima**.

4. Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4.24 diketahui koefisien beta kesadaran pajak sebesar 0,600 dengan nilai signifikansi sebesar 0,002. Hal tersebut berarti bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 yang menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak, **diterima**.
5. Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4.25 diketahui koefisien beta literasi pajak sebesar -0,002 dengan nilai signifikansi sebesar 0,964. Hal tersebut berarti bahwa literasi pajak tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Sehingga H5 yang menyatakan literasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran wajib pajak, **ditolak**.
6. Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4.25 diketahui koefisien beta pemeriksaan pajak sebesar 0,208 dengan nilai signifikansi sebesar 0,15. Hal tersebut berarti bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H6 yang menyatakan pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, **diterima**.
7. Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4.25 diketahui koefisien beta sanksi pajak sebesar 0,213 dengan nilai signifikansi sebesar 0,15. Hal tersebut berarti bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H7 yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran wajib pajak, **diterima**.

4.1.3.2. Uji Sobel (*Sobel Test*)

Uji sobel digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung literasi pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. Uji sobel pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi online *Sobel Test Calculation for significance of Mediation* pada www.danielsoper.com. Hasil perhitungan uji sobel adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening



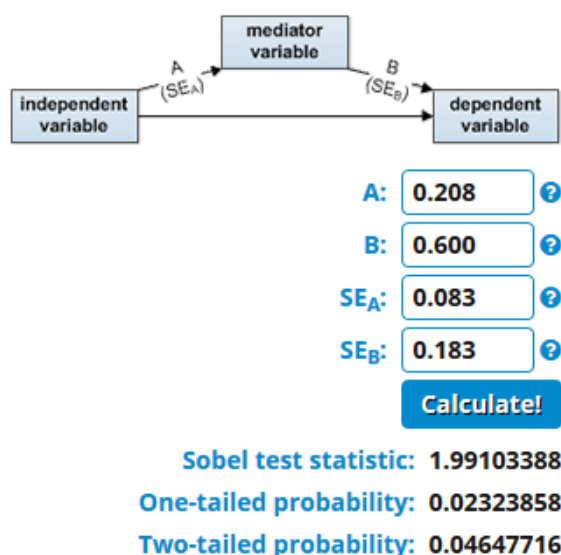
Gambar 4.2 Hasil Uji Sobel Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan gambar 4.2 menunjukkan bahwa hasil perhitungan *Sobel Test* diperoleh nilai *one-tailed probability* sebesar $0,48266167 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H₈ yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan literasi pajak terhadap kepatuhan pajak melalui kesadaran pajak sebagai

variabel intervening, **ditolak**. Hasil uji t menunjukkan bahwa literasi pajak tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak sehingga sudah dapat dipastikan bahwa kesadaran wajib pajak tidak dapat memediasi pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening

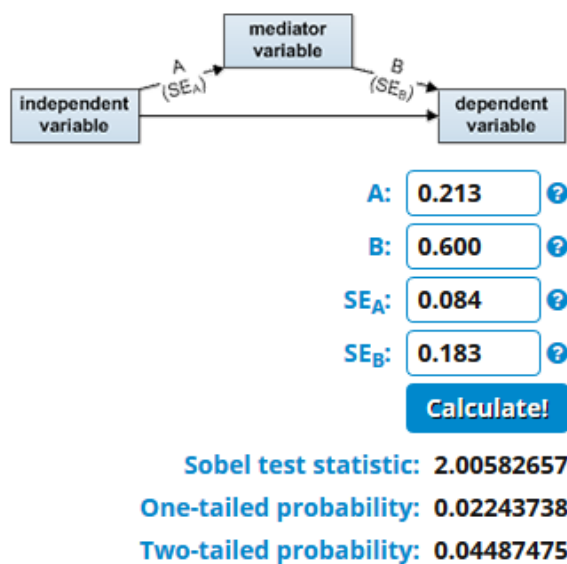


Gambar 4.3 Hasil Uji Sobel Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak melalui Kesadaran Pajak

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan gambar 4.3 menunjukkan bahwa hasil perhitungan *Sobel Test* diperoleh nilai *one-tailed probability* sebesar $0,02323858 < 0,05$ Hal ini berarti kesadaran pajak dapat memediasi pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H₉ yang menyatakan ada pengaruh positif dan signifikan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak melalui kesadaran pajak sebagai variabel intervening, **diterima**.

3. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak melalui kesadaran pajak sebagai variabel intervening



Gambar 4.4 Hasil Uji Sobel Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan Gambar 4.4 menunjukkan bahwa hasil perhitungan *Sobel Test* diperoleh nilai *one-tailed probability* sebesar $0,02243738 < 0,05$. Hal ini berarti kesadaran pajak dapat memediasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak. Sehingga H₁₀ yang menyatakan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening, **diterima**.

Tabel 4.26
Simpulan Hasil Uji Hipotesis

| No | Hipotesis | Koefisien Beta | Signifikansi ($\alpha=5\%$) | Hasil |
|-----|--|----------------|-------------------------------|----------|
| 1. | Literasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak | -0,009 | 0,880 | Ditolak |
| 2. | Pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak | -0,049 | 0,688 | Ditolak |
| 3. | Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak | 0,475 | 0,002 | Diterima |
| 4. | Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak | 0,408 | 0,002 | Diterima |
| 5. | Literasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran wajib pajak | -0,002 | 0,964 | Ditolak |
| 6. | Pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran wajib pajak | 0,208 | 0,015 | Diterima |
| 7. | Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran wajib pajak | 0,213 | 0,015 | Diterima |
| 8. | Literasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening | -0,0012 | 0,4827 | Ditolak |
| 9. | Pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening | 0,1248 | 0,02324 | Diterima |
| 10. | Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib | 0,1278 | 0,0224 | Diterima |

| | | | | |
|--|------------------------------------|--|--|--|
| | pajak sebagai variabel intervening | | | |
|--|------------------------------------|--|--|--|

Sumber: Data primer diolah, 2020

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian mengenai pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Semarang menunjukkan bahwa H1 yang menyatakan literasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak. Penolakan H1 mengindikasikan bahwa literasi pajak yang dimiliki wajib pajak tidak berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Semarang. Koefisien variabel literasi pajak bertanda negatif sebesar -0,151 pada tingkat signifikansi 0,880 berada di atas parameter 0,05. Hal ini berarti variabel literasi pajak tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini juga bertolak belakang dengan *Attribution Theory* yang mengemukakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Dalam hal ini literasi pajak adalah faktor internal yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri. Selain itu, temuan ini juga bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mintje, 2016) yang mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Peneliti menganalisis bahwa penyebab hasil penelitian tidak sejalan dengan hipotesis awal dan telaah teori dikarenakan kurangnya peran aktif dari wajib pajak. Selain itu, mungkin terdapat hambatan yang timbul pada saat perilaku ditampilkan yang berasal dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungan yang ditentukan oleh

pengalaman masa lalu atau perkiraan mengenai seberapa sulit untuk melakukan perilaku kepatuhan wajib pajak tersebut. Literasi pajak yang dimiliki oleh wajib pajak tanpa didukung dengan peran aktif dari wajib pajak itu sendiri maka tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.2.2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian mengenai pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa H2 yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak. Penolakan H2 mengindikasikan bahwa pemeriksaan pajak yang dimiliki wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Hal tersebut dapat diamati dengan koefisien variabel pemeriksaan pajak bertanda negatif dengan t hitung sebesar $-0,043$ pada tingkat signifikansi $0,688$ berada di atas parameter $0,05$. Hal ini berarti pemeriksaan pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wahyono et al., 2018) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu bisa disebabkan karena kondisi dan keadaan yang ada pada objek penelitian.

Berdasarkan teori atribusi yang dikembangkan oleh Fritz Heider, menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti kemampuan atau usaha, dan kekuatan eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar, seperti kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan. Berdasarkan hal

tersebut, seseorang akan termotivasi untuk memahaminya dan sebab-sebab kejadian tertentu. Pemeriksaan pajak sebagai faktor eksternal yang seharusnya dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Pemeriksaan pajak yang dimiliki wajib pajak UMKM di Kota Semarang berada dalam kategori baik, hal tersebut menunjukkan bahwa seharusnya pemeriksaan pajak dapat mendukung perilaku kepatuhan wajib pajak. Namun terdapat hambatan yang mungkin timbul pada saat perilaku masa lalu atau perkiraan mengenai seberapa sulit untuk melakukan perilaku kepatuhan tersebut. Berdasarkan beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.

4.2.3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan teori atribusi yang dicetuskan oleh Heider (1985), yang menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal (Shunk, 2012). Sanksi pajak merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak UMKM. Teori ini relevan dengan hasil pengujian hipotesis ketiga yang mengungkapkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan dalam mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM di Kota Semarang. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa semakin tegas sanksi yang dilakukan oleh petugas maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Temuan pada penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh (Utama & Setiawan, 2019) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Gianyar. Hasil analisis deskriptif

variabel sanksi pajak menunjukkan rata-rata sebesar 53,12 atau berada pada kategori baik. Variabel sanksi pajak diukur dengan 4 indikator dan sebagian besar termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak paham terhadap sanksi pajak dan secara tidak langsung akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.

4.2.4. Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa H4 yang menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Penerimaan H4 mengindikasikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Hal tersebut dapat diamati dari nilai t hitung sebesar 3,273 pada tingkat signifikansi 0,002 berada di bawah parameter 0,05. Hal ini berarti variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Saraswati, 2018) yang menunjukkan hasil bahwa secara parsial membuktikan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan teori atribusi yang dijelaskan oleh Heider juga mendalilkan penyebab perilaku seseorang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal disebut sebagai kekuatan pribadi yang efektif, sedangkan faktor eksternal disebut sebagai faktor efektifitas lingkungan yang memaksa. Faktor internal adalah

faktor yang berasal dari dalam individu, seperti: kebutuhan, keinginan, emosi, kemampuan, niat dan usaha. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar, seperti kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan (Schunk, 2012).

Hasil analisis deskriptif variabel kesadaran wajib pajak menunjukkan nilai rata-rata sebesar 34,28 dan berada pada kategori tinggi. Variabel kesadaran wajib pajak diukur dengan tiga indikator yaitu kesadaran adanya hak dan kewajiban memenuhi kewajiban pajak, kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara dan daerah, dorongan diri sendiri untuk membayar pajak sukarela. Indikator pajak digunakan untuk menunjang pembangunan daerah dan dorongan diri sendiri untuk membayar pajak sukarela menunjukkan nilai rata-rata masing-masing sebesar 16,98 dan 12,93 termasuk kedalam kategori tinggi. Hal ini berarti indikator pajak digunakan untuk menunjang pembangunan daerah dan dorongan diri sendiri untuk membayar pajak sukarela memiliki peranan yang besar terhadap kesadaran wajib pajak UMKM di Kota Semarang sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

4.2.5. Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Hasil penelitian mengenai pengaruh literasi pajak terhadap kesadaran wajib pajak UMKM menunjukkan bahwa H4 yang menyatakan literasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak. Penolakan H4 mengindikasikan bahwa literasi pajak yang dimiliki wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Hal tersebut dapat diamati dari koefisien variabel literasi pajak dengan t hitung $-0,151$ pada tingkat signifikansi $0,880$ berada di atas

parameter 0,05. Hal ini berarti variabel literasi pajak tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putri et al., 2018) yang menunjukkan hasil bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak pada sektor usaha kecil dan menengah. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan pajak tentang perpajakan maka belum tentu semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, sedangkan semakin rendah pengetahuan pajak maka semakin rendah tingkat kesadaran wajib pajaknya. Namun penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (I. K. Sari & Saryadi, 2019) yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu bisa disebabkan karena kondisi dan keadaan yang ada pada objek penelitian.

Berdasarkan teori atribusi yang dijelaskan oleh Heider juga mendalilkan penyebab perilaku seseorang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal (Schunk, 2012). Literasi pajak dan kesadaran wajib pajak sama-sama menjadi faktor internal yang mempengaruhi individu untuk melakukan sesuatu. Literasi pajak yang dimiliki wajib pajak UMKM di Kota Semarang berada dalam kategori tinggi, hal tersebut menunjukkan bahwa seharusnya literasi pajak dapat mendukung keyakinan akan hasil dari kesadaran wajib pajak.

4.2.6. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Hasil penelitian mengenai pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kesadaran wajib pajak menunjukkan bahwa H6 yang menyatakan pemeriksaan pajak

berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak diterima. Hal tersebut dapat diamati dari koefisien variabel pemeriksaan pajak bertanda positif dengan nilai t hitung 2,518 pada tingkat signifikansi 0,015 berada dibawah parameter 0,05. Hal ini berarti variabel pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Hasil analisis deskriptif menunjukkan rata-rata nilai variabel pemeriksaan pajak sebesar 57,50 dan berada pada kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak UMKM di Kota Semarang sudah baik. Nilai rata-rata variabel kesadaran wajib pajak 34,28 dengan kategori tinggi. Hal ini dapat dimaknai bahwa kesadaran wajib pajak UMKM di Kota Semarang tergolong tinggi. Variabel pemeriksaan pajak terdiri dari delapan indikator dimana delapan indikatornya memiliki rata-rata dengan kategori baik sehingga dapat diartikan bahwa delapan indikator memiliki peranan yang sama tingginya pada pemeriksaan pajak dalam mempengaruhi kesadaran wajib pajak UMKM di Kota Semarang.

Hasil ini relevan dengan teori atribusi yang dikembangkan oleh Fritz Heider, menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti kemampuan atau usaha, dan kekuatan eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar, seperti kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan. Berdasarkan hal tersebut, seseorang akan termotivasi untuk memahami lingkungannya dan sebab - sebab kejadian tertentu. Dalam hal ini variabel pemeriksaan pajak termasuk kedalam faktor eksternal penyebab wajib pajak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak. dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan

pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran wajib pajak UMKM di Kota Semarang.

4.2.7. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Hasil penelitian mengenai sanksi pajak terhadap kesadaran wajib pajak UMKM menunjukkan bahwa H7 yang menyatakan sanksi pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata nilai variabel sanksi pajak sebesar 53,12 dan berada pada kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak UMKM di Kota Semarang sudah ditegakkan dengan baik. Nilai rata-rata variabel kesadaran wajib pajak 34,28 dengan kategori tinggi. Hal ini dapat dimaknai bahwa kesadaran wajib pajak UMKM di Kota Semarang tergolong tinggi. Variabel sanksi pajak terdiri atas 4 indikator dimana keempat indikatornya memiliki rata-rata dengan kategori baik sehingga dapat diartikan bahwa keempat indikator memiliki peranan yang sama tingginya pada sanksi pajak dalam mempengaruhi kesadaran wajib pajak UMKM.

Hasil ini relevan dengan teori atribusi yang dikembangkan oleh Fritz Heider, menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti kemampuan atau usaha, dan kekuatan eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar, seperti kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan. Berdasarkan hal tersebut, seseorang akan termotivasi untuk memahami lingkungannya dan sebab - sebab kejadian tertentu. Dalam hal ini variabel sanksi pajak termasuk kedalam

faktor eksternal penyebab wajib pajak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak. Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak UMKM di Kota Semarang.

4.2.8. Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel *Intervening*

Hasil penelitian mengenai pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran pajak sebagai variabel *intervening* menunjukkan bahwa H8 yang menyatakan literasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak sebagai variabel *intervening* ditolak. Variabel kesadaran wajib pajak tidak dapat memediasi pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Berdasarkan hasil uji sobel penelitian diperoleh nilai *one-tailed probability* sebesar 0,48266167 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian kesadaran wajib pajak tidak dapat memediasi pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu motif intrinsik yang berasal dari dalam diri wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak (Widodo, 2010). Adanya kesadaran wajib pajak yang memediasi literasi pajak memberikan makna bahwa kesadaran dan literasi adalah dua hal yang berbeda yang secara tidak langsung mempunyai hubungan. Berdasarkan teori atribusi yang dijelaskan oleh Heider juga mendalilkan penyebab perilaku seseorang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal (Schunk, 2012). Literasi pajak dan kesadaran pajak merupakan faktor internal dari diri wajib pajak. Variabel literasi pajak dan

kesadaran wajib pajak adalah faktor penentu niat terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak, sehingga yang memediasi kepatuhan wajib pajak adalah niat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (I. K. Sari & Saryadi, 2019) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak bisa memediasi hubungan antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa literasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak sebagai variabel *intervening* diterima.

4.2.9. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel *Intervening*

Hasil penelitian mengenai pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui variabel *intervening* menunjukkan bahwa H9 yang menyatakan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak sebagai variabel *intervening*. Berdasarkan hasil perhitungan dengan uji sobel diperoleh nilai *one-tailed probability* sebesar 0,02323858 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Variabel kesadaran wajib pajak dapat memediasi pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Pemeriksaan pajak merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak sebagai faktor internal dan pemeriksaan pajak sebagai faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Pemeriksaan pajak juga berpengaruh terhadap kesadaran wajib

pajak, sehingga kesadaran wajib pajak mampu menjadi perantara yang baik secara tidak langsung untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak sebagai variabel *intervening*.

4.2.10. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel *Intervening*

Hasil penelitian mengenai pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak sebagai variabel *intervening* menunjukkan bahwa H10 yang menyatakan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak sebagai variabel *intervening* diterima. Berdasarkan hasil perhitungan dengan uji sobel diperoleh nilai *one-tailed probability* sebesar 0,02243738 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Variabel kesadaran wajib pajak dapat memediasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak. Sanksi pajak memberikan pengaruh terhadap kesadaran wajib pajak yang mendorong wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak sebagai faktor internal dan sanksi pajak sebagai faktor eksternal dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Sanksi pajak juga berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak, sehingga kesadaran wajib pajak mampu menjadi perantara yang baik secara tidak langsung untuk meningkatkan

kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak sebagai variabel *intervening*.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Literasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.
2. Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.
3. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.
4. Kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.
5. Literasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak UMKM di Kota Semarang.
6. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak UMKM di Kota Semarang.
7. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak UMKM di Kota Semarang.
8. Kesadaran wajib pajak tidak memediasi pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.
9. Kesadaran wajib pajak memediasi penuh pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.

10. Kesadaran wajib pajak memediasi parsial pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah dan petugas pajak diharapkan dapat meningkatkan pemeriksaan pajak untuk wajib pajak UMKM dalam membayar pajak. Peningkatan pemeriksaan lebih ditekankan lagi. Pemeriksaan pajak disesuaikan dengan situasi dan kondisi wajib pajak serta wajib pajak harus bisa diajak kerjasama oleh petugas pajak agar dapat memperlancar proses pelaksanaan pemeriksaan.
2. Petugas pajak lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan tanpa toleransi dan peningkatan kedisiplinan pada wajib pajak sangat diperlukan. Wajib pajak UMKM diharapkan terus meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan serta terus mendukung pemerintah untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sektor perpajakan melalui pembayaran pajak secara aktif. Selain itu, wajib pajak diharapkan jujur dalam melakukan pelaporan jumlah pendapatan dan kondisi usaha sesuai dengan yang sebenarnya. Hal ini diperlukan karena pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang terbesar yang digunakan untuk pembangunan bangsa dan Negara.
3. Peningkatan kesadaran pajak masih sangat diperlukan karena terdapat banyak anggapan bahwa ketika wajib pajak telat membayar pajak masih ada sumber

lain yang dapat digunakan pemerintah untuk pembangunan sehingga pemerintah perlu mengalokasikan dana secara transparan. Bagi Direktorat Jendral Pajak juga mengadakan sosialisasi di UKM center maupun tempat titik kumpul kumpul lainnya agar dapat menjangkau Wajib Pajak UMKM yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Karena berdasarkan jawaban responden pada kuesioner penelitian masih banyak responden yang belum pernah mendapatkan sosialisasi pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arisnawati, N., Khayati, S., & Zulfa, N. (2018). Influence Tax Amnestypayment of Tax Compliance SMEs Batik Moslem In District Pekalongan. *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)*, 117. <https://doi.org/10.28918/ijibec.v1i2.1005>
- Assa, J. R., Kalangi, L., & Pontoh, W. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 516–522. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21412.2018>
- Cahyani, L. P. G., & Noviyari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1885. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p08>
- De Joman, J. M. C., Sastri, I. I. M., & Datrini, L. K. %J J. R. A. W. (2020). *Pengaruh Biaya Kepatuhan, Pemeriksaan Pajak dan Penerapan E-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Denpasar Barat*. 1(1), 50–54. Retrieved from internal-pdf://232.166.128.89/De Joman-2020-Pengaruh Biaya Kepatuhan, Pemer.pdf
- Devano, Sony; Rahayu, S. (2006). *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu* (Pertama). Jakarta: Kencana.
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018a). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi. *Prosiding SENDI_U*, 655–662.
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018b). Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 7(2), 49. <https://doi.org/10.30659/jai.7.2.49-62>
- Fauziah, N. K. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. *Accounting Analysis Journal*, 5(2), 11–20. <https://doi.org/10.15294/aaaj.v5i2.14356>
- Febriyani, Y. ; K. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Accounting Analysis Journal*, 4(4). <https://doi.org/10.15294/aaaj.v4i4.9112>
- Fuadi, Arabella Oetari & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 2(2), 452–470.
- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program (IBM. SPSS)*.

- (8th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gusrefika, R. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di KPP Pratama Tampan Pekanbaru). *Jurnal Online Mahasiswa*, 1(1), 1–15. Retrieved from <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/21051>
- Hendri, N. (2016). ISSN Cetak : 1978. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pada Umkm Di Kota Metro*, 12(1), 1–15.
- Hetty Muniroh, & M. Zakky Wahyuddin Azizi. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Final PP Nomor 46 Tahun 2013 pada UMKM di Kabupaten Rembang. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 3(4), 372–395.
- Imaniati, Z. Z., & Isroah, I. (2016). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Pp No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Yogyakarta. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 5(2). <https://doi.org/10.21831/nominal.v5i2.11730>
- Jatmiko, A. N. (2006). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)*. 86.
- Kurniati, D. H., Djudi, M., & Saifi, M. (2016). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 9(1), 1–7. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Lestari, E. M. P., H, L. B., & Pranaditya, A. (2018). Pengaruh Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di KPP Pratama Semarang Candisari). *Journal Of Accounting*, 4(4), 20.
- Meliono, I. (2007). *MPKT Modul 1*. Jakarta: Lembaga Penerbitan FEUI.
- Mintje, M. S. (2016). Pengaruh Sikap, Kesadaran, dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (UMKM) Dalam Memiliki (NPWP) (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Manado). *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 1031–1043.
- Mohdali, R., & Pope, J. (2014). The influence of religiosity on taxpayers' compliance attitudes: Empirical evidence from a mixed-methods study in Malaysia. *Accounting Research Journal*, 27(1), 71–91. <https://doi.org/10.1108/ARJ-08-2013-0061>
- Mutia, S. P. T. (2014). Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Artikel Ilmiah*, 2(1), 2–29.
- Nazaruddin, I. (2019). The Role of Religiosity and Patriotism in Improving Taxpayer Compliance. *Journal of Accounting and Investment*, 20(1). <https://doi.org/10.18196/jai.2001111>

- Novia Tunggal, Dewi, S. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah*, 1(3), 111–117.
- Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin, M., & Sumiadji, S. (2018). The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 22(2), 240–255. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i2.1678>
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan* (3rd ed.). Jakarta: Granit.
- Purnaditya, R. R., & Rohman, A. (2015). Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris Pada WP OP yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Semarang Candisari). 4(4), 361–371.
- Palupi, D. Y., & Herianti, E. (2017). Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Informasi Tren Media sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga). *InFestasi*, 13(1), 285. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v13i1.3050>
- Prajogo, J. N., & Widuri, R. (2013). Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak dan Persepsi atas Sanksi Perpajakan Terhadap Umkm Di Wilayah Sidoarjo. *Tax & Accounting Review*, 3(2), 1–12.
- Putri, E., Purbasari, H., Handayani, M. T., & Ulynnuha, O. I. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 80–90. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v3i1.5733>
- Rahayu, S. (2013). *Perpajakan Indonesia* (1st ed.). Jakarta: Euthenia Prima.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahman, A. (2010). *Panduan Pelaksanaan Administrasi Pajak Untuk Karyawan Pelaku Bisnis*. Bandung: Nuansa.
- Rasmini, H. W. N. K. (2017). E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan , Tax Amnesty , Tingkat Penghasilan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia F. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(3), 2395–2424.
- Saragih, A. H., Dessy, D., & Hendrawan, A. (2020). Analisis Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Pajak Wa Analisis Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Beragama Kristen Protestanib Pajak Orang Pribadi Beragama Kristen Protestan. *JPAK : Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.17509/jpak.v8i1.16810>
- Saraswati, Z. E. (2018). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Di Surakarta. *Studi Kasus Inovasi Ekonomi*, 2(02), 45–52. <https://doi.org/10.22219/skie.v2i02.6513>
- Sari, I. K., & Saryadi. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pelaku UMKM yang Terdaftar di

- KPP Pratama Semarang Timur). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*.
- Sari, R. I., & Nuswantara, D. A. (2017). The Influence of Tax Amnesty Benefit Perception to Taxpayer Compliance. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 9(2), 176–183. <https://doi.org/10.15294/jda.v9i2.11991>
- Setiawan, K. J. P. dan P. E. (2017). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18, 1112–1140.
- Shinta Dewi, I., & Supadmi, N. (2014). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran, Kualitas Pelayanan Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi*, 9(2), 505–514.
- Soemarso. (2007). *Pajak dan Perpajakan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, E. (2011). *Hukum Pajak* (5th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Sudjana. (2005). *Metode Statistika*.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendra, E. (2010). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 15(1), 5906.
- Suyanto, S., & Pratama, Y. H. (2018). Kepatuhan wajib pajak orang pribadi: Studi aspek pengetahuan, kesadaran, kualitas layanan dan kebijakan sunset policy. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 21(1), 139–158. <https://doi.org/10.24914/jeb.v21i1.704>
- Tirayoh, V., Sabijono, H., & Mandagi, C. (2014). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya Pada Kpp Pratama Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(3).
- Utama, P. N. P., & Setiawan, P. E. (2019). Pengaruh Dimensi Keadilan , Sosialisasi Pajak , Sanksi Pajak , Penghasilan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(2), 1550–1579.
- Utami, D. T., & Kardinal. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu. *E-Jurnal Ekonomi*, 2(5), 1–9. Retrieved from <http://eprints.mdp.ac.id/970/>
- Valianta, S. (2014). *Artikel Ekonomi / Agustus 2014 / Vallianta SK*. 1–21.
- Wahyono, F. E., Rahmawati, S., Lubis, F., & Simanjuntak, T. H. (2018). Pengaruh pemeriksaan pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. *Forum Ekonomi*, 20(2), 64–73. Retrieved from <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUM EKONOMI>
- Wahyudi, A. U. dan D. (2016). Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Lingkar Widayaiswara, Edisi. 3 N(2)*, 1–13. <https://doi.org/10.1016/S0040->

4020(00)00446-4

- Wardani, D. K., & Asis, M. R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program SAMSAT CORNER Terhadap Kepatuhan. *Akuntansi Dewantara*, 1(2), 106–116. Retrieved from <http://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansidewantara/article/view/1488/pdf>
- Wardani, D. K., & Rumiyaun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>
- Wulandari, T. N. (2015). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM dengan Preferensi Resiko sebagai Variabel Intervening*.
- Z.A, F. D. P. Z., & Mayowan, Y. (2016). Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 10(1), 1–8.
- Zahidah, C. (2010). Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kepatuhan Dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kewajiban Perpajakan Pengusaha Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Wilayah Jakarta Selatan. *Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 1–120.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI

Gedung L1, Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229

Telepon +6224-8508015, Faksimile +6224-8508015

Laman: <http://fe.unnes.ac.id>, surel: fe@mail.unnes.ac.id

Nomor : B/5073/UN37.1.7/LT/2020 11 Mei 2020
Hal : Izin Penelitian

Yth. (terlampir)

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Triska Rahmawati
NIM : 7101416309
Program Studi : Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Akuntansi), S1
Semester : Genap
Tahun akademik : 2019/2020
Judul : PENGARUH LITERASI PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK MELALUI KESADARAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI KASUS PADA UMKM KOTA SEMARANG)

Kami mohon yang bersangkutan diberikan izin untuk melaksanakan penelitian skripsi di perusahaan atau instansi yang Saudara pimpin, dengan alokasi waktu 18 Mei 2020 s.d selesai.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.



a.n. Dekan FE
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Dr. Kardoyo, M.Pd.
NIP 196205291986011001

Tembusan:
Dekan FE;
Universitas Negeri Semarang



Nomor Aenda Surat : 881 606 830 9

Sistem Informasi Surat Dinas - UNNES (2020-05-12 9:33:17)

Lampiran 2. Kisi-Kisi Uji Coba Instrumen Penelitian

Kisi-Kisi Uji Coba Instrumen Penelitian

Pengaruh Literasi Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Melalui Kesadaran Pajak sebagai Variabel *Intervening* (Studi Kasus Pada UMKM di Kota Semarang)

| No. | Variabel | Indikator | Nomor Soal | Jumlah Soal |
|-----|-----------------|--|------------|-------------|
| 1. | Kepatuhan Pajak | 1. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara sukarela ke Kantor Pelayanan Pajak | 1,2 | 2 |
| | | 2. Melakukan pembukuan atau pencatatan | 3,4 | 2 |
| | | 3. Menghitung pajak terutang dengan benar dan melakukan pembayaran tepat waktu | 5,6,7,8 | 4 |
| | | 4. Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai peraturan perundang-undangan dan melaporkan tepat waktu. | 9,10,11,12 | 4 |
| 2. | Literasi Pajak | 1. Wajib pajak mengetahui fungsi dari pajak yang dibayar | 13,14,15 | 3 |
| | | 2. Wajib pajak mengetahui bahwa membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara | 16,17,18 | 3 |
| | | 3. Wajib pajak mengetahui perubahan peraturan perpajakan yang berlaku | 19,20,21 | 3 |
| | | 4. Wajib pajak mengerti bagaimana cara menghitung pajak yang harus dibayar | 22,23,24 | 3 |
| | | 5. Wajib Pajak membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku | 25,26,27 | 3 |

| | | | | |
|----|-------------------|--|---|--------------------------------------|
| | | 6. Apabila wajib pajak tidak membayar maka akan mendapat sanksi | 28,29,30 | 3 |
| 3. | Pemeriksaan Pajak | 1. Kualitas sumber daya (Pemeriksa) 2. Integritas pemeriksa 3. Rasio pemeriksa dan wajib pajak 4. Teknologi Informasi 5. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatancatatan dan dokumendokumen 6. Melakukan informasi kepada pihak ketiga 7. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak 8. Melakukan sidang Penutup (Closing Conference) | 31,32 33,34 35,36 37 38,39,40 41 42 43 | 2 2 2 1 3 1 1 1 |
| 4. | Sanksi Pajak | 1. Sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya 2. Sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada wajib pajak yang melanggar 3. Sanksi diberikan sesuai pelanggaran yang dilakukan 4. Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku | 44,45,46 47,48,49 50,51,52 53,54,55,56 | 3 3 3 4 |
| 5. | Kesadaran Pajak | 1. Kesadaran adanya hak dan kewajiban memenuhi kewajiban pajak 2. Kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara dan daerah | 57 58,59,60,61 | 1 4 |

| | | | | |
|--------------------|--|--|-------------|-----------|
| | | 3. Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak sukarela | 62,63,64,65 | 4 |
| Jumlah Soal | | | | 65 |

Lampiran 3. Uji Coba Instrumen Penilaian



Uji Coba Instrumen Penelitian

**Pengaruh Literasi Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap
Kepatuhan Pajak Melalui Kesadaran Pajak Sebagai Variabel Intervening
(Studi Kasus pada UMKM Kota Semarang)**

Oleh

Triska Rahmawati

NIM: 7101416309

**JURUSAN PENDIDIKAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2020**

KATA PENGANTAR

Kepada: Yth. Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang
di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Pada kesempatan ini, dimohon kesediaan Saudara/i untuk menjawab pertanyaan dalam kuesioner penelitian ini dengan sebaik-baiknya. Jawaban yang baik adalah jawaban yang sesuai dengan keadaan diri Saudara/i yang sebenarnya. Semua jawaban dan identitas Saudara/i akan dirahasiakan dan hanya akan dipakai untuk keperluan penelitian sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Peneliti

Triska Rahmawati
NIM 7101416309

DATA RESPONDEN

Nama :

Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan (Coret yang tidak perlu)

Nama Usaha :

Lama Usaha :

a. < 1 Tahun

c. 6-10 Tahun

b. 1-5 Tahun

d. > 10 Tahun

Pernah mendapatkan sosialisasi/pelatihan terkait pajak ?

a. Ya

b. Tidak

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER**1. KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

Berikan checklist (✓) pada salah satu kolom yang sesuai dengan jawaban bapak/ibu.

Keterangan:

SS = Sangat Setuju TS = Tidak Setuju
 S = Setuju STS = Sangat Tidak Setuju
 KS = Kurang Setuju

| No | Pertanyaan | STS | TS | KS | S | SS |
|-----|--|-----|----|----|---|----|
| 1. | Bapak/ibu mau mendaftarkan diri sebagai wajib pajak ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) | | | | | |
| 2. | Wajib Pajak wajib memiliki NPWP | | | | | |
| 3. | Bapak/ibu selalu melakukan pembukuan atau pencatatan keuangan dengan benar | | | | | |
| 4. | Sebagai wajib pajak, bapak/ibu selalu melakukan perhitungan pajak dengan benar dan sesuai ketentuan yang berlaku | | | | | |
| 5. | Sebagai wajib pajak, bapak/ibu selalu membayar pajak terutang tepat pada waktunya | | | | | |
| 6. | Bapak/ibu tidak pernah memiliki tunggakan pajak | | | | | |
| 7. | Bapak/ibu bersedia memenuhi kewajiban atas tunggakan pajak selama ini, jika ada | | | | | |
| 8. | Bapak/ibu selalu mengisi formulir pajak dengan benar | | | | | |
| 9. | Bapak/ibu selalu menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah diisi dengan tepat waktu | | | | | |
| 10. | Bapak/ibu selalu membantu kelancaran proses pemeriksaan pajak dengan menyediakan semua data yang diperlukan bila ada pemeriksaan | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|
| 11. | Bapak/ibu tidak pernah mendapat sanksi karena melakukan pelanggaran pajak | | | | | |
| 12. | Bapak/ibu belum pernah mendapatkan surat teguran karena tidak melaporkan SPT tepat pada waktunya | | | | | |

2. LITERASI PAJAK

Berikan checklist (✓) pada salah satu kolom yang sesuai dengan jawaban bapak/ibu.

Keterangan:

SM = Sangat Memahami/Mengerti

M = Memahami/Mengerti

KM = Kurang Memahami/Mengerti

TM = Tidak Memahami/Mengerti

STM = Sangat Tidak Memahami/Mengerti

| No | Pertanyaan | SM | M | KM | TM | STM |
|----|---|----|---|----|----|-----|
| 1. | Fungsi dan manfaat dari pajak yang bapak/ibu bayarkan digunakan untuk membiayai belanja Negara | | | | | |
| 2. | Selain digunakan untuk membiayai belanja negara, pajak juga berfungsi untuk mengatur atau membuat kebijakan | | | | | |
| 3. | Sebagai wajib pajak, bapak/ibu paham prosedur untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memperoleh NPWP melalui Kantor pelayanan Pajak (KPP) maupun melalui <i>e-registration</i> dari <i>website</i> pajak | | | | | |
| 4. | Bapak/ibu memahami bahwa wajib pajak harus melakukan pembukuan | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|
| | untuk mempermudah perhitungan pajak | | | | | |
| 5. | Sebagai wajib pajak, bapak/ibu memahami penghasilan apa saja yang termasuk objek pajak dan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak | | | | | |
| 6. | Bapak/ibu memahami bahwa biaya untuk memperoleh, menagih atau memelihara penghasilan, iuran dana pensiun, pengeluaran untuk pajak daerah dan retribusi dapat mengurangi penghasilan | | | | | |
| 7 | Bapak/ibu memahami bahwa pengambilan pribadi (<i>prive</i>) tidak dapat diakui sebagai biaya dan mengurangi penghasilan | | | | | |
| 8 | Bapak/ibu memahami tentang pajak final dan penghasilan apa saja yang dikenai pajak final | | | | | |
| 9 | Sebagai wajib pajak, bapak/ibu mengetahui peraturan perpajakan UMKM yang berlaku saat ini adalah PP No. 23 Tahun 2018 | | | | | |
| 10 | Sebagai wajib pajak, bapak/ibu mengetahui tarif pajak bagi UMKM yang berlaku saat ini adalah sebesar 0,5% dari peredaran bruto (omzet) | | | | | |
| 11 | Bapak/ibu memahami bahwa pengetahuan mengenai pajak UMKM dapat dengan mudah didapatkan melalui media masa (TV, radio), spanduk atau reklame, maupun sosialisasi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) | | | | | |
| 12 | Sebagai wajib pajak, bapak/ibu memahami perbedaan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) | | | | | |
| 13 | Sebagai wajib pajak, bapak/ibu memahami cara mengajukan | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|
| | permohonan angsuran atau penundaan pembayaran pajak serta cara mengajukan keberatan, banding dan peninjauan kembali atas pajak | | | | | |
| 14 | Bapak/ibu sebagai wajib pajak memahami dan dapat menghitung pajak terutang dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku | | | | | |
| 15 | Sebagai wajib pajak, bapak/ibu memahami cara membayar pajak dengan benar sesuai peraturan yang berlaku baik melalui kantor pos atau bank maupun secara online melalui sistem <i>e-billing</i> | | | | | |
| 16 | Sebagai wajib pajak, Bapak/ibu memahami dan dapat mengisi dan melaporkan SPT dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku baik melalui KPP atau secara online melalui <i>e-filing</i> | | | | | |
| 17 | Pajak bersifat memaksa, sehingga apabila wajib pajak melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi | | | | | |
| 18 | Sebagai wajib pajak, bapak/ibu mengetahui bahwa sanksi yang akan dikenakan pada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana | | | | | |

3. PEMERIKSAAN PAJAK

Berikan checklist (✓) pada salah satu kolom yang sesuai dengan jawaban bapak/ibu.

Keterangan:

SS = Sangat Setuju

TS = Tidak Setuju

S = Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

KS = Kurang Setuju

| No | Pertanyaan | STS | TS | KS | S | SS |
|----|--|-----|----|----|---|----|
| 1 | Pemeriksaan khusus dilaksanakan apabila adanya dugaan melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan. | | | | | |
| 2 | Pemeriksa Pajak memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan pada saat melakukan Pemeriksaan. | | | | | |
| 3 | Petugas pemeriksaan bekerja secara transparan,yaitu bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. | | | | | |
| 4 | Jumlah fungsional Pemeriksa Pajak dengan Jumlah Wajib Pajak harus seimbang. | | | | | |
| 5 | Pemeriksa lapangan dengan mendatangi ke tempat Wajib Pajak dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan. | | | | | |
| 6 | Pemeriksa Pajak menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan. | | | | | |
| 7 | Pemeriksa Pajak memberikan bukti pemeriksaan secara tertulis perihal pemeriksaan buku, catatan, dokumen dan/atau data-data lain. | | | | | |
| 8 | Pemeriksa mempelajari berkas Wajib Pajak atau data lain yang tersedia. | | | | | |
| 9 | Pemeriksa mencari kebenaran dan kelengkapan data atau informasi dari Wajib Pajak dengan bukti-bukti yang diperoleh dari pihak ketiga. | | | | | |
| 10 | Pemeriksa Pajak memberitahukan secara tertulis tentang hasil pemeriksaan. | | | | | |
| 11 | Pemeriksa Pajak memberikan kesempatan Wajib Pajak untuk memberikan tanggapan dan | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|
| | penjelasan atas temuan Pemeriksaan. | | | | | |
| 12 | Wajib Pajak yang diperiksa dapat mengajukan keberatan. | | | | | |
| 13 | Terhadap temuan dalam pemeriksaan lengkap yang seluruhnya disetujui Wajib Pajak dilakukan pembahasan akhir pemeriksaan. | | | | | |
| 14 | Setiap pemeriksaan selalu diakhiri pertanggungjawaban dengan menyusun laporan pemeriksaan. | | | | | |

4. SANKSI PAJAK

Berikan checklist (✓) pada salah satu kolom yang sesuai dengan jawaban bapak/ibu.

Keterangan:

SS = Sangat Setuju

TS = Tidak Setuju

S = Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

KS = Kurang Setuju

| No | Pertanyaan | STS | TS | KS | S | SS |
|----|--|-----|----|----|---|----|
| 1 | Sanksi pajak sangat diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya | | | | | |
| 2 | Sanksi pajak yang berat dan dapat menimbulkan efek jera merupakan salah satu alat untuk mendidik wajib pajak | | | | | |
| 3 | Sanksi pajak harus dikenakan kepada semua wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan tanpa adanya toleransi | | | | | |
| 4 | Sanksi pajak yang ada telah diterapkan secara tegas kepada para wajib pajak yang melakukan pelanggaran | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|
| 5 | Pengenaan sanksi pajak harus disesuaikan dengan pelanggaran yang telah dilakukan oleh wajib pajak | | | | | |
| 6 | Bapak/ibu setuju apabila pelanggaran pajak dalam bentuk yang sama harus dikenakan sanksi yang sama pula | | | | | |
| 7 | Bapak/ibu setuju apabila setiap orang yang dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang isinya tidak benar sehingga menimbulkan kerugian negara dikenai sanksi pidana | | | | | |
| 8 | Bapak/ibu setuju apabila sanksi administrasi berupa bunga 2% dikenakan atas pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dan angsuran atau penundaan pembayaran pajak | | | | | |
| 9 | Bapak/ibu setuju apabila sanksi administrasi berupa denda 2% dari dasar pengenaan pajak dikenakan terhadap pengusaha yang tidak membuat faktur pajak atau tidak melaporkan faktur pajak | | | | | |
| 10 | Bapak/ibu setuju apabila sanksi kenaikan 50% dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak melakukan pembukuan | | | | | |
| 11 | Sanksi administrasi dan sanksi pidana mendorong bapak/ibu untuk membayar dan melaporkan pajak tepat waktu | | | | | |
| 12 | Sanksi pajak harus di terapkan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak dapat dinegosiasi | | | | | |
| 13 | Bapak/ibu belum pernah terkena sanksi karena melakukan penyimpangan pajak | | | | | |

5. KESADARAN PAJAK

Berikan checklist (✓) pada salah satu kolom yang sesuai dengan jawaban bapak/ibu.

Keterangan:

SS = Sangat Setuju

TS = Tidak Setuju

S = Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

KS = Kurang Setuju

| No | Pertanyaan | STS | TS | KS | S | SS |
|----|--|-----|----|----|---|----|
| 1 | Bapak/Ibu membayar pajak karena dengan pajak pemerintah dapat membuka kesempatan kerja. Sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat. | | | | | |
| 2 | Bapak/Ibu membayar pajak karena dapat menunjang pembangunan negara | | | | | |
| 3 | Bapak/Ibu tidak pernah melakukan kecurangan dengan mengurangi jumlah pajak, karena hal tersebut sangat merugikan negara. | | | | | |
| 4 | Bapak/ibu sadar bahwa pajak yang dibayarkan harus sesuai dengan jumlah pajak yang terutang agar tidak merugikan Negara | | | | | |
| 5 | Bapak/ibu sadar untuk tidak memanipulasi jumlah pajak yang harus dibayar karena akan sangat merugikan negara | | | | | |
| 6 | Bapak/Ibu selalu jujur dalam melaporkan jumlah pajak dan melakukan sendiri perhitungan SPT dengan benar. | | | | | |
| 7 | Bapak/Ibu dengan senang hati selalu melaksanakan kewajiban perpajakan. | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 8 | Bagaimanapun kondisi keuangan Bapak/ibu, Bapak/ibu sadar untuk tetap membayar pajak sesuai kondisi penghasilan usaha yang sebenarnya dan sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak merugikan Negara | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|

TERIMA KASIH

Lampiran 4. Tabulasi Angket Uji Coba
Variabel Kepatuhan Pajak

| Kode Res | | | | | | | | | | | | | Total |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| RU-01 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 |
| RU-02 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 47 |
| RU-03 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 45 |
| RU-04 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 56 |
| RU-05 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 |
| RU-06 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 50 |
| RU-07 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 52 |
| RU-08 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 58 |
| RU-09 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 49 |
| RU-10 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 40 |
| RU-11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| RU-12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 57 |
| RU-13 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 53 |
| RU-14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 48 |
| RU-15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 39 |
| RU-16 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 42 |
| RU-17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| RU-18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 |
| RU-19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| RU-20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| RU-21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 56 |
| RU-22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| RU-23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 44 |
| RU-24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 |
| RU-25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 46 |
| RU-26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 58 |
| RU-27 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| RU-28 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 53 |
| RU-29 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 46 |
| RU-30 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 45 |

Sumber: Data primer diolah, 2020

Variabel Literasi Pajak

| Kode Res | Literasi Pajak (X1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total |
|----------|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| RU-01 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72 |
| RU-02 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 62 |
| RU-03 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 77 |
| RU-04 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 63 |
| RU-05 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 75 |
| RU-06 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72 |
| RU-07 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 65 |
| RU-08 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 89 |
| RU-09 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72 |
| RU-10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 60 |
| RU-11 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 78 |
| RU-12 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 67 |
| RU-13 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 68 |
| RU-14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 66 |
| RU-15 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 60 |
| RU-16 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 58 |
| RU-17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 90 |
| RU-18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72 |
| RU-19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 90 |
| RU-20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 90 |
| RU-21 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 80 |
| RU-22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 90 |
| RU-23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 63 |
| RU-24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 |
| RU-25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72 |
| RU-26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 90 |
| RU-27 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 66 |
| RU-28 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 72 |
| RU-29 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 69 |
| RU-30 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 |

Sumber: Data primer diolah, 2020

Variabel Pemeriksaan Pajak

| Kode Res | Pemeriksaan Pajak (X2) | | | | | | | | | | | | | | Total |
|----------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| RU-01 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 56 |
| RU-02 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 47 |
| RU-03 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 57 |
| RU-04 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 44 |
| RU-05 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 57 |
| RU-06 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 56 |
| RU-07 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 63 |
| RU-08 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 67 |
| RU-09 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 56 |
| RU-10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 63 |
| RU-11 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 62 |
| RU-12 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 63 |
| RU-13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 56 |
| RU-14 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 61 |
| RU-15 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 46 |
| RU-16 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 55 |
| RU-17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 70 |
| RU-18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 56 |
| RU-19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 70 |
| RU-20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 70 |
| RU-21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 70 |
| RU-22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 70 |
| RU-23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 49 |
| RU-24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 42 |
| RU-25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 56 |
| RU-26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 70 |
| RU-27 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 56 |
| RU-28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 57 |
| RU-29 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 69 |
| RU-30 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 58 |

Sumber: Data primer diolah, 2020

Variabel Sanksi Pajak

| Kode Res | Sanksi Pajak (X3) | | | | | | | | | | | | | Total |
|----------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| RU-01 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 52 |
| RU-02 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 45 |
| RU-03 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 52 |
| RU-04 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 39 |
| RU-05 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 52 |
| RU-06 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 52 |
| RU-07 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 59 |
| RU-08 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 60 |
| RU-09 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 50 |
| RU-10 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 56 |
| RU-11 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 62 |
| RU-12 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 54 |
| RU-13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 51 |
| RU-14 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 55 |
| RU-15 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 45 |
| RU-16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 50 |
| RU-17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 65 |
| RU-18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 52 |
| RU-19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 65 |
| RU-20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 65 |
| RU-21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 57 |
| RU-22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 65 |
| RU-23 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 51 |
| RU-24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 39 |
| RU-25 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 47 |
| RU-26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 65 |
| RU-27 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 59 |
| RU-28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 63 |
| RU-29 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 57 |
| RU-30 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 30 |

Sumber: Data primer diolah, 2020

Variabel Kesadaran Pajak

| Kode Res | Kesadaran Pajak (Z) | | | | | | | | Total |
|----------|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| RU-01 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 |
| RU-02 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 |
| RU-03 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| RU-04 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 |
| RU-05 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 38 |
| RU-06 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 |
| RU-07 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 35 |
| RU-08 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 |
| RU-09 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 32 |
| RU-10 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 34 |
| RU-11 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 37 |
| RU-12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 39 |
| RU-13 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30 |
| RU-14 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| RU-15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 25 |
| RU-16 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 37 |
| RU-17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 |
| RU-18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 |
| RU-19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 |
| RU-20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 |
| RU-21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 |
| RU-22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 |
| RU-23 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 37 |
| RU-24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 |
| RU-25 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 25 |
| RU-26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 |
| RU-27 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 |
| RU-28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 |
| RU-29 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 37 |
| RU-30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 |

Sumber: Data primer diolah, 2020

Lampiran 5. Hasil Uji Validitas
Variabel Kepatuhan Pajak (Y)

Correlations

| | KP1 | KP2 | KP3 | KP4 | KP5 | KP6 | KP7 | KP8 | KP9 | KP10 | KP11 | KP12 | Total |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| KP1 Pearson Correlation | 1 | ,498** | ,388* | ,378* | ,390* | ,109 | ,426** | ,375* | ,262 | ,341* | ,207 | ,078 | ,493** |
| KP1 Sig. (1-tailed) | | ,003 | ,017 | ,020 | ,016 | ,282 | ,009 | ,021 | ,081 | ,032 | ,136 | ,341 | ,003 |
| KP1 N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| KP2 Pearson Correlation | ,498** | 1 | ,440** | ,536** | ,568** | ,363* | ,773** | ,613** | ,570** | ,687** | ,532** | ,377* | ,770** |
| KP2 Sig. (1-tailed) | ,003 | | ,008 | ,001 | ,001 | ,024 | ,000 | ,000 | ,001 | ,000 | ,001 | ,020 | ,000 |
| KP2 N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| KP3 Pearson Correlation | ,388* | ,440** | 1 | ,852** | ,791** | ,346* | ,583** | ,703** | ,713** | ,698** | ,477** | ,191 | ,784** |
| KP3 Sig. (1-tailed) | ,017 | ,008 | | ,000 | ,000 | ,030 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,004 | ,156 | ,000 |
| KP3 N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| KP4 Pearson Correlation | ,378* | ,536** | ,852** | 1 | ,829** | ,429** | ,623** | ,807** | ,751** | ,671** | ,328* | ,313* | ,823** |
| KP4 Sig. (1-tailed) | ,020 | ,001 | ,000 | | ,000 | ,009 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,038 | ,046 | ,000 |
| KP4 N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| KP5 Pearson Correlation | ,390* | ,568** | ,791** | ,829** | 1 | ,530** | ,744** | ,820** | ,683** | ,671** | ,565** | ,362* | ,883** |
| KP5 Sig. (1-tailed) | ,016 | ,001 | ,000 | ,000 | | ,001 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,001 | ,025 | ,000 |
| KP5 N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| KP6 Pearson Correlation | ,109 | ,363* | ,346* | ,429** | ,530** | 1 | ,561** | ,540** | ,467** | ,454** | ,300 | ,295 | ,621** |
| KP6 Sig. (1-tailed) | ,282 | ,024 | ,030 | ,009 | ,001 | | ,001 | ,001 | ,005 | ,006 | ,054 | ,057 | ,000 |
| KP6 N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| KP7 Pearson Correlation | ,426** | ,773** | ,583** | ,623** | ,744** | ,561** | 1 | ,712** | ,650** | ,701** | ,374* | ,336* | ,824** |
| KP7 Sig. (1-tailed) | ,009 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,001 | | ,000 | ,000 | ,000 | ,021 | ,035 | ,000 |
| KP7 N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| KP8 Pearson Correlation | ,375* | ,613** | ,703** | ,807** | ,820** | ,540** | ,712** | 1 | ,712** | ,689** | ,427** | ,266 | ,840** |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Sig. (1-tailed) | ,021 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,001 | ,000 | | ,000 | ,000 | ,009 | ,078 | ,000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| KP9 | Pearson Correlation | ,262 | ,570** | ,713** | ,751** | ,683** | ,467** | ,650** | ,712** | 1 | ,852** | ,623** | ,380* | ,845** |
| | Sig. (1-tailed) | ,081 | ,001 | ,000 | ,000 | ,000 | ,005 | ,000 | ,000 | | ,000 | ,000 | ,019 | ,000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| KP10 | Pearson Correlation | ,341* | ,687** | ,698** | ,671** | ,671** | ,454** | ,701** | ,689** | ,852** | 1 | ,672** | ,409* | ,867** |
| | Sig. (1-tailed) | ,032 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,006 | ,000 | ,000 | ,000 | | ,000 | ,012 | ,000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| KP11 | Pearson Correlation | ,207 | ,532** | ,477** | ,328* | ,565** | ,300 | ,374* | ,427** | ,623** | ,672** | 1 | ,388* | ,672** |
| | Sig. (1-tailed) | ,136 | ,001 | ,004 | ,038 | ,001 | ,054 | ,021 | ,009 | ,000 | ,000 | | ,017 | ,000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| KP12 | Pearson Correlation | ,078 | ,377* | ,191 | ,313* | ,362* | ,295 | ,336* | ,266 | ,380* | ,409* | ,388* | 1 | ,528** |
| | Sig. (1-tailed) | ,341 | ,020 | ,156 | ,046 | ,025 | ,057 | ,035 | ,078 | ,019 | ,012 | ,017 | | ,001 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Total | Pearson Correlation | ,493** | ,770** | ,784** | ,823** | ,883** | ,621** | ,824** | ,840** | ,845** | ,867** | ,672** | ,528** | 1 |
| | Sig. (1-tailed) | ,003 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,001 | |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|----|
| LP18 | Pearson | ,423* | ,344* | ,509* | ,311* | ,380* | ,539* | ,358* | ,695* | ,560* | ,534* | ,619* | ,683* | ,519* | ,561* | ,441* | ,630* | ,758* | 1 | ,734** | |
| | Correlation | * | | * | | | * | | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | | | |
| | Sig. (1-tailed) | ,010 | ,031 | ,002 | ,047 | ,019 | ,001 | ,026 | ,000 | ,001 | ,001 | ,000 | ,000 | ,000 | ,002 | ,001 | ,007 | ,000 | ,000 | ,000 | |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| TOTA L | Pearson | ,667* | ,461* | ,695* | ,597* | ,677* | ,799* | ,796* | ,764* | ,738* | ,890* | ,806* | ,859* | ,798* | ,830* | ,825* | ,821* | ,648* | ,734* | 1 | |
| | Correlation | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| | Sig. (1-tailed) | ,000 | ,005 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | |
| N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PP12 | Pearson Correlation | ,463** | ,402* | ,599** | ,598** | ,618** | ,730** | ,690** | ,637** | ,809** | ,838** | ,914** | 1 | ,820** | ,752** | ,866** |
| | Sig. (1-tailed) | ,005 | ,014 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | | ,000 | ,000 | ,000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| PP13 | Pearson Correlation | ,483** | ,389* | ,490** | ,392* | ,541** | ,759** | ,719** | ,613** | ,748** | ,711** | ,814** | ,820** | 1 | ,679** | ,800** |
| | Sig. (1-tailed) | ,003 | ,017 | ,003 | ,016 | ,001 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | | ,000 | ,000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| PP14 | Pearson Correlation | ,730** | ,695** | ,683** | ,812** | ,840** | ,830** | ,785** | ,527** | ,723** | ,829** | ,704** | ,752** | ,679** | 1 | ,917** |
| | Sig. (1-tailed) | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,001 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | | ,000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| TOTAL | Pearson Correlation | ,747** | ,706** | ,780** | ,811** | ,811** | ,889** | ,840** | ,747** | ,901** | ,902** | ,812** | ,866** | ,800** | ,917** | 1 |
| | Sig. (1-tailed) | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| SP12 | Pearson Correlation | ,609** | ,640** | ,687** | ,700** | ,520** | ,443** | ,476** | ,417* | ,659** | ,507** | ,688** | 1 | ,759** | ,783** |
| | Sig. (1-tailed) | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,002 | ,007 | ,004 | ,011 | ,000 | ,002 | ,000 | | ,000 | ,000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| SP13 | Pearson Correlation | ,512** | ,579** | ,522** | ,570** | ,600** | ,417* | ,452** | ,180 | ,526** | ,572** | ,498** | ,759** | 1 | ,695** |
| | Sig. (1-tailed) | ,002 | ,000 | ,002 | ,001 | ,000 | ,011 | ,006 | ,170 | ,001 | ,000 | ,003 | ,000 | | ,000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| TOTAL | Pearson Correlation | ,803** | ,852** | ,901** | ,783** | ,819** | ,817** | ,844** | ,707** | ,827** | ,842** | ,849** | ,783** | ,695** | 1 |
| | Sig. (1-tailed) | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

Variabel Kesadaran Pajak (Z)

Correlations

| | | KSP1 | KSP2 | KSP3 | KSP4 | KSP5 | KSP6 | KSP7 | KSP8 | JUMLAH |
|------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| KSP1 | Pearson Correlation | 1 | ,812** | ,534** | ,449** | ,404* | ,506** | ,566** | ,643** | ,718** |
| | Sig. (1-tailed) | | ,000 | ,001 | ,006 | ,013 | ,002 | ,001 | ,000 | ,000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| KSP2 | Pearson Correlation | ,812** | 1 | ,734** | ,608** | ,481** | ,551** | ,624** | ,628** | ,799** |
| | Sig. (1-tailed) | ,000 | | ,000 | ,000 | ,004 | ,001 | ,000 | ,000 | ,000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| KSP3 | Pearson Correlation | ,534** | ,734** | 1 | ,818** | ,795** | ,720** | ,859** | ,692** | ,905** |
| | Sig. (1-tailed) | ,001 | ,000 | | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| KSP4 | Pearson Correlation | ,449** | ,608** | ,818** | 1 | ,776** | ,920** | ,833** | ,721** | ,900** |
| | Sig. (1-tailed) | ,006 | ,000 | ,000 | | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| KSP5 | Pearson Correlation | ,404* | ,481** | ,795** | ,776** | 1 | ,730** | ,871** | ,726** | ,849** |
| | Sig. (1-tailed) | ,013 | ,004 | ,000 | ,000 | | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| KSP6 | Pearson Correlation | ,506** | ,551** | ,720** | ,920** | ,730** | 1 | ,784** | ,732** | ,871** |
| | Sig. (1-tailed) | ,002 | ,001 | ,000 | ,000 | ,000 | | ,000 | ,000 | ,000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| KSP7 | Pearson Correlation | ,566** | ,624** | ,859** | ,833** | ,871** | ,784** | 1 | ,739** | ,920** |
| | Sig. (1-tailed) | ,001 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | | ,000 | ,000 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | Pearson Correlation | ,643** | ,628** | ,692** | ,721** | ,726** | ,732** | ,739** | 1 | ,856** |
| KSP8 | Sig. (1-tailed) | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | | ,000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | Pearson Correlation | ,718** | ,799** | ,905** | ,900** | ,849** | ,871** | ,920** | ,856** | 1 |
| JUMLAH | Sig. (1-tailed) | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | ,000 | |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

Lampiran 6. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Kepatuhan Pajak (Y)

| Reliability Statistics | |
|------------------------|------------|
| Cronbach's Alpha | N of Items |
| ,913 | 12 |

Variabel Literasi Pajak (X1)

| Reliability Statistics | |
|------------------------|------------|
| Cronbach's Alpha | N of Items |
| ,951 | 18 |

Variabel Pemeriksaan Pajak (X2)

| Reliability Statistics | |
|------------------------|------------|
| Cronbach's Alpha | N of Items |
| ,963 | 14 |

Variabel Sanksi Pajak (X3)

| Reliability Statistics | |
|------------------------|------------|
| Cronbach's Alpha | N of Items |
| ,954 | 13 |

Variabel Kesadaran Pajak (Z)

| Reliability Statistics | |
|------------------------|------------|
| Cronbach's Alpha | N of Items |
| ,945 | 8 |

Lampiran 7. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian
Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

Pengaruh Literasi Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Melalui Kesadaran Pajak sebagai Variabel *Intervening* (Studi Kasus Pada UMKM di Kota Semarang)

| No. | Variabel | Indikator | Nomor Soal | Jumlah Soal |
|-----|-----------------|--|------------|-------------|
| 1. | Kepatuhan Pajak | 5. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara sukarela ke Kantor Pelayanan Pajak | 1,2 | 2 |
| | | 6. Melakukan pembukuan atau pencatatan | 3,4 | 2 |
| | | 7. Menghitung pajak terutang dengan benar dan melakukan pembayaran tepat waktu | 5,6,7,8 | 4 |
| | | 8. Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai peraturan perundang-undangan dan melaporkan tepat waktu. | 9,10,11,12 | 4 |
| 2. | Literasi Pajak | 7. Wajib pajak mengetahui fungsi dari pajak yang dibayar | 13,14,15 | 3 |
| | | 8. Wajib pajak mengetahui bahwa membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara | 16,17,18 | 3 |
| | | 9. Wajib pajak mengetahui perubahan peraturan perpajakan yang berlaku | 19,20,21 | 3 |
| | | 10. Wajib pajak mengerti bagaimana cara menghitung pajak yang harus dibayar | 22,23,24 | 3 |
| | | 11. Wajib Pajak membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku | 25,26,27 | 3 |

| | | | | |
|----|-------------------|---|---|--------------------------------------|
| | | 12. Apabila wajib pajak tidak membayar maka akan mendapat sanksi | 28,29,30 | 3 |
| 3. | Pemeriksaan Pajak | 9. Kualitas sumber daya (Pemeriksa) 10. Integritas pemeriksa 11. Rasio pemeriksa dan wajib pajak 12. Teknologi Informasi 13. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatancatatan dan dokumendokumen 14. Melakukan informasi kepada pihak ketiga 15. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak 16. Melakukan sidang Penutup (Closing Conference) | 31,32 33,34 35,36 37 38,39,40 41 42 43 | 2 2 2 1 3 1 1 1 |
| 4. | Sanksi Pajak | 5. Sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya 6. Sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada wajib pajak yang melanggar 7. Sanksi diberikan sesuai pelanggaran yang dilakukan 8. Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku | 44,45,46 47,48,49 50,51,52 53,54,55,56 | 3 3 3 4 |
| 5. | Kesadaran Pajak | 4. Kesadaran adanya hak dan kewajiban memenuhi kewajiban pajak 5. Kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak | 57 | 1 |

| | | | | |
|--------------------|--|--|-------------|-----------|
| | | untuk pembiayaan negara dan daerah | 58,59,60,61 | 4 |
| | | 6. Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak sukarela | 62,63,64,65 | 4 |
| Jumlah Soal | | | | 65 |

Lampiran 8. Instrumen Penelitian



Instrumen Penelitian

**Pengaruh Literasi Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap
Kepatuhan Pajak Melalui Kesadaran Pajak Sebagai Variabel Intervening
(Studi Kasus pada UMKM Kota Semarang)**

Oleh

Triska Rahmawati

NIM: 7101416309

JURUSAN PENDIDIKAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2020

KATA PENGANTAR

Kepada: Yth. Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang

di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Pada kesempatan ini, dimohon kesediaan Saudara/i untuk menjawab pertanyaan dalam kuesioner penelitian ini dengan sebaik-baiknya. Jawaban yang baik adalah jawaban yang sesuai dengan keadaan diri Saudara/i yang sebenarnya. Semua jawaban dan identitas Saudara/i akan dirahasiakan dan hanya akan dipakai untuk keperluan penelitian sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Peneliti

Triska Rahmawati
NIM 7101416309

DATA RESPONDEN

Nama :

Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan (Coret yang tidak perlu)

Nama Usaha :

Lama Usaha :

c. < 1 Tahun

c. 6-10 Tahun

d. 1-5 Tahun

d. > 10 Tahun

Pernah mendapatkan sosialisasi/pelatihan terkait pajak ?

b. Ya

b. Tidak

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER**1. KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

Berikan checklist (✓) pada salah satu kolom yang sesuai dengan jawaban bapak/ibu.

Keterangan:

SS = Sangat Setuju **TS** = Tidak Setuju

S = Setuju **STS** = Sangat Tidak Setuju

KS = Kurang Setuju

| No | Pertanyaan | STS | TS | KS | S | SS |
|-----|--|-----|----|----|---|----|
| 1. | Bapak/ibu mau mendaftarkan diri sebagai wajib pajak ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) | | | | | |
| 2. | Wajib Pajak wajib memiliki NPWP | | | | | |
| 3. | Bapak/ibu selalu melakukan pembukuan atau pencatatan keuangan dengan benar | | | | | |
| 4. | Sebagai wajib pajak, bapak/ibu selalu melakukan perhitungan pajak dengan benar dan sesuai ketentuan yang berlaku | | | | | |
| 5. | Sebagai wajib pajak, bapak/ibu selalu membayar pajak terutang tepat pada waktunya | | | | | |
| 6. | Bapak/ibu tidak pernah memiliki tunggakan pajak | | | | | |
| 7. | Bapak/ibu bersedia memenuhi kewajiban atas tunggakan pajak selama ini, jika ada | | | | | |
| 8. | Bapak/ibu selalu mengisi formulir pajak dengan benar | | | | | |
| 9. | Bapak/ibu selalu menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah diisi dengan tepat waktu | | | | | |
| 10. | Bapak/ibu selalu membantu kelancaran proses pemeriksaan pajak dengan menyediakan semua data yang diperlukan bila ada pemeriksaan | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|
| 11. | Bapak/ibu tidak pernah mendapat sanksi karena melakukan pelanggaran pajak | | | | | |
| 12. | Bapak/ibu belum pernah mendapatkan surat teguran karena tidak melaporkan SPT tepat pada waktunya | | | | | |

2. LITERASI PAJAK

Berikan checklist (✓) pada salah satu kolom yang sesuai dengan jawaban bapak/ibu.

Keterangan:

SM = Sangat Memahami

TM = Tidak Memahami

M = Memahami

STM = Sangat Tidak Memahami

KM = Kurang Memahami

| No | Pertanyaan | SM | M | KM | TM | STM |
|----|---|----|---|----|----|-----|
| 1. | Fungsi dan manfaat dari pajak yang bapak/ibu bayarkan digunakan untuk membiayai belanja Negara | | | | | |
| 2. | Selain digunakan untuk membiayai belanja negara, pajak juga berfungsi untuk mengatur atau membuat kebijakan | | | | | |
| 3. | Sebagai wajib pajak, bapak/ibu paham prosedur untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memperoleh NPWP melalui Kantor pelayanan Pajak (KPP) maupun melalui <i>e-registration</i> dari <i>website</i> pajak | | | | | |
| 4. | Bapak/ibu memahami bahwa wajib pajak harus melakukan pembukuan untuk mempermudah perhitungan pajak | | | | | |
| 5. | Sebagai wajib pajak, bapak/ibu memahami penghasilan apa saja | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|
| | yang termasuk objek pajak dan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak | | | | | |
| 6. | Bapak/ibu memahami bahwa biaya untuk memperoleh, menagih atau memelihara penghasilan, iuran dana pensiun, pengeluaran untuk pajak daerah dan retribusi dapat mengurangi penghasilan | | | | | |
| 7 | Bapak/ibu memahami bahwa pengambilan pribadi (<i>prive</i>) tidak dapat diakui sebagai biaya dan mengurangi penghasilan | | | | | |
| 8 | Bapak/ibu memahami tentang pajak final dan penghasilan apa saja yang dikenai pajak final | | | | | |
| 9 | Sebagai wajib pajak, bapak/ibu mengetahui peraturan perpajakan UMKM yang berlaku saat ini adalah PP No. 23 Tahun 2018 | | | | | |
| 10 | Sebagai wajib pajak, bapak/ibu mengetahui tarif pajak bagi UMKM yang berlaku saat ini adalah sebesar 0,5% dari peredaran bruto (omzet) | | | | | |
| 11 | Bapak/ibu memahami bahwa pengetahuan mengenai pajak UMKM dapat dengan mudah didapatkan melalui media masa (TV, radio), spanduk atau reklame, maupun sosialisasi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) | | | | | |
| 12 | Sebagai wajib pajak, bapak/ibu memahami perbedaan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) | | | | | |
| 13 | Sebagai wajib pajak, bapak/ibu memahami cara mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran pajak serta cara mengajukan keberatan, | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|
| | banding dan peninjauan kembali atas pajak | | | | | |
| 14 | Bapak/ibu sebagai wajib pajak memahami dan dapat menghitung pajak terutang dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku | | | | | |
| 15 | Sebagai wajib pajak, bapak/ibu memahami cara membayar pajak dengan benar sesuai peraturan yang berlaku baik melalui kantor pos atau bank maupun secara online melalui sistem <i>e-billing</i> | | | | | |
| 16 | Sebagai wajib pajak, Bapak/ibu memahami dan dapat mengisi dan melaporkan SPT dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku baik melalui KPP atau secara online melalui <i>e-filing</i> | | | | | |
| 17 | Pajak bersifat memaksa, sehingga apabila wajib pajak melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi | | | | | |
| 18 | Sebagai wajib pajak, bapak/ibu mengetahui bahwa sanksi yang akan dikenakan pada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana | | | | | |

3. PEMERIKSAAN PAJAK

Berikan checklist (✓) pada salah satu kolom yang sesuai dengan jawaban bapak/ibu.

Keterangan:

SS = Sangat Setuju

TS = Tidak Setuju

S = Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

KS = Kurang Setuju

| No | Pertanyaan | STS | TS | KS | S | SS |
|----|------------|-----|----|----|---|----|
|----|------------|-----|----|----|---|----|

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Pemeriksaan khusus dilaksanakan apabila adanya dugaan melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan. | | | | | |
| 2 | Pemeriksa Pajak memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan pada saat melakukan Pemeriksaan. | | | | | |
| 3 | Petugas pemeriksaan bekerja secara transparan,yaitu bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. | | | | | |
| 4 | Jumlah fungsional Pemeriksa Pajak dengan Jumlah Wajib Pajak harus seimbang. | | | | | |
| 5 | Pemeriksa lapangan dengan mendatangi ke tempat Wajib Pajak dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan. | | | | | |
| 6 | Pemeriksa Pajak menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan. | | | | | |
| 7 | Pemeriksa Pajak memberikan bukti pemeriksaan secara tertulis perihal pemeriksaan buku, catatan, dokumen dan/atau data-data lain. | | | | | |
| 8 | Pemeriksa mempelajari berkas Wajib Pajak atau data lain yang tersedia. | | | | | |
| 9 | Pemeriksa mencari kebenaran dan kelengkapan data atau informasi dari Wajib Pajak dengan bukti-bukti yang diperoleh dari pihak ketiga. | | | | | |
| 10 | Pemeriksa Pajak memberitahukan secara tertulis tentang hasil pemeriksaan. | | | | | |
| 11 | Pemeriksa Pajak memberikan kesempatan Wajib Pajak untuk memberikan tanggapan dan penjelasan atas temuan Pemeriksaan. | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|
| 12 | Wajib Pajak yang diperiksa dapat mengajukan keberatan. | | | | | |
| 13 | Terhadap temuan dalam pemeriksaan lengkap yang seluruhnya disetujui Wajib Pajak dilakukan pembahasan akhir pemeriksaan. | | | | | |
| 14 | Setiap pemeriksaan selalu diakhiri pertanggungjawaban dengan menyusun laporan pemeriksaan. | | | | | |

4. SANKSI PAJAK

Berikan checklist (✓) pada salah satu kolom yang sesuai dengan jawaban bapak/ibu.

Keterangan:

SS = Sangat Setuju

TS = Tidak Setuju

S = Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

KS = Kurang Setuju

| No | Pertanyaan | STS | TS | KS | S | SS |
|----|--|-----|----|----|---|----|
| 1 | Sanksi pajak sangat diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya | | | | | |
| 2 | Sanksi pajak yang berat dan dapat menimbulkan efek jera merupakan salah satu alat untuk mendidik wajib pajak | | | | | |
| 3 | Sanksi pajak harus dikenakan kepada semua wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan tanpa adanya toleransi | | | | | |
| 4 | Sanksi pajak yang ada telah diterapkan secara tegas kepada para wajib pajak yang melakukan pelanggaran | | | | | |
| 5 | Pengenaan sanksi pajak harus disesuaikan dengan pelanggaran | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|
| | yang telah dilakukan oleh wajib pajak | | | | | |
| 6 | Bapak/ibu setuju apabila pelanggaran pajak dalam bentuk yang sama harus dikenakan sanksi yang sama pula | | | | | |
| 7 | Bapak/ibu setuju apabila setiap orang yang dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang isinya tidak benar sehingga menimbulkan kerugian negara dikenai sanksi pidana | | | | | |
| 8 | Bapak/ibu setuju apabila sanksi administrasi berupa bunga 2% dikenakan atas pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dan angsuran atau penundaan pembayaran pajak | | | | | |
| 9 | Bapak/ibu setuju apabila sanksi administrasi berupa denda 2% dari dasar pengenaan pajak dikenakan terhadap pengusaha yang tidak membuat faktur pajak atau tidak melaporkan faktur pajak | | | | | |
| 10 | Bapak/ibu setuju apabila sanksi kenaikan 50% dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak melakukan pembukuan | | | | | |
| 11 | Sanksi administrasi dan sanksi pidana mendorong bapak/ibu untuk membayar dan melaporkan pajak tepat waktu | | | | | |
| 12 | Sanksi pajak harus di terapkan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak dapat dinegosiasi | | | | | |
| 13 | Bapak/ibu belum pernah terkena sanksi karena melakukan penyimpangan pajak | | | | | |

5. KESADARAN PAJAK

Berikan checklist (✓) pada salah satu kolom yang sesuai dengan jawaban bapak/ibu.

Keterangan:

SS = Sangat Setuju

TS = Tidak Setuju

S = Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

KS = Kurang Setuju

| No | Pertanyaan | STS | TS | KS | S | SS |
|----|--|-----|----|----|---|----|
| 1 | Bapak/Ibu membayar pajak karena dengan pajak pemerintah dapat membuka kesempatan kerja. Sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat. | | | | | |
| 2 | Bapak/Ibu membayar pajak karena dapat menunjang pembangunan negara | | | | | |
| 3 | Bapak/Ibu tidak pernah melakukan kecurangan dengan mengurangi jumlah pajak, karena hal tersebut sangat merugikan negara. | | | | | |
| 4 | Bapak/ibu sadar bahwa pajak yang dibayarkan harus sesuai dengan jumlah pajak yang terutang agar tidak merugikan Negara | | | | | |
| 5 | Bapak/ibu sadar untuk tidak memanipulasi jumlah pajak yang harus dibayar karena akan sangat merugikan negara | | | | | |
| 6 | Bapak/Ibu selalu jujur dalam melaporkan jumlah pajak dan melakukan sendiri perhitungan SPT dengan benar. | | | | | |
| 7 | Bapak/Ibu dengan senang hati selalu melaksanakan kewajiban perpajakan. | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 8 | Bagaimanapun kondisi keuangan Bapak/ibu, Bapak/ibu sadar untuk tetap membayar pajak sesuai kondisi penghasilan usaha yang sebenarnya dan sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak merugikan Negara | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|

TERIMA KASIH

Lampiran 9. Identitas Responden Penelitian

| No | Nama : | Gender | Jenis Usaha | Lama Usaha | Pernah mendapat sosialisasi pajak? |
|-----|--------------------|-----------|-------------------------|------------|------------------------------------|
| 1. | Sukamto | Laki-Laki | Sound Sistem | >10 Tahun | Ya |
| 2. | Edi | Laki-Laki | Pulsa dan HP | 1-5 Tahun | Tidak |
| 3. | Rahmiati | Perempuan | Olahan Pangan | 1-5 Tahun | Tidak |
| 4. | Anonim | Laki-Laki | Jasa Percetakan | 1-5 Tahun | Tidak |
| 5. | Eko Juli Kristanto | Perempuan | Cenelo Ukir | < 1 Tahun | Ya |
| 6. | Lilik | Perempuan | Olahan Pangan | 1-5 Tahun | Ya |
| 7. | Anonim | Laki-Laki | Olahan Pangan | > 10 Tahun | Ya |
| 8. | Sarno | Laki-Laki | Sembako | > 10 Tahun | Tidak |
| 9. | Kuswandi | Laki-Laki | Pupuk dan Bibit Tanaman | 1-5 Tahun | Ya |
| 10. | Eko Prasetyo | Laki-Laki | Pintu Pagar, Tralis dll | 1-5 Tahun | Tidak |
| 11. | Djuminah | Perempuan | Olahan Pangan | 6-10 Tahun | Tidak |
| 12. | Ismiati Umar | Perempuan | Olahan Pangan | 6-10 Tahun | Tidak |
| 13. | Kusnun | Laki-Laki | Toko Bangunan | >10 Tahun | Tidak |
| 14. | Anonim | Perempuan | Olahan Pangan | >10 Tahun | Tidak |
| 15. | Agung | Laki-Laki | Jasa Kendaraan | >10 Tahun | Tidak |
| 16. | Asmi | Perempuan | Jahitan | >10 Tahun | Tidak |
| 17. | Sukarni | Laki-Laki | Olahan Pangan | >10 Tahun | Tidak |
| 18. | Sugiatmi | Perempuan | Sembako | 1-5 Tahun | Tidak |
| 19. | Haryanto | Laki-Laki | Agen Koran | > 10 Tahun | Tidak |
| 20. | Supriyanto | Laki-Laki | Toko Kelontong | > 10 Tahun | Tidak |
| 21. | Anonim | Perempuan | Olahan Pangan | 6-10 Tahun | Tidak |

| | | | | | |
|-----|---------------------------------|-----------|-----------------|------------|-------|
| 22. | Murtadho | Laki-Laki | Olahan Pangan | >10 Tahun | Ya |
| 23. | Atun | Perempuan | Sembako | >10 Tahun | Tidak |
| 24. | Fadila rani | Perempuan | Olahan Pangan | < 1 Tahun | Tidak |
| 25. | Jumarni | Perempuan | Olahan Pangan | >10 Tahun | Tidak |
| 26. | Mohamad Rokhim | Laki-Laki | Bengkel Las | 6-10Tahun | Ya |
| 27. | Sri | Perempuan | Pulsa dan HP | 6-10 Tahun | Tidak |
| 28. | Agus prasetyo | Laki-Laki | Fashion | 1-5 Tahun | Ya |
| 29. | Rini Safitri | Perempuan | Sembako | 6-10 Tahun | Tidak |
| 30. | Chomsah | Perempuan | Jasa | > 10 Tahun | Tidak |
| 31. | Desvika Restu Setyaningsih | Perempuan | Jasa | 1-5 Tahun | Tidak |
| 32. | Nada Alifia | Perempuan | Jasa | 1-5 Tahun | Ya |
| 33. | Anonim | Laki-Laki | Jasa | > 10 Tahun | Tidak |
| 34. | Sumaryanah | Perempuan | Olahan Pangan | >10 Tahun | Ya |
| 35. | Yoto | Laki-Laki | Penjahit | >10 Tahun | Tidak |
| 36. | Idah | Perempuan | Olahan Pangan | >10 Tahun | Tidak |
| 37. | Siti Aminah | Perempuan | Toko | >10 Tahun | Tidak |
| 38. | Haikal inggrid Sebastian | Laki-Laki | Olahan Milenial | < 1 Tahun | Tidak |
| 39. | Edy santoso | Laki-Laki | Olahan Pangan | 1-5 Tahun | Ya |
| 40. | Rosida Nur Khasanah | Perempuan | Online Shop | < 1 Tahun | Tidak |
| 41. | Kurnia Dwi Rahayu | Perempuan | Olahan Pangan | < 1 Tahun | Tidak |
| 42. | Maulana Irham syafi | Laki-Laki | Jasa Kos | 1-5 Tahun | Tidak |
| 43. | Devi Nurullia R. | Perempuan | Olahan Pangan | 1-5 Tahun | Tidak |
| 44. | Muhammad Rizqi Fakhri Kurniawan | Laki-Laki | Desain | < 1 Tahun | Tidak |
| 45. | Najla ainun hapsari | Perempuan | Fauna Kecil | < 1 Tahun | Tidak |
| 46. | Alfino Kristian Soplanit | Laki-Laki | Soplanito | < 1 Tahun | Tidak |
| 47. | Anonim | Laki-Laki | Jual Beli HP | 1-5 Tahun | Ya |

| | | | | | |
|-----|---------------------|-----------|--------------------|------------|-------|
| 48. | RIZKI INDRIAWATI | Perempuan | Online Shop | < 1 Tahun | Tidak |
| 49. | Rudi | Laki-Laki | Penjahit | 6-10 Tahun | Ya |
| 50. | Sri Sunaryati | Perempuan | Kos-kosan | 1-5 Tahun | Tidak |
| 51. | Sudaryanah | Perempuan | Berdagang | 5-10 Tahun | Tidak |
| 52. | Zulaekah | Perempuan | Olahan Pangan | >10 Tahun | Tidak |
| 53. | Lala | Perempuan | Laundry | 1-5 Tahun | Tidak |
| 54. | Yanto | Laki-Laki | Olahan Pangan | >10 Tahun | Tidak |
| 55. | Rizatul Fitri | Perempuan | Zae Craft | < 1 Tahun | Tidak |
| 56. | Sumarno | Laki-Laki | Tanaman | < 1 Tahun | Tidak |
| 57. | Sudadi | Laki-Laki | Toko Bangunan | < 1 Tahun | Ya |
| 58. | Suriptiningsih | Perempuan | JK Laundry | < 1 Tahun | Ya |
| 59. | Martini | Perempuan | Sembako | 1-5 Tahun | Ya |
| 60. | Santoso | Laki-Laki | Jual Beli Motor | 6-10 Tahun | Tidak |

**Lampiran 10. Tabulasi Angket Penelitian
Variabel Kepatuhan Pajak (Y)**

| Kode Res | Kepatuhan Pajak (Y) | | | | | | | | | | | | Total |
|----------|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| R-01 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 |
| R-02 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 47 |
| R-03 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 45 |
| R-04 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 56 |
| R-05 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 |
| R-06 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 50 |
| R-07 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 52 |
| R-08 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 58 |
| R-09 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 49 |
| R-10 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 40 |
| R-11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| R-12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 57 |
| R-13 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 53 |
| R-14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 48 |
| R-15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 39 |
| R-16 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 42 |
| R-17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| R-18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 |
| R-19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| R-20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| R-21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 56 |
| R-22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| R-23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 44 |
| R-24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 46 |
| R-25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 58 |
| R-26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| R-27 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 53 |
| R-28 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 46 |
| R-29 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 28 |
| R-30 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 45 |
| R-31 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 52 |
| R-32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 |
| R-33 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 48 |
| R-34 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 51 |
| R-35 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 |
| R-36 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 |
| R-37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 |
| R-38 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 43 |
| R-39 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 47 |
| R-40 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 47 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| R-41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 |
| R-42 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 53 |
| R-43 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 53 |
| R-44 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| R-45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 45 |
| R-46 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 34 |
| R-47 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 |
| R-48 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 50 |
| R-49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 47 |
| R-50 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 43 |
| R-51 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 44 |
| R-52 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 46 |
| R-53 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 46 |
| R-54 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 47 |
| R-55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 52 |
| R-56 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 44 |
| R-57 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 49 |
| R-58 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 |
| R-59 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 |
| R-60 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 44 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| R-42 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 65 |
| R-43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 52 |
| R-44 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 48 |
| R-45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 39 |
| R-46 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 42 |
| R-47 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 58 |
| R-48 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 65 |
| R-49 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 48 |
| R-50 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 40 |
| R-51 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 46 |
| R-52 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 55 |
| R-53 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 45 |
| R-54 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 57 |
| R-55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| R-56 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 57 |
| R-57 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 55 |
| R-58 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 52 |
| R-59 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 54 |
| R-60 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 44 |

**Lampiran 11. Hasil Analisis Statistik Deskriptif
Hasil Statistik Deskriptif Variabel Kepatuhan Pajak (Y)**

Descriptive Statistics

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|--------------------|----|---------|---------|-------|----------------|
| Total | 60 | 28 | 60 | 49,15 | 6,446 |
| Valid N (listwise) | 60 | | | | |

Hasil Analisis Statistik Deskriptif Literasi Pajak (X1)

Descriptive Statistics

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|--------------------|----|---------|---------|-------|----------------|
| Total | 60 | 29 | 90 | 70,15 | 11,050 |
| Valid N (listwise) | 60 | | | | |

Hasil Analisis Statistik Deskriptif Pemeriksaan Pajak (X2)

Descriptive Statistics

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|--------------------|----|---------|---------|-------|----------------|
| Total | 60 | 42 | 70 | 57,50 | 7,799 |
| Valid N (listwise) | 60 | | | | |

Hasil Analisis Statistik Deskriptif Sanksi Pajak (X3)

Descriptive Statistics

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|--------------------|----|---------|---------|-------|----------------|
| Total | 60 | 30 | 65 | 53,12 | 7,812 |
| Valid N (listwise) | 60 | | | | |

Hasil Analisis Statistik Deskriptif Kesadaran Pajak (Z)

Descriptive Statistics

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|--------------------|----|---------|---------|-------|----------------|
| Total | 60 | 24 | 40 | 34,28 | 4,377 |
| Valid N (listwise) | 60 | | | | |

**Lampiran 12. Hasil Analisis Statistik Deskriptif per Indikator
Variabel Kepatuhan Pajak (Y)**

| No | Indikator | Mean | Kategori |
|----|--|-------|---------------|
| 1 | Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara sukarela ke Kantor Pelayanan Pajak | 8,42 | Sangat Tinggi |
| 2 | Melakukan pembukuan atau pencatatan, | 8,42 | Sangat Tinggi |
| 3 | Menghitung pajak terutang dengan benar dan melakukan pembayaran tepat waktu | 16,32 | Tinggi |
| 4 | Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai peraturan perundang-undangan dan melaporkan tepat waktu | 16 | Tinggi |

Variabel Literasi Pajak (X1)

| No | Indikator | Mean | Kategori |
|----|---|-------|----------|
| 1 | Wajib pajak mengetahui fungsi dari pajak yang dibayar | 12,18 | Tinggi |
| 2 | Wajib pajak mengetahui bahwa membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara | 12,02 | Tinggi |
| 3 | Wajib pajak mengetahui perubahan peraturan yang berlaku | 11,2 | Sedang |
| 4 | Wajib pajak mengerti bagaimana cara menghitung pajak yang harus dibayar | 11,43 | Sedang |
| 5 | Wajib pajak membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku | 11,32 | Sedang |
| 6 | Apabila wajib pajak tidak membayar maka akan mendapat sanksi | 12 | Tinggi |

Variabel Pemeriksaan Pajak (X2)

| No | Indikator | Mean | Kategori |
|----|----------------------------------|------|---------------|
| 1 | Kualitas sumber daya (Pemeriksa) | 8,08 | Sangat Tinggi |
| 2 | Integritas pemeriksa | 8,2 | Sangat Tinggi |
| 3 | Rasio pemeriksa dan wajib Pajak | 8,23 | Sangat Tinggi |
| 4 | Tekhnologi informasi | 4,15 | Tinggi |
| 5 | Melakukan pemeriksaan | 8,13 | Sangat Tinggi |

| | | | |
|---|---|-------|--------|
| | atas buku-buku, catatancatatan dan dokumen-dokumen | | |
| 6 | Melakukan informasi kepada pihak ketiga | 12,43 | Tinggi |
| 7 | Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak | 4,13 | Tinggi |
| 8 | Melakukan sidang Penutup | 4,13 | Tinggi |

Variabel Sanksi Pajak (X3)

| No | Indikator | Mean | Kategori |
|----|---|-------|----------|
| 1 | Sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya | 12,53 | Tinggi |
| 2 | Sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada wajib pajak yang melanggar | 12,48 | Tinggi |
| 3 | Sanksi diberikan sesuai pelanggaran yang dilakukan | 11,96 | Sedang |
| 4 | Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku | 16,13 | Tinggi |

Variabel Kesadaran Pajak (Z)

| No | Indikator | Mean | Kategori |
|----|--|-------|----------|
| 1 | Kesadaran adanya hak dan kewajiban memenuhi kewajiban pajak | 4,36 | Tinggi |
| 2 | Kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara dan daerah | 16,98 | Tinggi |
| 3 | Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak sukarela | 12,93 | Tinggi |

Lampiran 13. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas dengan Kepatuhan Pajak sebagai Variabel Dependen

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| N | | 60 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | ,0000000 |
| | Std. Deviation | 4,25792131 |
| | Absolute | ,085 |
| Most Extreme Differences | Positive | ,085 |
| | Negative | -,077 |
| Test Statistic | | ,085 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | ,200 ^{c,d} |

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Uji Normalitas dengan Kesadaran Pajak sebagai Variabel Dependen

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| N | | 60 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | ,0000000 |
| | Std. Deviation | 3,13058349 |
| | Absolute | ,070 |
| Most Extreme Differences | Positive | ,070 |
| | Negative | -,063 |
| Tes Statistic | | ,570 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | ,200 ^{c,d} |

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Uji Linearitas

Uji Linearitas dengan Kepatuhan Pajak sebagai Variabel Dependen

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | ,751 ^a | ,564 | ,532 | 4,410 | 1,851 |

a. Predictors: (Constant), KSP, LP, PP, SP

b. Dependent Variable: KP

Uji Linearitas dengan Kesadaran Pajak sebagai Variabel Dependen

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | ,699 ^a | ,488 | ,461 | 3,213 | 1,872 |

a. Predictors: (Constant), SP, LP, PP

b. Dependent Variable: KSP

Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas dengan Kepatuhan Pajak sebagai Variabel Dependen

Coefficients^a

| Model | | Collinearity Statistics | |
|-------|-----|-------------------------|-------|
| | | Tolerance | VIF |
| 1 | LP | ,688 | 1,453 |
| | PP | ,375 | 2,668 |
| | SP | ,361 | 2,768 |
| | KSP | ,512 | 1,955 |

a. Dependent Variable: KP

Uji Multikolonieritas dengan Kesadaran Pajak sebagai Variabel Dependen

Coefficients^a

| Model | | Collinearity Statistics | |
|-------|----|-------------------------|-------|
| | | Tolerance | VIF |
| 1 | LP | ,688 | 1,453 |
| | PP | ,417 | 2,401 |
| | SP | ,402 | 2,486 |

a. Dependent Variable: KSP

Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas dengan Kepatuhan Pajak sebagai Variabel Dependen

Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| (Constant) | 1,461 | 3,005 | | ,486 | ,629 |
| 1 LP | -,054 | ,037 | -,223 | -1,450 | ,153 |
| PP | ,128 | ,071 | -,375 | 1,799 | ,077 |
| SP | ,042 | ,072 | ,124 | ,585 | ,561 |
| KSP | -,117 | ,108 | -,192 | -1,076 | ,287 |

a. Dependent Variable: Abs_Res

Uji Heterokedastisitas dengan Kesadaran Pajak sebagai Variabel Dependen

Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| (Constant) | 9,713 | 1,723 | | 5,638 | ,000 |
| 1 LP | -,039 | ,023 | -,237 | -1,692 | ,096 |
| PP | -,065 | ,042 | -,278 | -1,540 | ,129 |
| SP | -,013 | ,043 | -,056 | -,307 | ,760 |

a. Dependent Variable: Abs_Res2

Analisis Jalur

Model Persamaan Regresi 1

Output SPSS R Square dengan Kepatuhan Pajak sebagai Variabel Dependen

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | ,751 ^a | ,564 | ,532 | 4,410 |

a. Predictors: (Constant), KSP, LP, PP, SP

b. Dependent Variable: KP

Hasil Analisis Regresi dengan Kepatuhan Pajak sebagai Variabel Dependen

Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 11,200 | 5,086 | | 2,202 | ,032 |
| | LP | -,009 | ,063 | -,016 | -,151 | ,880 |
| | PP | -,049 | ,120 | -,059 | -,403 | ,688 |
| | SP | ,392 | ,122 | ,475 | 3,206 | ,002 |
| | KSP | ,600 | ,183 | ,408 | 3,273 | ,002 |

a. Dependent Variable: KP

Model Persamaan Regresi 2

Output SPSS R Square dengan Kesadaran Pajak sebagai Variabel Dependen

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | ,699 ^a | ,488 | ,461 | 3,213 |

a. Predictors: (Constant), SP, LP, PP

b. Dependent Variable: KSP

Hasil Analisis Regresi dengan Kesadaran Pajak sebagai Variabel Dependen

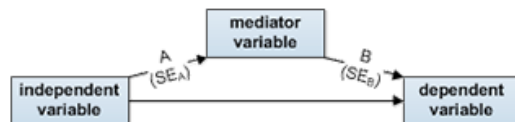
Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 11,196 | 3,391 | | 3,302 | ,002 |
| | LP | -,002 | ,046 | -,005 | -,046 | ,964 |
| | PP | ,208 | ,083 | ,370 | 2,498 | ,015 |
| | SP | ,213 | ,084 | ,380 | 2,518 | ,015 |

a. Dependent Variable: KSP

Lampiran 14. Uji Sobel

1. Pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan pajak melalui kesadaran pajak sebagai variabel intervening

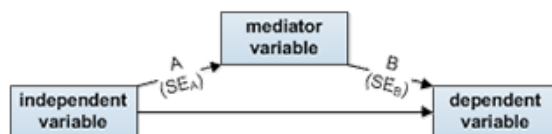


A: ?
 B: ?
 SE_A : ?
 SE_B : ?

Calculate!

Sobel test statistic: -0.04347444
One-tailed probability: 0.48266167
Two-tailed probability: 0.96532334

2. Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak melalui kesadaran pajak sebagai variabel intervening

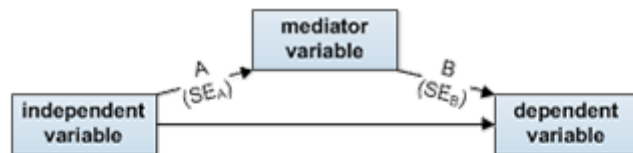


A: ?
 B: ?
 SE_A : ?
 SE_B : ?

Calculate!

Sobel test statistic: 1.99103388
One-tailed probability: 0.02323858
Two-tailed probability: 0.04647716

3. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak melalui kesadaran pajak sebagai variabel intervening



A: ?

B: ?

SE_A: ?

SE_B: ?

Calculate!

Sobel test statistic: 2.00582657

One-tailed probability: 0.02243738

Two-tailed probability: 0.04487475